



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 83 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBUATAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN
DAN AKSES ARSIP DINAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman secara nyata dalam pengelolaan kearsipan yang efektif dan efisien dan mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip, perlu tabel sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
- b. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis kurang memenuhi kebutuhan dalam pengamanan arsip dinamis, sehingga perlu ditambah beberapa hal tentang pengaturannya;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128);
19. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 36);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBUATAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis, diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 1 dan 2 ditambahkan 1 Pasal yaitu Pasal 1.A, Pasal 1.A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1.A

Tabel Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis ditambahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 2 September 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 2 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBUATAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

PEMERINTAH KOTA BLITAR

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	010	URUSAN DALAM				
		Telekomunikasi: Administrasi Penggunaan/Langganan Peralatan Telekomunikasi, meliputi: Telepon, Radio, Teleks, TV kabel, dan Internet Perjalanan Dinas a. Dalam Negeri b. Luar Negeri	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		Administrasi Penggunaan Fasilitas Kantor, meliputi: Permintaan dan Penggunaan Ruang, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas, dan Fasilitas Kantor Lainnya Risalah/Notulen Rapat a. Rapat Pimpinan Daerah/Setingkat Eselon II b. Rapat Pimpinan Eselon II dan III c. Rapat Staf	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Administrasi Penyediaan Konsumsi dan Akomodasi Pengurusan kendaraan dinas: a. Pengurusan Surat-Surat Kendaraan Dinas b. Pemeliharaan dan Perbaikan c. Pengurusan Kehilangan dan Masalah Kendaraan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		Pemeliharaan gedung dan taman: a. Pertamanan/ <i>Landscaping</i> b. Penghijauan c. Perbaikan Gedung d. Perbaikan Rumah Dinas/Wisma e. Kebersihan Gedung dan Taman Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telpn, dan Komputer: a. Perbaikan/ Pemeliharaan b. Pemasangan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		Ketertiban dan keamanan a. Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor, dan Rumah Dinas: 1) Daftar Nama Satuan Pengamanan 2) Daftar Jaga/ Daftar Piket 3) Catatan Gangguan/ Pelanggaran/ Kejadian 4) Surat Izin Keluar Masuk Orang atau Barang b. Laporan Ketertiban dan Keamanan 1) Kehilangan 2) Kerusakan 3) Kecelakaan 4) Gangguan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Administrasi Pengelolaan Parkir Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan, dan Pegawai Lainnya				
2	020	PERALATAN Ketentuan-Ketentuan tentang Pengelolaan Barang Daerah Rencana Kebutuhan Barang a. Usulan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) b. Rencana/Daftar Kebutuhan Barang (RKBU/DKBU) Standardisasi, meliputi: Standardisasi Barang dan Harga Pengadaan/Pembelian Barang/Jasa a. Pengadaan/Pembelian Barang Tidak Melalui Lelang (Pengadaan Langsung) - Usulan Unit Kerja dan Unit Pendukung - Proses Pengadaan Barang - Serah Terima Barang b. Pengadaan/Pembelian Barang melalui Lelang - Umum - Terbatas - Pemilihan Langsung - Penunjukan Langsung c. Melalui Bantuan/Hibah d. Melalui Tukar Menukar e. Melalui Pinjam Pakai f. Melalui Kerjasama Pemanfaatan g. Melalui Bangun Guna Serah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Peminjaman Barang Bergerak, meliputi: Alat Perlengkapan Kantor, Kendaraan Dinas, Barang Inventaris, dan Barang Bergerak Lainnya Bukti-bukti Kepemilikan: a. Bukti-Bukti Kepemilikan Gedung/Bangunan, meliputi: Sertifikat Tanah, Izin Bangunan, Gambar berikut <i>Bestek</i> (Rancang Bangun Gedung), Silsilah Riwayat Bangunan, Cara Perolehan, dan Pengalihan Kepemilikan b. Bukti-Bukti Kepemilikan Barang Bergerak, meliputi: Kendaraan Dinas, Barang Inventaris, dan <u>Barang Bergerak Lainnya</u> Administrasi Pergudangan, meliputi: Buku Gudang, Buku Pengadaan, Buku Penerimaan Barang, Buku Pengeluaran Barang, Kartu Barang, Kartu Persediaan Barang, dan Laporan Mutasi Barang	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		Pemeliharaan Barang, meliputi: Pemeliharaan dan Perbaikan Perabot Kantor, Kendaraan Dinas, dan Barang Inventaris Lainnya serta Balik Nama Barang Pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Inventarisasi Barang a. Barang Bergerak b. Barang Tidak Bergerak Distribusi Meliputi a. Barang Pakai Habis b. Barang Bergerak c. Barang Tidak Bergerak	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Penghapusan (Penjualan, Pemindahtanganan, Tukar Guling, Hibah) Gedung Bangunan, dan Kelengkapan Persyaratan Kasus Penolakan Pembelian Rumah Dinas oleh Penghuni/Bukan Penghuni, meliputi: Permohonan dan Hasil Pembahasan Persyaratannya				
3	027	PENGADAAN KEBIJAKAN Kebijakan: Pengembangan Strategi, Monitoring-evaluasi dan Pengembangan Sistem <i>Informasi, Pengembangan</i> dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Penyelesaian Sengaja 1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2. Penyiapan Kebijakan 3. Perumusan kebijakan 4. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) 5. Penetapan kebijakan 6. MOU PELAKSANAAN PENGADAAN A. Penyusunan rencana umum pengadaan 1. Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Barang/Jasa 2. Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran Pengadaan 3. Penetapan Kebijakan Umum 4. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) 5. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan	Biasa/ Terbuka	Pengguna	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		B. Pemilihan Penyedia 1. Persiapan Pemilihan Penyedia a. Kaji ulang pengadaan b. Menyusun dan Menetapkan spesifikasi c. Menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) d. Menetapkan rancangan kontrak e. Menyusun dokumen pengadaan 2. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia. a. 1) Pengumuman 2) Pendaftaran 3) Penjelasan pekerjaan 4) Pemasukan dan pembukaan penawaran 5) Evaluasi penawaran 6) Penetapan dan pengumuman pemenang b. <i>e-Purchasing</i> c. Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung	Biasa/ Terbuka	Pengguna	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		C. Penandatanganan Kontrak dan Pelaksanaan Kontrak 1. Penandatanganan Kontrak a. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) b. Kontrak c. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2. Pelaksanaan Kontrak a. Laporan Pelaksanaan b. Berita Acara Serah Terima (BAST)				
		D. Swakelola 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pengawasan dan Evaluasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		PENGEMBANGAN STRATEGI PENGADAAN				
		A. Pengembangan Strategi Pengadaan Umum 1. Barang dan jasa a. Barang dan jasa lainnya b. Jasa Konsultasi 2. Pekerjaan Konstruksi a. Pelaksana Konstruksi b. Perencana dan Pengawas Konstruksi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		B. Pengembangan Strategi Pengadaan Khusus 1. Kemitraan pemerintah dengan badan usaha a. Kemitraan infrastruktur b. Kemitraan non infrastruktur 2. Badan usaha dan keadaan khusus a. Badan usaha b. Bidang pertahanan keamanan dan keadaan khusus	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI				
		A. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan				
		1. Perencanaan pengadaan				
		a. Perencanaan Pengadaan				
		Kementerian/Lembaga/Instansi				
		b. Perencanaan Pengadaan Pemerintah				
		Daerah				
		2. Monitoring dan evaluasi				
		a. Pelaksanaan kebijakan pengadaan				
		b. Kinerja pelaksanaan pengadaan				
		B. Pengembangan Sistem Katalog				
		1. Riset dan kontrak				
		a. Riset Pasar dan Industri				
		b. Kontrak payung				
		2. Pengelolaan Katalog				
		a. Pengendalian pelaksanaan katalog				
		b. Evaluasi katalog				
		C. Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				
		1. Pengembangan aplikasi dan teknologi informasi				
		a. Pengembangan aplikasi Sistem				
		b. Teknologi Informasi dan Komunikasi				
		2. Pengelolaan dan pembinaan layanan				
		a. Bimbingan Teknis LPSE				
		b. Monitoring dan Evaluasi LPSE Nasional				
			Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
			Biasa/ Terbuka	Pengguna	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
			Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA				
		A. Pengembangan pengelola pengadaan 1. Karir pengelola pengadaan 2. Tata kelola pengelola pengadaan 3. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa 4. Standar kompetensi 5. Kelompok Kerja Pemilihan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH				
		A. Bantuan hukum/konsultasi hukum/advokasi Pemberian bantuan/ konsultasi hukum (pidana, perdata, tata usaha negara dan agama)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		B. Penanganan Permasalahan Hukum 1. Penanganan permasalahan kontrak a. Penanganan permasalahan kontrak barang dan jasa b. Penanganan permasalahan kontrak pekerjaan konstruksi 2. Keterangan ahli a. Keterangan ahli barang dan jasa b. Keterangan ahli pekerjaan konstruksi				

NG	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	041	PERPUSTAKAAN KEBIJAKAN Perumusan kebijakan di bidang pengembangan bahan 1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2. Penyiapan bahan 3. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 4. Pengumpulan dan pengolahan data 5. Penetapan dalam bentuk NSPK meliputi Kajian Kebutuhan Bahan Perpustakaan, Kajian Pengolahan Bahan Perpustakaan, Pedoman Pengolahan, Pembakuan Perpustakaan, Kajian PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN JASA INFORMASI	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		1. Deposit Bahan Pustaka a. Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam b. Bukti Penerimaan Koleksi Bahan Pustaka c. Administrasi pengolahan Deposit Bahan d. Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha e. Terbitan Internasional dan Regional f. Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam g. Bibliografi dan Katalog 1) Bibliografi Nasional Indonesia (BNI) 2) Bibliografi Daerah (BD) 3) Katalog Induk Nasional (KIN) 4) Katalog Induk Daerah (KID) 5) Katalog Dalam Terbitan (KDT)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		h. Pendaftaran Nomor <i>International Standard Book Number (ISBN)</i> i. Pendaftaran Nomor <i>International Standard Music Number (ISMN)</i>				
		2. Pengembangan Koleksi a. Akuisisi 1) Pembelian 2) Hibah 3) Hadiah 4) Tukar Menukar 5) Implementasi Undang-Undang KCKR 6) Terbitan Internal 7) Pendistribusian bahan pustaka surplus (bagi pemberi) b. Pengolahan Bahan Pustaka (diambil dari pedoman JRA Fasilitatif perpustakaan) 1) Buku induk koleksi 2) Daftar buku terseleksi 3) Daftar buku dalam pemesanan 4) Daftar buku dalam permintaan 5) Daftar pengiriman Bahan Pustaka Surplus (bagi penerima) 6) Lembar kerja pengolahan BP (Buram, Pengkatalogan) 7) Shelt List / Jajaran Kartu Utama (master list) 8) Daftar tambahan Buku (Assesion list) 9) Daftar/jajaran kendali (Subyek dan Pengarang) c. Pangkalan Data Katalog Koleksi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3. Jasa Perpustakaan dan Informasi a. Keanggotaan b. Sirkulasi c. Referensi d. Alih aksara, Alih Bahasa dan Kajian Naskah Nu 1) Pertanyaan Rujukan dan Jawaban 2) Data dan statistik anggota, pengunjung dan peminjaman bahan pustaka e. Kerjasama Perpustakaan 1) <i>MoU</i> 2) Perjanjian kerjasama 3) Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional f. Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan 1) Pengembangan situs web 2) Pengembangan kemas ulang informasi multimedia 3) Pengembangan program aplikasi perpustakaan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
			Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		4) Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital g. Pangkalan Data Layanan Perpustakaan				
		4. Preservasi Bahan Pustaka a. Konservasi 1) Perawatan Bahan Perpustakaan 2) Perbaikan Bahan Perpustakaan 3) Penjilidan Bahan Perpustakaan b. Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto) c. Transformasi Digital d. Kurasi Digital	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN				
		1. Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca a. Pengembangan Perpustakaan 1) Perpustakaan Umum 2) Perpustakaan Khusus 3) perpustakaan Sekolah 4) perpustakaan Perguruan Tinggi b. Akreditasi Perpustakaan 1) Permintaan akreditasi 2) Pemberian akreditasi 3) Pangkalan data perpustakaan yang diakreditasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		c. Pangkalan Data Perpustakaan 1) Nomor Pokok Perpustakaan 2) Perpustakaan Berbasis Wilayah d. Pemasyarakatan Minat Baca 1) Bimbingan teknis 2) Penyuluhan 3) Sosialisasi e. Organisasi Perpustakaan 1) Forum Perpustakaan Umum 2) Forum Perpustakaan Khusus 3) Forum Perpustakaan Sekolah 4) Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi 5) Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca 6) Organisasi Perpustakaan Lainnya				
		2. Pengembangan Pustakawan a. Sertifikasi Tenaga Perpustakaan b. Pembinaan Tenaga Perpustakaan c. Penerbitan Jurnal d. Penilaian Jabatan Fungsional Pustakawan Tim Penilai Instansi e. Pemasyarakatan f. Evaluasi Tenaga Perpustakaan g. Pangkalan data Tenaga Perpustakaan h. Pangkalan data Tim Penilai Pustakawan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1) Penyelenggaraan 2) Berkas Penetapan Arsiparis Teladan e) Data Base Arsiparis 3 Bimbingan, Konsultasi, Apresiasi, Sosialisasi, Penyuluhan dan Pemasyarakatan Kearsipan a) Penerapan Sistem (Klasifikasi Arsip, Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Akses Keamanan) b) Penggunaan Sarana dan Prasarana Kearsipan c) Unit Kearsipan d) SDM Kearsipan e) Penyuluhan dan Pemasyarakatan Kearsipan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		4. Supervisi dan Evaluasi a) Perencanaan b) Pelaksanaan c) Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi 5. Database Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		6 Pengawasan Kearsipan a) Perencanaan b) Pelaksanaan c) Laporan Hasil Pengawasan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		7 Fasilitasi Kearsipan a) SDM Kearsipan b) Prasarana dan Sarana	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		8 Lembaga/Unit Kearsipan Teladan a) Penyelenggaraan b) Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		9 Jadwal Retensi Arsip a) Pengusulan dan Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip b) Data Base Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		PENGLOLAAN ARSIP				
		1. Pengelolaan Arsip Dinamis a. Penciptaan 1) Pencatatan - Buku Agenda - Kartu Kendali - Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi 2) Pendistribusian	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		b. Penggunaan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		1) Pengklasifikasian Pengamanan dan Akses Arsip				
		2) Layanan Arsip				
		c. Pemeliharaan				
		1) Pemberkasan				
		- Daftar arsip aktif (daftar berkas dan isi berkas)				
		2) Penataan Arsip Inaktif				
		- Pengaturan fisik				
		- Pengolahan informasi arsip				
		- Penyusunan daftar arsip inaktif				
		3) Penyimpanan arsip				
		- Skema penyimpanan arsip aktif dan in aktif				
		- Pengamanan				
		4) Alih Media				
		- Kebijakan alih media				
		- Autentikasi				
		- Berita acara				
		- Daftar arsip yang alih mediakan				
		5) Program Arsip vital				
		- Identifikasi				
		- Pelindungan dan pengamanan				
		- Penyelamatan dan pemulihan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Keputusan Penetapan Penyerahan - Berita Acara Penyerahan Arsip - Daftar arsip yang diserahkan				
		f. Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis 1) Data Base Pengelolaan Arsip Aktif 2) Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif 3) Data Base Pengelolaan Arsip Vital/Aset	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		2. Pengelolaan Arsip Statis a. Akuisisi 1) Monitoring fisik dan daftar 2) Verifikasi terhadap daftar arsip 3) Menetapkan status arsip statis 4) Persetujuan untuk Penyerahan 5) Penetapan arsip yang diserahkan 6) Berita Acara Penyerahan Arsip 7) Daftar arsip yang diserahkan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		b. Sejarah Lisan 1) Administrasi Pelaksanaan Sejarah Lisan 2) Hasil Wawancara Sejarah Lisan - Berita Acara wawancara Sejarah Lisan - Laporan Kegiatan - Hasil Wawancara (Kaset atau CD) dan transkrip	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		d. Autentikasi Arsip Dinamis 1) Pembuktian Autentisitas 2) Pendapat tenaga ahli 3) Pengujian 4) Penetapan autentisitas arsip statis/surat e. Penyusutan 1) Pemindahan Arsip Inaktif - Berita acara Pemindahan - Daftar arsip yang di pindahkan 2) Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna - Panitia penilai - Penilaian panitia penilai - Permintaan persetujuan (Kepala ANRI, Kepala Lembaga Kearsipan) - Penetapan arsip yang dimusnahkan - Berita Acara Pemusnahan Arsip - Daftar arsip yang dimusnahkan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		3) Penyerahan arsip statis - Pembentukan Panitia Penilai - Notulen Rapat Panitia - Surat pertimbangan Panitia Penilai - Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan - Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan dari pencipta arsip	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		c. Daftar Pencarian Arsip Statis 1) Pengumuman 2) Akuisisi daftar pencarian arsip statis 3) Laporan Hasil Pencarian	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		d. Penghargaan dan Imbalan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		e. Pengolahan 1) Penataan Informasi (termasuk Pengajuan ISBN) 2) Penataan Fisik 3) Sarana Bantu Temu Balik - Daftar Arsip Statis - Inventaris Arsip Statis - Guide Arsip Statis	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		f. Preservasi 1) Preventif - Penyimpanan - Pengendalian hama terpadu - Reproduksi (Alih Media) 1. Berita Acara alih media 2. Daftar Arsip yang dialih mediakan - Perencanaan dan Penanggulangan Bencana	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) Kuratif - Perawatan Arsip 3) Laporan Hasil Pengujian Mutu Preservasi				
		g. Autentikasi Arsip Statis 1) Pembuktian Autentisitas 2) Pendapat tenaga ahli 3) Pengujian 4) Penetapan autentisitas arsip statis/surat pernyataan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		h. Akses Arsip Statis 1) Layanan Arsip 2) Penerbitan Naskah Sumber - Administrasi dan proses penyusunan - Hasil naskah sumber arsip berikut ISBN/ISSN 3) Pameran arsip	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		i. Jasa Kearsipan 1) Konsultasi Kearsipan 2) Manual Kearsipan 3) Penataan Arsip 4) Otomasi Kearsipan 5) Penyimpanan Arsip 6) Perawatan dan Pemeliharaan Arsip 7) Data Base Jasa Kearsipan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	046	SANDI				
		KEBIJAKAN Kebijakan : pembinaan dan pengendalian persandian, pengamanan persandian. 1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2. Penyiapan Kebijakan 3. Perumusan kebijakan 4. Masukan dan dukungan kebijakan 5. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA MANUSIA, MATERIIL DAN JARING KOMUNIKASI SANDI DAN AKREDITASI DAN SERTIFIKASI 1 Sumber daya manusia a. Data Personel Sandi b. Pembinaan Personel Sandi c. Pengawasan dan Pengendalian 2 Materiil , a. Data Materiil dan JKS b. Analisa Kebutuhan Materiil dan Jaringan Komunikasi Sandi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		PENGAMANAN PERSANDIAN 1 Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kriptografi a. Pelaksanaan (Perencanaan Dan Adm) b. Pelaporan 2 Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptografi a. Pelaksanaan (Perencanaan Dan Administrasi) b. Pelaporan	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3 Materiil sandi: sistem dan peralatan a. Pelaksanaan (Perencanaan dan Administrasi) b. Pelaporan				
		PENGKAJIAN PERSANDIAN : KRIPTOGRAFI, PERALATAN SANDI, KOMUNIKASI SANDI 1 Perencanaan Pengkajian 2 Administrasi Pengkajian 3 Pelaksanaan 4 Pelaporan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
7	050.13	BAPPEDA KEBIJAKAN Perumusan Kebijakan Rencana Pembangunan meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)/ <i>Master Plan</i> , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk peraturan perundang- undangan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN/MUSRENBANG Musrenbang Kota	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah /Renstra 2 Rencana Pembangunan Tahunan (Renja) 3 Program Kerja Tahunan a. Usulan Perangkat daerah beserta data pendukungnya b. Program kerja tahunan Perangkat daerah c. Program kerja tahunan Pemerintah Kota d. Penetapan/Kontrak Kinerja 1) Pimpinan Unit Kerja 2) Ketua/Menteri/Kepala Lembaga Negara e. Laporan 1) Berkala - Laporan Triwulan - Laporan Semesteran - Laporan Tahunan Perangkat Daerah - Laporan Tahunan Pemerintah Kota - Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2) Laporan Insidental f. Evaluasi Program 1) Perangkat Daerah 2) Pemerintah Kota	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		KONSULTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		PEMANTAUAN, EVALUASI, PENILAIAN DAN PELAPORAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
8	060	ORGANISASI / KETATALAKSANAAN Struktur organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah a. Pembentukan b. Pengubahan c. Pembubaran Uraian Jabatan dan Tata Kerja Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional Tata Laksana a. Prosedur Tetap atau SOP b. Mekanisme Kerja	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Evaluasi Organisasi dan Tata Laksana a. Evaluasi Struktur Organisasi b. Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi c. Evaluasi Uraian Jabatan d. Evaluasi Tata Laksana	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
9	067	PELAYANAN UMUM / PELAYANAN PUBLIK/ ANALISIS KEBIJAKAN Kebijakan: reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tatalaksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik 1. Pengusulan kebijakan 2. Penyiapan Bahan Kebijakan 3. Perumusan kebijakan 4. Penyusunan kebijakan 5. Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN 1. Koordinasi Kebijakan, Penyusunan Program dan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan a. Koordinasi kebijakan: 1) Reformasi Birokrasi 2) Akuntabilitas aparatur 3) Pengawasan b. Penyusunan program 1) Reformasi birokrasi 2) Akuntabilitas aparatur 3) Pengawasan	Biasa / Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan 1) Reformasi Birokrasi 2) Akuntabilitas Aparatur 2. Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan aparatur a. Pengolahan data dan informasi pengaduan masyarakat dan aparatur b. Tindak lanjut dan evaluasi pengaduan masyarakat dan aparatur 3. Sistem evaluasi pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi a. Penyiapan penyusunan sistem evaluasi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi b. Pengolahan data dan informasi evaluasi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi				
		KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA 1. Koordinasi kebijakan, penyusunan, dan evaluasi program kelembagaan dan tata laksana a. Koordinasi kebijakan kelembagaan dan tata laksana b. Penyusunan program kelembagaan dan tata laksana c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program kelembagaan dan tata laksana - Laporan tahunan dan nasional	Biasa / Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2. Koordinasi pelaksanaan <i>E-Government</i> a. Penyiapan perumusan kebijakan <i>E-Government</i> b. Penyiapan koordinasi pelaksanaan <i>E-Government</i> c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan <i>E-Government</i> - Laporan tahunan dan nasional				
		3. Asesmen dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan a. Asesmen di bidang kelembagaan politik, hukum, keamanan, pemerintah daerah, ekonomi, dan kelembagaan kesejahteraan rakyat b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan politik, hukum, keamanan, pemerintah daerah, ekonomi, dan kelembagaan kesejahteraan rakyat c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan politik, hukum, keamanan, pemerintah daerah, ekonomi, dan kelembagaan kesejahteraan rakyat 1) Laporan bersifat tahunan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR 1. Koordinasi kebijakan, penyusunan, evaluasi program dan pembinaan integritas sumber daya manusia aparatur a. Koordinasi kebijakan dan penyusunan program SDM aparatur b. Pembinaan integritas sumber daya manusia aparatur c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program SDM aparatur 2. Perencanaan dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara a. Perencanaan Aparatur Sipil Negara b. Penempatan dan distribusi Aparatur Sipil Negara c. Sistem informasi dan <i>database</i> Aparatur Sipil Negara 3. Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur a. Penetapan pengadaan sumber daya manusia aparatur b. Evaluasi kebijakan pengadaan sumber daya manusia aparatur	Biasa / Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		4. Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur a. Standardisasi jabatan sumber daya manusia aparatur b. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur 5. Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur a. Penetapan gaji dan tunjangan sumber daya manusia aparatur - Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan (Taprum) b. Penetapan pensiun sumber daya manusia aparatur - Surat Keputusan dan Nota				
		PELAYANAN PUBLIK 1. Koordinasi Kebijakan, Penyusunan Evaluasi Program Pelayanan Publik a. Koordinasi kebijakan pelayanan publik b. Penyusunan program pelayanan publik c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program pelayanan publik - Laporan tahunan dan nasional 2. Inovasi dan Sistem Informasi Pelayanan Publik a. Inovasi pelayanan publik b. Sistem informasi pelayanan publik	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		3. Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Publik Politik, Hukum, Keamanan, Perekonomian, dan Pelayanan Publik Kesejahteraan Rakyat a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan b. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 1) Laporan tahunan				
10	072	SURVEY KEBIJAKAN Perumusan Kebijakan dibidang Statistik meliputi : Metodologi dan Informasi Statistik, Statistik Sosial, Statistik Produksi, Statistik Distribusi dan Jasa, Neraca dan Analisis Statistik. 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 4 Pengembangan desain dan standarisasi 5 Penetapan dalam bentuk NSPK SURVEI 1 Perencanaan a. <i>Master Plan dan Network planing</i> b. Perumusan dan penyusunan bahan 1) Penyiapan bahan penyusunan rancangan survei	Biasa / Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			Biasa / Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) Penyusunan metode pencacahan survei				
		3) Penentuan volume survei				
		4) Penyusunan desain penarikan sampel				
		5) Penyusunan kerangka sampel				
		c. Studi pendahuluan (<i>desk study</i>)				
		2 Persiapan				
		a. Penyusunan rancangan organisasi kegiatan survei	Biasa / Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		b. Penyusunan Kuesioner				
		c. Penyusunan konsep dan definisi				
		d. Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur.				
		1) Inventarisasi , penyusunan dan pengembangan ukuran-ukuran yang digunakan dalam survei				
		2) Inventarisasi , penyusunan dan pengembangan lapangan usaha, jabatan, komoditas, perdesaan, perkotaan				
		3) Penyusunan daftar nama dan kode pembagian wilayah administrasi				
		e. Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan)				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1) Buku pedoman pencacahan 2) Buku pedoman pengawasan 3) Buku pedoman pengolahan f. Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah g. Penyusunan pedoman sosialisasi h. Sosialisasi kegiatan kepada <i>stakeholder</i> dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan i. Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern) j. Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT) j. Pelaksanaan pelatihan petugas k. Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi) l. Pelatihan petugas pengolahan m. Perancangan tabel n. Pelaksanaan Ujicoba 1) Ujicoba kuesioner survei (meliputi reliabilitas kuesioner dan sistem pengolahan) 2) Ujicoba metodologi survei (meliputi ujicoba pelaksanaan pencacahan, organisasi lapangan) 3 Pelaksanaan Lapangan a. Pelaksanaan listing b. Pemilihan sampel c. Pengumpulan data d. Pemeriksaan				
			Biasa / Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

f

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		e. Pengawasan Lapangan f. Monitoring kualitas				
		4 Pengolahan a. Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/ <i>Batching</i>) b. Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (<i>Editing/Coding</i>) c. Perekaman data (entri, <i>scanner</i>) d. Tabulasi Data e. Pemeriksaan tabulasi f. Laporan konsistensi tabulasi	Biasa / Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		5 Analisis dan Penyajian Hasil Survei a. Pembahasan angka hasil pengolahan b. Penyusunan angka sementara c. Penyusunan angka tetap d. Penyusunan/pembahasan draft publikasi e. Analisis data f. Penyusunan publikasi	Biasa / Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		6 Diseminasi hasil Survei a. Penyusunan bahan diseminasi 1) <i>leaflet, booklet</i> 2) Penyusunan <i>website</i> 3) Penyusunan CD dan sejenisnya b. Sosialisasi hasil survei melalui berbagai media	Biasa / Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		KONSOLIDASI DATA STATISTIK 1 Kompilasi Data 2 Analisis Data 3 Penyusunan Publikasi	Biasa / Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		EVALUASI DAN PELAPORAN, SURVEI DAN KONSOLIDASI DATA STATISTIK	Biasa / Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
11	130	PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA KEBIJAKAN Kebijakan dan standarisasi teknis di bidang politik dan dalam negeri, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, otonomi daerah, bina pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan, dan pencatatan sipil serta keuangan daerah 1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan 2. Penyiapan Kebijakan 3. Perumusan Kebijakan 4. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) 5. MOU	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan a. Ketahanan Ideologi Negara 1) penguatan ideologi negara 2) implementasi ideologi negara b. Wawasan Kebangsaan 1) penguatan wawasan kebangsaan 2) pembinaan dan sosialisasi 3) implementasi c. Bela Negara 1) pendidikan bela negara 2) pemberdayaan bela negara d. Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan 1) penguatan nilai-nilai sejarah 2) implementasi nilai-nilai sejarah 3) penerbitan rekomendasi penelitian e. Pembauran dan Kewarganegaraan 1) pembinaan pembauran kebangsaan 2) pembinaan kewarganegaraan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

6

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		2. Kewaspadaan Nasional a. Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kejasama Intelijen Keamanan c. Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan d. Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial e. Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing 1) pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing 2) surat pemberitahuan penelitian orang asing	Rahasia / Tertutup (4)	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit pengolah terkait
		3. Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasvarakatan a. Ketahanan Seni 1) fasilitasi pelaksanaan pelestarian kesenian 2) pelaksanaan dan perkembangan nilai- nilai kesenian b. Ketahanan Budaya 1) fasilitasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan	Biasa / Terbuka (4)	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		4) fasilitasi sengketa Ormas	Rahasia/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit pengolahan terkait
		5) fasilitasi Ormas	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		e. Masalah sosial Kemasyarakatan 1) fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika 2) masalah sosial kemasyarakatan	Biasa Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kebudayaan c. Agama dan Kepercayaan 1) fasilitas 2) data Forum Komunikasi Umat Beragama 3) pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan 4) pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan d. Organisasi Kemasyarakatan 1) pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat (a) pendaftaran Ormas (b) <i>database</i> Ormas 2) laporan hasil kerjasama kegiatan dengan ORMAS/LNL 3) evaluasi aktifitas Ormas	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		4. Politik Dalam Negeri a. Implementasi Kebijakan Politik 1) implementasi kebijakan politik - sosialisasi dan publikasi <i>best practise</i> dan inovasi 2) pelaksanaan monitoring dan evaluasi b. Fasilitas Kelembagaan Politik Pemerintahan 1) evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di daerah 2) evaluasi kelembagaan politik pemerintahan daerah - orientasi anggota DPRD c. Fasilitas Kelembagaan Partai Politik 1) verifikasi dan evaluasi partai politik yang memperoleh kursi 2) partai politik yang tidak memperoleh kursi 3) pemerintah daerah 4) <i>database</i> parpol d. Pendidikan Budaya Politik 1) fasilitasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik 2) penyelenggaraan pendidikan budaya politik 3) modul sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan e. Pemilihan Umum 1) fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) evaluasi pelaksanaan pemilihan umum wakil rakyat 3) evaluasi pemilihan umum Presiden dan wakil presiden 4) laporan hasil perkembangan politik di daerah 5) laporan hasil kerjasama kegiatan dengan Ormas/LSM/LNL				
		5. Ketahanan Ekonomi a. Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian 1) penanganan kesenjangan perekonomian b. Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal, dan Moneter 1) fasilitasi identifikasi ketahanan di bidang perdagangan, investasi fiskal, dan perdagangan, bahan perumusan kebijakan, dan fasilitasi monev 2) Penilaian Perekonomian Masyarakat c. 1) pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian 2) evaluasi cinta produk dalam negeri dan perlindungan konsumen d. Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi 1) evaluasi pelaksanaan hubungan kerjasama penanganan kejahatan 2) evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan lembaga perekonomian	Rahasia/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PEMERINTAHAN UMUM				
		1. Dekonsentrasi dan Kerjasama a. Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan b. Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah c. Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama d. Fasilitas Kecamatan 1) fasilitas - database pembentukan kecamatan 2) koordinasi 3) pembinaan dan pengawasan 4) monitoring dan evaluasi - evaluasi kinerja kecamatan e. Fasilitas Pelayanan Umum 1) fasilitas pelayanan administrasi Kecamatan 2) koordinasi pelayanan administrasi Kecamatan 3) pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi Kecamatan 4) monitoring dan evaluasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2. Wilayah Administrasi dan Perbatasan a. Toponimi dan Data Wilayah 1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan toponimi 2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembakuan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan 3) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi perubahan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan 4) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemindahan ibukota daerah dan pemindahan pusat pemerintahan daerah 5) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan 6) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penghitungan luas wilayah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		c. Batas antar-Daerah Wilayah 1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penetapan batas antar-daerah 2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelesaian sengketa batas antar-daerah				
		3. Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat a. Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja 1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi Pelaksanaan tata operasional polisi pamong praja 2) standarisasi sarana prasarana polisi pamong praja (a) fasilitasi (b) koordinasi (c) pembinaan dan pengawasan (d) monitoring dan evaluasi b. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyusunan program peningkatan kapasitas aparaturn polisi pamong praja 2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan evaluasi peningkatan kapasitas aparaturn polisi pamong praja c. Perlindungan Masyarakat 1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan masyarakat 2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan aparaturn dan kelembagaan perlindungan masyarakat d. penyidik pegawai negeri sipil 1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan operasional penyidik pegawai negeri sipil				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan, serta monitoring, dan evaluasi pembinaan dan evaluasi administrasi aparatur penyidik pegawai negeri sipil				
		e. Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia				
		1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan supervisi hak asasi manusia				
		4. Kawasan dan Pertanahan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		a. Kawasan Sumber Daya Alam				
		1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan, serta monitoring pertanian, dan lingkungan				
		b. Pertanahan dan Kawasan Khusus				
		1) penyelenggaraan urusan pertanahan				
		2) penyelesaian sengketa pertanahan				
		3) evaluasi penataan kawasan khusus				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a. Identifikasi Potensi Bencana 1) evaluasi pelaksanaan pencegahan bencana dan mitigasi bencana b. Organisasi Sistem dan Prosedur 1) pengembangan kerjasama kelembagaan serta penanggulangan bencana (a) fasilitasi (b) koordinasi (c) fasilitasi serta koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana c. Sarana dan Prasarana 1) evaluasi standarisasi aplikasi peralatan penyelenggaraan penanggulangan informasi dan teknologi penyelenggaraan d. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 1) evaluasi pengembangan pemberdayaan masyarakat di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran 2) evaluasi peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		OTONOMI DAERAH 1. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah a. Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi 1) pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 2) penyusunan standar pelayanan minimal 2. Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran 3. Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar-Lembaga a. penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah b. administrasi kepala daerah dan DPRD c. penyiapan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas kepala daerah dan d. hubungan antar-lembaga daerah (pemerintah daerah dan DPRD) e. asosiasi daerah 4. Fasilitasi, Monev Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah a. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		b. kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah				
		c. pengembangan kapasitas daerah				
		BINA PEMBANGUNAN DAERAH				
		1. Perencanaan Pembangunan Daerah/Per Wilayah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		2. Pengembangan Wilayah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		a. penyusunan pedoman penyerasian pengembangan wilayah				
		b. penyusunan dan pemutahiran basis data dan informasi pengembangan wilayah				
		c. penyusunan dan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah				
		d. Kawasan Strategis dan Andalan				
		1) evaluasi pengembangan data				
		2) pengembangan kawasan strategis dan andalan				
		3. Fasilitas Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		a. Penataan Ruang Wilayah				
		1) evaluasi perencanaan, pemanfaatan tata ruang wilayah				

b

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian tata ruang wilayah 3) implementasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang b. Penataan Ruang Kawasan 1) evaluasi tata ruang kawasan 2) pembinaan tata ruang kawasan 3) implementasi c. Konservasi dan Rehabilitasi 1) evaluasi pelaksanaan konservasi 2) evaluasi pelaksanaan rehabilitasi 3) implementasi d. Perencanaan dan Pemanfaatan Sumberdaya 1) evaluasi pengembangan potensi sumber daya air 2) evaluasi pemanfaatan sumber daya air 3) implementasi e. Pengendalian Lingkungan Hidup 1) pengembangan instrumen kelembagaan lingkungan hidup 2) analisis dan audit pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 4. Pengembangan Ekonomi Daerah a. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah 1) identifikasi produk unggulan dan analisis potensi ekonomi daerah				
			Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) pengembangan produk unggulan dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah b. Promosi dan Investasi Daerah 1) pelaksanaan promosi ekonomi daerah 2) pelaksanaan investasi daerah c. Sarana dan Prasarana Perekonomian daerah 1) pelaksanaan pengembangan perdagangan 2) pelaksanaan perindustrian daerah d. Kemitraan Usaha 1) perencanaan dan pengembangan kemitraan usaha ekonomi daerah 2) pengelolaan kemitraan usaha ekonomi daerah e. Kelembagaan Ekonomi daerah 1) pelaksanaan pengembangan kelembagaan ekonomi daerah 2) penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi daerah				
		5. Penataan Perkotaan a. Perencanaan Pengendalian Perkotaan 1) evaluasi perencanaan perkotaan 2) fasilitasi 3) pengendalian penataan perkotaan b. Penataan Kota Kecil 1) pengendalian pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan	Biasa/ Terbuka	Pengguna	Apabila diketahui	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan 3) fasilitasi c. Sarana dan Prasarana Perekonomian daerah 1) pelaksanaan pengembangan perdagangan daerah 2) pelaksanaan perindustrian daerah d. Kemitraan Usaha 1) perencanaan dan pengembangan kemitraan usaha ekonomi daerah 2) pengelolaan kemitraan usaha ekonomi daerah e. Kerjasama Perkotaan 1) pengendalian kerjasama perkotaan antar- daerah 2) pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan 3) fasilitasi				
12	140	PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN KEBIJAKAN Kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pemberdayaan masyarakat 1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2. Penyiapan Kebijakan 3. Perumusan Kebijakan 4. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) 5. MOU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
		1. Pemerintahan Kelurahan a. Fasilitasi Pengembangan Kelurahan 1) pelaksanaan pengembangan kelurahan b. Administrasi Pemerintahan Kelurahan 1) pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan c. Fasilitasi Permusyawaratan Kelurahan (LPMK) 1) pelaksanaan penataan kelembagaan badan permusyawaratan Kelurahan (LPMK) 2) pelaksanaan penataan kewenangan badan permusyawaratan Kelurahan (LPMK)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		2. Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat a. Lembaga Masyarakat 1) pembinaan penataan lembaga masyarakat di desa	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) pelaksanaan kerjasama lembaga masyarakat b. Pembangunan Partisipatif 1) pelaksanaan pengembangan metode pembangunan partisipatif 2) pelaporan kinerja pembangunan Kelurahan c. Pendataan Potensi Masyarakat 1) inventarisasi potensi masyarakat - profil Kelurahan 2) evaluasi perkembangan masyarakat e. Pelatihan Masyarakat 1) pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum pelatihan masyarakat (a) <i>grand design</i> pelatihan masyarakat (b) pedoman pelatihan masyarakat (c) fasilitasi (d) monitoring dan evaluasi 2) evaluasi pelatihan masyarakat (a) penyelenggaraan pelatihan (b) monitoring dan evaluasi				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3. Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a. Budaya Nusantara 1) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat 2) pelaksanaan kerjasama adat istiadat b. Pemberdayaan Perempuan 1) pelaksanaan peningkatan pemberdayaan perempuan 2) pembinaan, perlindungan hak-hak perempuan, dan ketidaksetaraan gender c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 1) pelaksanaan pemberdayaan keluarga 2) pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga d. Kesejahteraan Sosial 1) pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial 2) pelaksanaan penanganan masalah sosial e. Tenaga Kerja kelurahan 1) fasilitasi dan evaluasi pembinaan dan pembinaan tenaga kerja 2) fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		4. Usaha Ekonomi Masyarakat a. Usaha Pertanian dan Pangan 1) pembinaan dan pengembangan usaha pertanian, agribisnis, dan Lumbung Pangan (a) identifikasi data pertanian (b) fasilitasi (c) monitoring dan evaluasi b. Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam 1) pelaksanaan peningkatan kerja sama dan permodalan usaha perkreditan, dan simpan pinjam (a) inventarisasi lembaga keuangan mikro yang belum berbadan hukum (b) inventarisasi dan pemetaan potensi Kelurahan (c) fasilitasi pembinaan, pendampingan, dan pengawasan (d) monitoring dan evaluasi 2) pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha perkreditan dan simpan pinjam (a) fasilitasi pembinaan, pendampingan, dan pengawasan (b) monitoring dan evaluasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		c. Produksi dan Pemasaran 1) pelaksanaan pengembangan informasi pasar (a) identifikasi produk unggulan Kelurahan (b) fasilitasi (c) monitoring dan evaluasi 2) pelaksanaan diversifikasi pasar (a) fasilitasi pengelolaan pasar (b) fasilitasi sarana dan prasarana (c) sistem penilaian kinerja pasar (d) monitoring dan evaluasi (e) data pasar desa d. Usaha Ekonomi dan Keluarga 1) pelaksanaan peningkatan kewirausahaan (a) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi keluarga (b) monitoring dan evaluasi 2) pelaksanaan pengembangan usaha jasa (a) penyusunan Modul (b) fasilitasi (c) monitoring dan evaluasi e. Ekonomi Kelurahan 1) ekonomi Kelurahan (a) identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		(b) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan (c) monitoring dan evaluasi				
13	263	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		KEBIJAKAN 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyusunan kebijakan 3 Perumusan kebijakan 4 Masukan dan dukungan kebijakan 5 Penetapan NSPK PENGARUSUTAMAAN GENDER EKONOMI, POLITIK SOSIAL DAN HUKUM				
		A. Data gender	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan apapun.	Unit pengolah terkait
		B. Advokasi dan fasilitasi 1. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 2. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 3. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender 4. Pembinaan Organisasi Perempuan	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		C. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan gender	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		PERLINDUNGAN PEREMPUAN (KEKERASAN, MASALAH SOSIAL, TENAGA KERJA, KORBAN PERDAGANGAN)				
		A. Data perlindungan perempuan	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
		B. Advokasi dan fasilitasi	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		C. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		D. Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		E. Analisis dan penyajian informasi gender	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		F. Edukasi dan publikasi tentang perlindungan perempuan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		PERLINDUNGAN ANAK (HAK SIPIL, MASALAH SOSIAL, KEKERASAN TERHADAP ANAK, ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		A. Data perlindungan anak	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait
		B. Advokasi dan fasilitasi	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait
		C. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		D. Edukasi dan publikasi tentang perlindungan anak	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		TUMBUH KEMBANG ANAK (PENDIDIKAN, KESEHATAN, PARTISIPASI, LINGKUNGAN DAN PENANAMAN NILAI-NILAI LUHUR, PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK)				
		A. Data tumbuh kembang anak	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		B. Advokasi dan fasilitasi	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		C. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
14	331.1	POLISI PAMONG PRAJA				
		Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat				
		a. Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan				
		2) standarisasi sarana prasarana polisi pamong praaja				
		(a) fasilitasi				
		(b) koordinasi				
		(c) pembinaan dan pengawasan				
		(d) monitoring dan evaluasi				
		b. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praaja				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan evaluasi peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja				
		c. Perlindungan Masyarakat 1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan masyarakat 2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan aparatur dan kelembagaan perlindungan masyarakat	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		d. penyidik pegawai negeri sipil 1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan operasional penyidik pegawai negeri sipil 2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan, serta monitoring, dan evaluasi pembinaan dan evaluasi administrasi aparatur penyidik pegawai negeri sipil e. Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia	Rahasia/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau keteriban umum	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan supervisi hak asasi manusia				
15	360	BENCANA KEBIJAKAN Kebijakan pencarian dan pertolongan meliputi kebijakan di bidang potensi dan operasi pencarian dan pertolongan 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK POTENSI Pencarian dan Pertolongan A. Sarana dan Prasarana 1 Rencana dan Standardisasi a Perencanaan dan analisa kebutuhan - Kajian Kebutuhan Peralatan - Spesifikasi Rencana Peralatan yang dibutuhkan b Standardisasi, dan inventarisasi - Standardisasi Peralatan - Daftar Inventarisasi Peralatan 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Peralatan Pencarian dan pertolongan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Manual Book - Jadwal Pemeliharaan - Laporan 3 Pengawakan dan perbekalan a Pengawakan - Awak sarana Pencarian dan Pertolongan - Kebutuhan awak sarana Pencarian dan Pertolongan - Bahan pembinaan awak b Perbekalan - Perbekalan dalam menunjang kegiatan operasi dan pembinaan potensi Pencarian dan Pertolongan - Daftar perbekalan - Inventarisasi sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan - Bahan pelaksanaan pembinaan inventarisasi sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan				
		B. Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan 1 Rencana Pendidikan dan Pelatihan a Kurikulum dan Silabus b Evaluasi dan Monitoring 2 Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		- a Penyiapan Tenaga Pencarian dan Pertolongan - Pengolahan Data Tenaga - b Penyiapan Potensi Pencarian dan Pertolongan - Pengolahan Data Potensi 3 Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan - a Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan) - b Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan		(5)	(6)	(7)
		OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN A. Operasi dan Latihan 1 Perencanaan dan Standardisasi - a Perencanaan dan Evaluasi - b Standardisasi Operasi dan Latihan SAR 2 Penyelenggaraan Operasi SAR - a Pengerahan Potensi SAR - b Pengendalian Operasi SAR - c Evaluasi Operasi 3 Siaga dan Latihan - a Siaga - Laporan harian - Laporan bulanan - Laporan tahunan - Evaluasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- b Latihan - Lokal B. Komunikasi 1 Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi - a Perencanaan dan Pengembangan Sistem Komunikasi - Analisa Kebutuhan - b Standardisasi dan Evaluasi 2 Operasi Komunikasi - a Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR) - b Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR) 3 Inventarisasi dan Pemeliharaan - a Inventarisasi Perangkat Komunikasi - b Pemeliharaan Peralatan Komunikasi C. Data dan Informasi 1 Pengembangan Sistem Informasi - a Perangkat Lunak - b Perangkat Keras 2 Pelayanan Informasi - a Penyajian dan pelayanan Data Informasi - b Laporan dan Pembuatan Dokumentasi (Data Base)				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	370	PENANGGULANGAN BENCANA KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA Meliputi kebijakan dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Logistik dan Peralatan meliputi: 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN A. Pengurangan Resiko Bencana 1) Pencegahan a) Pengkajian Resiko b) Pengelolaan Resiko 2) Mitigasi a) Mitigasi Struktur b) Mitigasi Non Struktur B. Pemberdayaan Masyarakat 1) Peran Lembaga Usaha a) Usaha Padat Modal b) Usaha Padat Karya 2) Peran Organisasi Sosial Masyarakat 3) Peran Masyarakat a) Peningkatan Kesadaran Masyarakat b) Peningkatan Ketahanan Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		C. Kesiapsiagaan 1) Pemantauan dan Peringatan Peringatan Dini 2) Perencanaan Siaga a) Kebutuhan dan Potensi Sumber Daya b) Penerapan Rencana Strategis 3) Penyiapan Sumber Daya a) Penyediaan dan Penyiapan Sumber Daya b) Pengendalian				
		PENANGANAN DARURAT A. Tanggap Darurat 1) Perencanaan Darurat a) Pendataan Darurat b) Perencanaan Operasi 2) Pengendalian Operasi a) Pengorganisasian Pos Komando b) Sarana dan Prasarana Pos Komando 3) Penyelamatan dan Evakuasi a) Penyelamatan b) Evakuasi B. Bantuan Darurat 1) Bantuan Sandang Pangan a) Bantuan Sandang b) Bantuan Pangan 2) Bantuan Kesehatan dan Air Bersih a) Bantuan Kesehatan b) Bantuan Air Bersih	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3) Bantuan Hunian Sementara a) Pembangunan Hunian Sementara b) Pendukung Hunian Sementara C. Perbaikan Darurat 1) Pembersihan Lingkungan a) Penyiapan Peralatan b) Angkutan 2) Perbaikan Sarana Vital a) Prasarana Sosial b) Prasarana Ekonomi 3) Pemantauan dan Pelaporan a) Pemantauan b) Pelaporan				
		REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI A. Penilaian Kerusakan 1) Inventarisasi Kerusakan a) Inventarisasi Fisik b) Inventarisasi Sosial Ekonomi 2) Estimasi Pembiayaan a) Estimasi Pembiayaan Pembangunan b) Estimasi Pembiayaan Sosial Ekonomi B. Pemulihan dan Peningkatan Fisik 1) Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Umum a) Rehabilitasi Fasilitas Umum b) Rekonstruksi Fasilitas Umum 2) Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Sosial a) Rehabilitasi Fasilitas Sosial b) Rekonstruksi Fasilitas Sosial	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3) Rehabilitasi Rekonstruksi Perumahan a) Rehabilitasi Rekonstruksi Berat b) Rehabilitasi Rekonstruksi Ringan C. Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi 1) Pemulihan dan Peningkatan Sosial a) Pemulihan dan Peningkatan Sosial Budaya b) Pemulihan dan Peningkatan Kesehatan 2) Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi a) Pemulihan Ekonomi b) Peningkatan Ekonomi D. Penanganan Pengungsi 1) Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi a) Perlindungan Pengungsi b) Pemberdayaan Pengungsi 2) Kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi a) Kompensasi b) Pengembalian hak 3) Penempatan Pengungsi a) Pemulangan b) Relokasi/Pengalihan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		LOGISTIK DAN PERALATAN A. Logistik 1) Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan a) Analisis Kebutuhan b) Pengadaan 2) Penyimpanan dan Distribusi a) Penyimpanan b) Distribusi B. Peralatan 1) Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan a) Analisis Kebutuhan b) Pengadaan 2) Penyimpanan dan Pemeliharaan a) Penyimpanan b) Pemeliharaan 3) Pengerahan dan Distribusi a) Pengerahan b) Distribusi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
17	370	KECELAKAAN / SAR KEBIJAKAN Kebijakan pencarian dan pertolongan meliputi kebijakan di bidang potensi dan operasi pencarian dan pertolongan 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		5 Penetapan dalam bentuk NSPK				
		POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN				
		A. Sarana dan Prasarana				
		1 Rencana dan Standarisasi				
		a Perencanaan dan analisa kebutuhan				
		- Kajian Kebutuhan Peralatan				
		- Spesifikasi Rencana Peralatan yang dibutuhkan				
		b Standardisasi, dan inventarisasi				
		- Standardisasi Peralatan				
		- Daftar Inventarisasi Peralatan				
		2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Peralatan Pencarian dan pertolongan				
		- Manual Book				
		- Jadwal Pemeliharaan				
		- Laporan				
		3 Pengawakan dan perbekalan				
		a Pengawakan				
		- Awak sarana Pencarian dan Pertolongan				
		- Kebutuhan awak sarana Pencarian dan Pertolongan				
		- Bahan pembinaan awak				
		b Perbekalan				
		- Perbekalan dalam menunjang kegiatan operasi dan pembinaan potensi Pencarian dan Pertolongan				
		- Daftar perbekalan				
			Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Inventarisasi sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan - Bahan pelaksanaan pembinaan inventarisasi sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan				
		B. Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan 1 Rencana Pendidikan dan Pelatihan - a Kurikulum dan Silabus - b Evaluasi dan Monitoring 2 Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan - a Penyiapan Tenaga Pencarian dan Pertolongan - Pengolahan Data Tenaga - b Penyiapan Potensi Pencarian dan Pertolongan - Pengolahan Data Potensi 3 Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan - a Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan) - b Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN				
		A. Operasi dan Latihan				
		1 Perencanaan dan Standardisasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		a Perencanaan dan Evaluasi				
		b Standardisasi Operasi dan Latihan SAR				
		2 Penyelenggaraan Operasi SAR	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		a Pengerahan Potensi SAR				
		b Pengendalian Operasi SAR				
		c Evaluasi Operasi				
		3 Siaga dan Latihan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		a Siaga				
		- Laporan harian				
		- Laporan bulanan				
		- Laporan tahunan				
		- Evaluasi				
		b Latihan				
		- Lokal				
		B. Komunikasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		1 Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi				
		a Perencanaan dan Pengembangan Sistem Komunikasi				
		- Analisa Kebutuhan				
		b Standardisasi dan Evaluasi				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2 Operasi Komunikasi a Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR) b Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR) 3 Inventarisasi dan Pemeliharaan a Inventarisasi Perangkat Komunikasi b Pemeliharaan Peralatan Komunikasi C. Data dan Informasi 1 Pengembangan Sistem Informasi a Perangkat Lunak b Perangkat Keras 2 Pelayanan Informasi a Penyajian dan pelayanan Data Informasi b Laporan dan Pembuatan Dokumentasi (Data Base)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
18	420	PENDIDIKAN KEBIJAKAN BERSIFAT PENGATURAN Meliputi kurikulum, pendidikan anak usia dini, non formal dan informal, pendidikan dasar. 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan bahan 3 Perumusan kebijakan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

6

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		6 Perumusan dan penerapan standar MoU (<i>Memorandum of Understanding</i>)				
		KEBIJAKAN BERSIFAT PENETAPAN	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		1 Pengkajian dan pengusulan penetapan 2 Penyiapan bahan 3 Perumusan penetapan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan penetapan 5 Penetapan dalam bentuk keputusan				
		PEMBINAAN PENDIDIKAN				
		Pendidikan anak usia dini, non formal dan informal	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		1 PAUD a Bahan ajar - Alat permainan edukatif b Pelatihan c <i>Block Grant</i> d Sosialisasi e Peringatan hari anak nasional				
		2 Pendidikan masyarakat a Penyelenggaraan program - Bahan ajar - Penyusunan majalah b Pemberian bantuan sosial - Penilaian proposal - Pemberian bansos	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		c Pembinaan program - Temu koordinasi - Bintek program/pendampingan - Peningkatan kapasitas kelembagaan d Lomba, penghargaan, dan anugerah e Peringatan hari anak internasional f Pameran/publikasi/sosialisasi				
	3	Kursus dan pelatihan - a Penyelenggaraan program - Uji kompetensi (akreditasi) - Penilaian dan penetapan kinerja lembaga kursus dan pelatihan (LKP) - Pendataan lembaga kursus dan pelatihan - Penguatan kerja sama dengan lembaga/mitra - b Pemberian bantuan sosial - c Pembinaan program: bintek, orientasi teknis, dan temu karya - d Standar kursus dan pelatihan - Kurikulum - Bahan ajar - e Lomba lembaga kursus berprestasi - f Publikasi dan promosi kursus - g Rekomendasi Sertifikasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		4 Pendidik dan tenaga pendidikan a Bahan ajar b <i>Block grant</i> c Sosialisasi (modul) d Data pendidik dan tenaga pendidik	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		Pendidikan dasar 1 Sekolah dasar a Kurikulum b Bahan ajar c Pelatihan d <i>Block grant</i> e Bimbingan teknis/sosialisasi f Lomba, sayembara, dan festival g Bantuan operasional sekolah [BOS] h Bantuan siswa miskin	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		2 Sekolah menengah pertama a Kurikulum b Bahan ajar c Pelatihan d <i>Block grant</i> e Bimbingan teknis/sosialisasi f Lomba. sayembara. dan festival g Bantuan operasional sekolah [BOS] h Bantuan siswa miskin	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	3	Pendidik dan tenaga pendidik a Pendataan dan pemetaan b Pembinaan guru dan tenaga pendidik c Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik (standar, uji, dan sertifikasi d Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru, dan pengawas sekolah e Penghargaan guru dan tenaga kependidikan Tingkat Nasional f Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan g <i>Block grant</i> h Bimbingan teknis/sosialisasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		Pendidik dan tenaga kependidikan meliputi Perencanaan Pengadaan, Karir dan Kualifikasi				
		KURIKULUM Pembinaan kurikulum Hasil evaluasi penyusunan kurikulum	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PENILAIAN PENDIDIKAN	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait
		Penilaian akademik				
		Penilaian non akademik				
		Analisis dan sistem informasi penilaian				
		PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN				
		Pengembangan profesi pendidik				
		1 Peningkatan kompetensi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		1) Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal				
		2) Pengembangan profesi pendidikan dasar				
		2 Sertifikasi				
		1) Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal				
		2) Pengembangan profesi pendidikan dasar				
		Pengembangan tenaga kependidikan				
		1 Program	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		1) Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik				
		2) Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai				

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		2 Evaluasi 1) Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik 2) Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		Penyusunan materi/SOP/instrumen/panduan/pedoman Proposal/TOR/KAK Penyelenggaraan pelatihan/diseminasi/sosialisasi Penyelenggaraan bimtek/monitoring dan evaluasi Lomba/sayembara/festival/olimpiade pendidikan nasional internasional TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film 1 Perancangan dan produksi 2 Penyiaran dan pengendalian Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis multimedia dan web 1 Perancangan dan produksi 2 Aplikasi dan pengendalian Pengembangan jejaring	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1 Pengkajian dan perancangan 2 Pemeliharaan dan pengendalian DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN Data peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan 1 Validasi dan integrasi data peserta didik 2 Validasi dan integrasi data peserta pendidik dan tenaga kependidikan Data satuan pendidikan dan proses pembelajaran 1 Validasi dan integrasi data satuan pendidikan 2 Validasi dan integrasi data proses pembelajaran Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik 1 Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik anak 2 Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dasar dan menengah 3 Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan tinggi Monitoring dan Evaluasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
19	426	KEOLAHRAAGAN KEBIJAKAN Kebijakan Pemuda dan Olah Raga meliputi kebijakan 1 Pengkajian dan pengusunan kebijakan 2 Penyusunan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam 5 Penetapan dalam bentuk NSPK	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		PEMBERDAYAAN PEMUDA		(5)	(6)	(7)
		1 Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda a Penelusuran (Duta Kepemudaan) 1) Potensi Lokal (Provinsi) 2) Potensi Nasional 3) Potensi Internasional b Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan) 1) Potensi Lokal (Provinsi) 2) Potensi Nasional 3) Potensi Internasional c Pengembangan 1) Potensi Nasional 2) Potensi Internasional (Pertukaran)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah
		2 Peningkatan Wawasan Pemuda a Wawasan Kebangsaan 1) Program 2) Evaluasi b Wawasan Lingkungan 1) Program 2) Evaluasi c Wawasan Sosial dan Hukum 1) Program 2) Evaluasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3 Peningkatan Kapasitas Pemuda a Kapasitas Imam dan Taqwa 1) Program 2) Evaluasi b Kapasitas IPTEK 1) Program 2) Evaluasi c Pemanfaatan IPTEK 1) Program 2) Evaluasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan
		4 Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreatifitas) a Pengkajian 1) Program 2) Evaluasi b Pengembangan 1) Program 2) Evaluasi c Pendayagunaan (fasilitasi) 1) Program 2) Evaluasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan
		PENGEMBANGAN PEMUDA				
		1 Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda a Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan 1) Program 2) Evaluasi b Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1) Program 2) Evaluasi				
		2 Kewirausahaan a Kelembagaan 1) Program 2) Evaluasi b Pengkaderan 1) Program 2) Evaluasi c Perintisan 1) Program 2) Evaluasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah
		3 Organisasi Kepemudaan Dan Pengawasan Kepramukaan a Organisasi Kepemudaan 1) Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : - Program - Evaluasi 2) Pemberdayaan Organisasi - Program - Evaluasi 3) Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya - Program - Evaluasi b Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya 1) Pengkajian 2) Pengembangan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		4 Kemitraan dan Penghargaan Pemuda a Kemitraan 1) Lintas Sektoral 2) Daerah b Penghargaan Pemuda 1) Penghargaan Peghargaan Kepemudaan 2) Pengembangan Promosi Kepemudaan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		PEMBUDAYAAN OLAHRAGA				
		1 Pengelolaan Olahraga Pendidikan a Olahraga Pendidikan Dasar 1) Pengembangan 2) Evaluasi b Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal 1) Pengembangan 2) Evaluasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		2 Pengelolaan olahraga Rekreasi a Olahraga Massal 1) Pengembangan 2) Evaluasi b Olahraga Tradisional 1) Pengembangan 2) Evaluasi c Olahraga Petualangan, Tantangan dan wisata 1) Pengembangan 2) Evaluasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

6

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		3 Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga - a Sentra Olahraga 1) Olahraga Pendidikan - Pengembangan - Evaluasi 2) Olahraga rekreasi - Pengembangan - Evaluasi 3) Olahraga Prestasi - Pengembangan - Evaluasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		4 Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus - a Olahraga Tradisional 1) Lokal 2) Nasional - b Layanan Khusus 1) Olahraga Usia Dini dan Lansia 2) Olahraga Penyandang Cacat	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		5 Kemitraan dan Penghargaan Olahraga - a Kemitraan Keolahragaan 1) Lintas Sektoral 2) Daerah 3) Luar Negeri - b Penghargaan Olahraga tingkat nasional/ internasional 1) Penelusuran 2) Penyelenggaraan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA				
		1 Pembibitan dan IPTEK Olahraga a Pembibitan Olahraga 1) Pemandu Bakat - Penelusuran Bakat - Penelaahan Bakat 2) Pengembangan Olahragawan Berbakat - Program - Evaluasi b IPTEK Olahraga 1) Penerapan - Identifikasi dan Kajian - Pedayagunaan - Evaluasi dan Diseminasi 2) Pengembangan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		2 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan a Organisasi Keolahragaan 1) Pendidikan dan Rekreasi 2) Olahraga Prestasi - Kelembagaan - Sumberdaya 3) Olahraga Fungsional dan Profesional Industri dan Promosi Olahraga a Industri Olahraga 1) Jasa Olahraga 2) Produk Olahraga 3) Manajemen Industri Olahraga	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		3 Industri dan Promosi Olahraga a Industri Olahraga 1) Jasa Olahraga 2) Produk Olahraga 3) Manajemen Industri Olahraga	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		b Promosi Olahraga 1) Penelusuran 2) Penyelenggaraan				
		4 Olahraga Prestasi a Daerah 1) Pengembangan 2) Pekan dan Kejuaraan Olahraga	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
20	430	KEBUDAYAAN Pelestarian cagar budaya 1) Registrasi nasional a) Pendaftaran dan penetapan b) Pengelolaan data 2) Pelindungan a) Perizinan dan pengamanan b) Pemeliharaan dan pemugaran 3) Pengembangan dan pemanfaatan a) Pengembangan b) Pemanfaatan 4) Eksplorasi dan dokumentasi a) Eksplorasi cagar budaya b) Dokumentasi cagar budaya dan koleksi museum Pembinaan kesenian 1) Pembinaan seni pertunjukan a) Seni pertunjukan tradisional b) Seni pertunjukan nontradisional 2) Pembinaan seni rupa a) Seni rupa murni	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		b) Seni rupa terapan 3) Pembinaan literasi a) Literasi b) Apresiasi 4) Dokumentasi dan publikasi a) Dokumentasi seni b) Publikasi seni				
		Pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi 1) Kelembagaan dan kepercayaan a) Pemberdayaan lembaga b) Hubungan antar lembaga 2) Komunitas kepercayaan a) Komunitas adat b) Upacara adat 3) Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional a) Pengetahuan tradisional b) Ekspresi budaya tradisional 4) Lingkungan budaya dan pranata sosial a) Lingkungan budaya b) Pranata sosial	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		Sejarah dan nilai budaya 1) Sejarah a) Penggalan sumber sejarah b) Penulisan sejarah 2) Pemetaan nilai a) Pemetaan b) Klasifikasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

6

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3) Verifikasi dan perumusan nilai a) Verifikasi nilai b) Perumusan nilai 4) Dokumentasi dan publikasi a) Dokumentasi sejarah dan nilai budaya b) Publikasi sejarah dan nilai budaya				
		Internalisasi nilai dan diplomasi budaya 1) Internalisasi nilai budaya a) Pengemasan nilai budaya b) Penanaman nilai budaya 2) Kekayaan budaya a) Pencatatan kekayaan budaya b) Penetapan kekayaan budaya 3) Warisan budaya nasional a) Warisan budaya benda b) Warisan budaya takbenda	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		Arkeologi Program dan kerja sama penelitian 1) Program 2) Kerjasama Data dan informasi penelitian 1) Data 2) Informasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		Monitoring dan Evaluasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21	440	KESEHATAN				
		PERUMUSAN KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Bina Upaya Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan: 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan bahan 3 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 4 Pengumpulan dan pengolahan data 5 Penetapan dalam bentuk NPSK dan standarisasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		UPAYA KESEHATAN				
		1 Upaya Kesehatan Dasar a Pelayanan Kedokteran Keluarga b Praktik Klinis Bagi Dokter di Fanyaskes Primer c Pelaksanaan Kesehatan Primer d Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas e Kesehatan Gigi dan Mulut di Rumah Sakit f ICD 10, Destistry & Stomatology g Infeksi Menular Lewat Tranfusi Darah h Penyakit Mulut di Tingkat Primer i Pembiayaan Darah j Penggunaan Darah Rasional k Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Darah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

f

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1 Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, sangat terpencil dan kepulauan m Akreditasi Puskesmas n Puskesmas Berprestasi 2 Upaya Kesehatan Rujukan a Pelayanan Kesehatan Rujukan 1) Rumah Sakit Pratama 2) Rumah Sakit Publik 3) Rumah Sakit Privat 4) Rumah Sakit Khusus b Pelayanan Kedokteran dan Organisasi Profesi c Pelayanan Rumah Sakit Privat 1) Akses Pelayanan SPGDT Call 119 2) Akses Pelayanan Rekayasa Jaringan dan Sel Punca 3) Pelayanan Geriatri d Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Khusus 1) Rumah Sakit Rujukan Regional Jejaring Pelayanan Kanker 2) Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Rumha Sakit Rujukan Regional 3) Pencegahan <i>Froud</i> di Rumah Sakit e Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan 1) Keselamatan Pasien di Rumah Sakit	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) Pelayanan Jantung dan Pembuluh Darah di Rumah Sakit 3) Pelayanan Penyakit Ginjal 4) Pelayanan HIV/AIDS 5) Pelayanan Tim Reproduksi Berbantu di Rumah Sakit 6) Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi (PPDSBK) f Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan 1) Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan g Badan Pengawas di Rumah Sakit h Perizinan dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas B 1) Usulan Penetapan atau Peningkatan Kelas dari Pemilik RS atau Pimpinan Badan Hukum Rumah Sakit 2) Rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi 3) Profil dan data Rumah Sakit 3 (tiga) Tahun Terakhir 4) <i>Self Instrumen Assesment</i> sesuai dengan kelas yang diajukan 5) Keputusan Penetapan Kelas (Jika peningkatan kelas) 6) Sertifikat Lulus Akreditasi (Jika Peningkatan Kelas)				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		i Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lain 1) Akreditasi Rumah Sakit dengan Standar Nasional 2) Rumah Sakit Pasca Akreditasi Nasional 3) <i>Surveyor</i> Akreditasi Rumah Sakit				
		3 Keperawatan dan Keteknisian Medik a Pelayanan Keperawatan Dasar b Pelayanan Keperawatan Profesional di Rumah Sakit c Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum d Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus e Bina Pelayanan Kebidanan f Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterampilan Fisik	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		4 Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan a Mikrobiologi dan Imunologi 1) Laboratorium Kesehatan 2) Laboratorium Klinik 3) Laboratorium Puskesmas 4) Laboratorium Mikrobiologi Kultur	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		b Radiologi 1) Pelayanan Radiologi 2) Dosis Radiasi Nasional 3) Radiologi dan Radioterapi 4) Radioterapi di Rumah Sakit f Radiologi Diagnostik c Pengajaran Perijinan dan Sertifikasi 1) Perijinan Pelayanan Radiologi 2) Sertifikasi Peningkatan Kapabilitas d Sarana dan Prasarana Kesehatan 1) Prasarana Bangunan Rumah Sakit Kelas B 2) Prasarana Bangunan Rumah Sakit Kelas C 3) Prasarana Ruang Gawat Darurat 4) Prasarana Ruang Operasi 5) Prasarana Ruang Perawatan Intensif 6) Prasarana Ruang Rawat Inap 7) Prasarana Ruang Rehabilitasi Medik 8) Prasarana Ruang Instalasi Sterilisasi Sentral (CSSD) 9) Prasarana Ruang Yang Aman dalam Situasi dalam Situasi Darurat Dan 10) Prasarana Instalasi Penyediaan Air Bersih untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		11) Prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah pada Fasilitas Pelayanan 12) Prasarana Rumah Sakit Keselamatan Jiwa 13) Prasarana Rumah Sakit Sistem Instalasi Gas Medik Dan Vakum Medik 14) Prasarana Rumah Sakit Sistem Instalasi Tata Udara 15) Prasarana Rumah Sakit Sistem Proteksi Kebakaran Aktif e Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1) Kalibrasi BPFK/LPFK/UPFK 2) Kalibrasi Rumah Sakit 3) Kalibrasi Puskesmas 4) Pemeliharaan Peralatan kesehatan Rumah Sakit 5) Pemeliharaan Peralatan kesehatan Puskesmas f Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK) 1) ASPAK Rumah Sakit 2) ASPAK Puskesmas 3) ASPAK Dinas Kesehatan Kota				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		5 Kesehatan Jiwa a Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1) Kesehatan Jiwa di Desa Siaga 2) Kegawatdaruratan Psikiatrik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 3) Promosi Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer b Etikolegal dan Asesmen 1) Penanggulangan Penelantaran dan Pemasungan Serta Penanganan Salah Lainnya Terhadap Orang Dengan Penderita Gangguan Jiwa 2) Visum Et Repertum c Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif, Rokok, dan Alkohol 1) Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) 2) Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gangguan Penggunaan Alkohol 3) Wajib Lapoꝛ Pecandu Narkotika 4) Pencegahan Masalah Akibat Penggunaan Tembakau 5) Rehabilitasi Medis terkait Hukum	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta pemegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		d Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko 1) Kesehatan Jiwa Di Sekolah 2) Kesehatan Jiwa dan Dukungan Psikososial Penanggulangan Bencana 3) laporan data Autisme 4) Kesehatan Jiwa Pada Kelompok Berisiko 5) Psikologi Awal (PFA) Bagi Petugas Siaga Bencana				
		PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN				
		1 Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra a Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa (KLB) 1) Difteri 2) Polio 3) Penyelenggaraan Kegiatan Survei Pre TAS filariasis 4) Surveilans influenza 5) Keracunan Pangan b Imunisasi 1) Pekan Imunisasi Nasional 2) Coldchain Bagi Petugas Imunisasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3) Introduksi imunisasi DPT-HB-HIB (Pentavalen) pada bayi dan Balita 4) Imunisasi bagi Petugas Kesehatan 5) Imunisasi TT bagi wanita usia subur(WUS) 6) Imunisasi bagi masyarakat umum 7) Vaksin dan serum program imunisasi, Pencanangan vaksin baru DPT-HIB-Hib 8) Imunisasi Campak, Polio, Difteri, TT, DPT, Pertusis, Tetanus dan HIB B/ Haemophilis Influenza tipe B c Kesehatan Matra 1) Mudik Sehat 2) Penanggulangan Kesehatan akibat gangguan Kamtibmas				
		2 Pengendalian Penyakit Menular Langsung a Pengendalian Tuberkulosis 1) Pengendalian Penyakit TB 2) TB Multi Drug Resistance, TB, DOTS, WARSOR TB, TB Anak, TB HIV, Keperawatan TB. 3) Laboratorium TB b Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual 1) <i>Human Immuno Deficiency Virus</i> (HIV) 2) Infeksi Menular Seksual (IMS), Perawatan, 3) reagen tes HIV	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		c Pengendalian Infeksi Pengendalian Saluran Pernafasan Akut 1) Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) d Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan 1) Diare 2) Tifoid 3) Hepatitis e Pengendalian Kusta dan Frambusia 1) Kusta 2) Frambusia				
3		Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang a Pengendalian Malaria 1) Kelambu berinsektisida (LLINs) 2) Eliminasi malaria 3) Crosschequer mikroskopis malaria b Pengendalian Arbovirolosi 1) DBD 2) Chikungunya c Pengendalian Zoonosis 1) Penyakit flu burung 2) Vaksin Anti Rabies (VAR) baru 3) Penyakit Pes 4) Penyakit flu baru Hemagglutinin tipe 1 dan Neuraminidase tipe 1 (H.1.N.1) d Pengendalian Filariasis dan Kecacingan 1) Filariasis 2) Kecacingan 3) Schistosomiasis	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		e Pengendalian Vektor				
		4 Pengendalian Penyakit Tidak Menular				
		a Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		1) Penyakit Jantung				
		2) Penyakit Pembuluh darah				
		3) Penyakit Hipertensi				
		4) Penyakit Stroke				
		b Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik				
		1) Penyakit Diabetes Mellitus				
		2) Penyakit gangguan Metabolik				
		3) Penyakit gangguan Tiroid				
		4) Gangguan Obesitas				
		c Pengendalian Penyakit Kanker				
		d Pengendalian Penyakit Kronis dan Generatif				
		1) Penyakit Akibat produk tembakau				
		2) Asma, Lupus, Thalassemia				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		e Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan 1) Pengendalian Cidera 2) Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas 3) Penanganan Kesehatan akibat Tindak Kekerasan				
		5 Penyehatan Lingkungan a Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar 1) Pengawasan Kualitas Air Minum 2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat b Penyehatan Pemukiman dan Tempat-Tempat Umum 1) Higiene sanitasi dan Bangunan Umum 2) Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan 3) Pengendalian faktor resiko di rumah dan tempat umum c Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat 1) Penanggulangan kedaruratan bidang Kesehatan Lingkungan 2) Pasar Sehat dan Kota Sehat 3) Penyehatan kawasan dan sanitasi dasar	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		d Higiene Sanitasi Pangan 1) Makanan Jajanan 2) Restoran / Rumah Makan 3) Jasa Boga 4) Depot Air Minum e Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi 1) Medis Fasyankes 2) Limbah Medis (Free Mercury) 3) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)		(5)	(6)	(7)
		6 Pengembangan dan Penapisan Teknologi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan a Pengembangan Teknologi dan Laboratorium 1) Laboratorium Pengendali Penyakit 2) Laboratorium Kesehatan Lingkungan 3) Model dan Teknologi Tepat Guna 4) Uji kendali mutu dan kalibrasi 5) Pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan pada instalasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		7 Sertifikasi Sanitasi Kesehatan dan Pengujian Kesehatan a Sertifikat 1) Sertifikat Air Bersih 2) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan 4) Rekomendasi hasil uji laboratorium rujukan				
		GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK				
		1 Gizi a Gizi Makro 1) Gerakan Nasional Sadar Gizi dalam rangka percepatan perbaikan gizi (1000 2) Pemantauan Pertumbuhan Anak (posyandu) b Gizi Mikro 1) Upaya penanggulangan masalah gizi mikro (GAKI (Gangguan Akibat Kekurangan Iodium), KVA (Kekurangan 2) Manajemen Taburia 3) Upaya penanggulangan masalah gizi mikro lainnya c Gizi Klinik dan Dietetik 1) Pelayanan Gizi di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Instansi 2) Tatalaksana Anak Gizi Buruk 3) Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Lebih d Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan 1) Makanan Pendamping ASI	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) ASI Eksklusif 3) Pedoman Gizi Seimbang 4) Makanan Bayi dan Anak 5) Makanan Tambahan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis dan Balita Gizi Kurang 6) Makanan Tambahan Anak Sekolah e Kewaspadaan Gizi 1) Surveilans Gizi 2) Epidemiologi Kasus Gizi Buruk 3) Penanganan Bidang Gizi dalam Situasi Bencana 4) Jejaring Informasi Pangan dan Gizi				
		2 Kesehatan Ibu a Kesehatan Ibu Hamil 1) Pelayanan Antenatal Terpadu 2) Pelayanan Kelas Ibu Hamil 3) Pencegahan Penularan HIV AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA) b Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas 1) Kemitraan Bidan dan Dukun 2) Supervisi Fasilitatif c Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi 1) Audit Maternal Perinatal 2) Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)/Pemberdayaan Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3) Tanda Bahaya pada Kehamilan 4) Surveilans Kematian Ibu d Keluarga Berencana 1) Pelayanan KB Pasca Persalinan 2) Pelatihan KB Pasca Persalinan e Perlindungan Kesehatan Reproduksi 1) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT) 2) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana (Paket Pelayanan Awal 3) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan 4) Pengarus Utamaan Gender Bidang Kesehatan (PUGBK)				
		3 Kesehatan Anak a Kelangsungan Hidup Bayi 1) Pelayanan Kesehatan Neonatal 2) Manajemen Asfeksia 3) Manajemen BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) 4) Pencegahan Infeksi b Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah 1) Pelatihan SDIDTK (Stimulasi Dini Interfensi Deteksi Tumbuh Kembang) 2) Rujukan Tumbuh Kembang	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO (1)	KODE KLASIFIKAS (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		3) Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Komputer (ICATT) c Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko 1) Screening Hypothroid Congenital 2) Surveillance Kesehatan Anak 3) Surveillance Kesehatan Bawaan d Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja 1) Tempat Penanganan Kesehatan Remaja di Rumah Sakit 2) Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja 3) Usaha Kesehatan Sekolah e Perlindungan Kesehatan Anak 1) Korban kekerasan terhadap anak 2) Anak dengan disabilitas 3) Anak terlantar/anak jalanan di panti 4) Anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas/Rutan		(5)	(6)	
	4	Kesehatan Tradisional Alternatif, dan Komplementer a Kesehatan Tradisional Keterampilan 1) Akupresure 2) Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional 3) Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan di Fasyankes 4) Pelayanan Tradisional Keterampilan Lainnya	Emasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO (1)	KODE KLASIFIKAS (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		b Kesehatan Tradisional Ramuan 1) Peningkatan Pemanfaatan Taman Cibat Keluarga (TOGA) 2) Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) 3) Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional 4) Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan di Fasyankes c Kesehatan Alternatif dan Komplementer 1) Akupunktur 2) Obat Herbal / Obat Tradisional 3) Integrasi Yankestrad 4) Pelayanan Alternatif Komplementer lainnya d Penapisan dan Kemitraan 1) Sentra Penerapan dan Pengembangan Pengobatan Tradisional (SP3T) 2) Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer 3) Kemitraan Pengobatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer 4) Pengobat Tradisional (lokal) 5) Asosiasi Pengobat Tradisional				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		5 Kesehatan Kerja dan Olahraga a Pelayanan Kesehatan Kerja 1) Penyakit Akibat Kerja 2) Pemeriksaan Kesehatan Pekerja 3) Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) b Kapasitas Kerja 1) Gerakan Pekerja Perencanaan Sehat Produktif 2) Kapasitas Kesehatan Kerja 3) TP ASI c Lingkungan Kerja 1) K3 Perkantoran 2) K3 Rumah Sakit 3) K3 Puskesmas 4) Biomonitoring Efek Kesehatan d Kemitraan Kesehatan Kerja 1) Pengembangan Jabfung Pembimbing Kesehatan Kerja 2) Integrasi Ros UKK 3) Kabupaten/Kota Percontohan e Kesehatan Perkotaan 1) Kawasan Kumuh dan Miskin Perkotaan 2) Forum Kota Hijau f Kesehatan Olahraga 1) Kebugaran Jasmani bagi Karyawan/Pekerja 2) Kebugaran Jasmani bagi Calon Jemaah Haji	Eksternal / Terbuka	Penggunaan internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3) Kebugaran Jasmani bagi Usia Sekolah 4) Olahraga bagi Ibu Hamil/Masa Nifas 5) Olahraga Bagi Usia Lanjut 6) Pelayanan Kesehatan Olahraga Masyarakat				
		KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN				
		1 Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan, Pengelolaan, Analisis, Pemantauan & Evaluasi) a Harga Obat 1) Harga Jual Obat Generik 2) Harga Jual Obat Generik Berdagang 3) Harga Eceran Tertinggi pada Label Obat b Pengadaan Obat 1) Obat <i>Eserisial</i> 2) Obat Pelayanan Kesehatan Dasar, Kabupaten Kota dan Nasional 3) Obat Program Malaria 4) Obat Program Kesehatan Anak 5) Obat Program Kesehatan Ibu 6) Obat Program Gizi 7) Obat Anti Tuberkulosis	Easa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		8) Obat Psikotropika Generik m Obat Anti Retro Viral c Perbekalan Kesehatan 1) Gudang Farmasi 2) Kelengkapan Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan 3) Pemusnahan Obat, Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan 4) Obat Buffer Stock 5) Hasil Stock Opname Obat				
		2 Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan a Alat Kesehatan 1) Alat Kesehatan 2) Kopendium Alat Kesehatan 3) Pelabelan Alat Kesehatan Dan PKRT b Produsen dan Distributor Alat Kesehatan dan Obat 1) Pedagang Eceran Obat 2) Penyalur Alat Kesehatan 3) Toko Alat Kesehatan 4) Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan c Produk Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) 1) Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		c Farmasi Komunitas 1) Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas 2) Kefarmasian di Rumah (Home Pharmacy Care) 3) Kefarmasian untuk Pasien Pediatri 4) Kefarmasian untuk Penyakit Malaria 5) Farmasi di Rumah Sakit d Penggunaan Obat Rasional 1) Obat Rasional 2) Informasi Obat 3) Kefarmasian untuk Terapi Antibiotik 4) Pemantauan Terapi Obat				
		4 Produksi dan Distribusi Kefarmasian a Obat Tradisional 1) Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 2) Usaha Jamu Gendong (UJG) 3) Usaha Jamu Racik (UJR) b Kosmetik dan Makanan 1) Keamanan Pangan 2) Makanan Jajanan Anak Sekolah c Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi dan Sediaan Farmasi Khusus 1) Narkotika dan Psikotropika 2) Prekursor Farmasi 3) Sediaan Farmasi Khusus 4) Persetujuan Impor dan Ekspor	Eiasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) PKRT Klas III				
		3) Penggunaan Pestisida Di Rumah Tangga				
		3 Kefarmasian (Standarisasi, klinis, komunitas dan Obat Tradisional)				
		a Pelayanan Kefarmasian				
		1) Visite untuk Apoteker				
		2) Tanggung Jawab Apoteker terhadap Keselamatan Pasien (Patient Safety)				
		3) Penulisan Resep				
		b Farmasi Klinik				
		1) Pharmaceutical Care untuk Penyakit Asma				
		2) Pharmaceutical Care untuk Penyakit Flu Burung				
		3) Pharmaceutical Care untuk Penyakit Hati				
		4) Pharmaceutical Care untuk Penyakit Diabetes Mellitus				
		5) Pharmaceutical Care untuk Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan				
		6) Pharmaceutical Care untuk Penyakit Tuberculosis				
		7) Pharmaceutical Care Lainnya				
		8) Dispensing Sediaan Steril				
			Eiasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		5) Pelaksanaan Perizinan Import dan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi d Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat 1) Indonesian Pharmaceutical Industry Directory				
		PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN				
		1 Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan a Pencegahan dan Mitigasi b Kesiapsiagaan				
		2 Tanggap Darurat dan Pemulihan a Tanggap Darurat b Pemulihan				
		3 Pemantauan dan Informasi a Pemantauan b Informasi				
		4 Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan				
		5 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana				
			Etiasa/ Terbuka	Pengguna	Apabila diketahui	Unit

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PENGEMBANGAN DAN JAMINAN KESEHATAN				
		1 Tersedianya data NHA Setiap Tahun	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		2 Tersedianya dokumen Teknis Penguatan Pelaksanaan JKN				
		INTELIGENSIA KESEHATAN				
		1 Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelligensia Kesehatan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		a Intelligensia Anak				
		b Intelligensia Remaja, Dewasa, dan Lanjut Usia				
		2 Penanggulangan Masalah Intelligensia Kesehatan				
		a Intelligensia Akibat Gangguan Bawaan				
		b Intelligensia Akibat Gangguan Degeneratif dan Sistem Persyarafan				
		KESEHATAN HAJI				
		1 Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		a Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji				
		b Pelayanan Kesehatan jamaah Haji				
		2 Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji				
		a Advokasi dan Kemitraan Pembinaan Kesehatan Haji				
		b Kesehatan Haji				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PROMOSI KESEHATAN				
		1 Sarana Promosi Kesehatan a Booklet b Poster c Leaflet d Pamflet e Lembar Balik f Selebaran g Buletin h Festival i Lomba j Pameran k Seminar l Iklan Layanan Masyarakat m Film n Radio Spot	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		2 Pembinaan Advokasi dan Kemitraan serta Pemberdayaan Peran a Saka Bhakti Husada b Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga c Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kesehatan d Kawasan Tanpa Rokok e Kerjasama dengan Swasta dibidang Kesehatan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		f Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan g Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor di Bidang Kesehatan h Peran Serta Kader PKK dan Dasawisma dalam Mendukung Kesehatan Ibu dan Anak				
		3 Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan a Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan b Kampanye Promosi Kesehatan c Video Animasi Promosi Kesehatan	Etiasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		4 Hari kesehatan a Hari Kesehatan Nasional b Hari-hari Besar Kesehatan	Etiasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA 1 Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi	Etiasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		DATA DAN INFORMASI 1 Statistik Kesehatan a Statistik Derajat dan Upaya Kesehatan b Statistik Lingkungan dan Sumber Daya Kesehatan 2 Analisis dan Diseminasi Informasi	Etiasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- a Analisis Data Kesehatan - b Diseminasi Informasi Kesehatan				
		3 Pengembangan Sistem Informasi - a Pengembangan Sistem Informasi - b Bank Data				
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN				
		1 Kebijakan - Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan meliputi Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA, Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen, dan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya meliputi: - a Pengkajian dan pengusulan kebijakan - b Penyiapan kebijakan - c Perumusan dan penyusunan bahan - d Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan - e Penetapan dalam bentuk NSPK	Ekasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		2 Pengawasan produk terapeutik dan narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat terlarang - a Pengawasan Distribusi Produk Terapeutik dan Perbekalan kesehatan 1) Inspeksi dan Sertifikasi Distribusi Produk Terapeutik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga a) Inspeksi Sarana Distribusi Produk Terapeutik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Ekasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Laporan hasil pemeriksaan dari BB/BPOM Laporan Kasus LaporanTindak Lanjut Inspeksi b) Penangulangan Produk Ilegal Surat Edaran Produk Ilegal Laporan Kasus 2a) Pengawasan promosi dan penandaan produk terpetik dan perbekalan a) Pengawasan promosi produk terpetik dan perbekalan kesehatan b) Pengawasan penandaan produk terpetik dan perbekalan kesehatan b Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat A 1a) Inspeksi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP) a) Laporan hasil pemeriksaan dan EAP NPP b) Tindak lanjut hasil pemeriksaan NPP c) Proceeding hasil pengawasan NPP 2a) Pengawasan produk tembakau (rokok) a) Hasil Pengawasan prdukt rokok, iklan dan promosi rokok b) Proceeding hasil pengawasan rokok				

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		3 Pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk a Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan 1) Persetujuan pendaftaran baru dan variasi OT dan suplemen kesehatan 2) Persetujuan pendaftaran ulang OT dan Suplemen Kesehatan 3) Survelan Keamanan Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik a) Surveilans keamanan obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik b) Surveilans keamanan kosmetik b Obat Asli Indonesia 1) Sosialisasi dan diseminasi pengembangan OAI	Eiasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		4 Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya a Penilaian Keamanan Pangan 1) Persetujuan pendaftaran pangan olahan 2) Pencabutan pendaftaran pangan olahan 3) <i>Master of control document</i> (Pencatatan NIE) 4) Variasi pendaftaran pangan olahan b Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan 1) Laporan hasil pemeriksaan sarana produksi distribusi	Eiasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) Laporan hasil pemeriksaan/pengujian produk/label pangan dan iklan 3) Tindak lanjut produk tidak memenuhi ketentuan (TMK) 4) Kasus Khusus terkait produk pangan 5) Laporan hasil audit verifikasi sarana produksi 6) Surat Persetujuan pencatuman label halal 7) Surat keterangan ekspor/impor 8) Sertifikasi hygiene sanitasi c Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan 1) Surveilans dan Penanggulangan Keamanan Pangan 2) Promosi Keamanan Pangan 3) Penyuluhan Makanan Siap Saji dan Industri Rumah Tangga d Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 1) Penyuluhan Bahan Berbahaya a) Penyuluhan Institusi dan Masyarakat b) Desiminasi Informasi				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22	460	SOSIAL				
		KEBIJAKAN Kebijakan bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiepan kebijakan 3 Perumusan kebijakan 4 Masukan dan dukungan kebijakan 5 Penetapan NSPK	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		REHABILITASI SOSIAL				
		1 Kesejahteraan sosial anak a. Kesejahteraan Sosial Anak Balita 1) Pengangkatan Anak 2) Pengasuhan Anak Balita b. Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar 1) Pengasuhan Anak dalam Keluarga 2) Pengasuhan Anak dalam Lembaga c. Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum 1) Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum 2) Pengembangan Remaja d. Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kecacatan 1) Kelembagaan dan Penguatan Keluarga 2) Aksesibilitas Anak dengan Kecacatan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		e. Kesejahteraan Sosial Anak yang 1) Kelembagaan Perlindungan Anak 2) Advokasi dan Perlindungan Khusus				
		2 Rehabilitasi Sosial a. Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, 1) Dalam Panti 2) Luar Panti b. Kelembagaan dan advokasi sosial c. Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial	Tertutup	Peneru kebijakan, pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
			Eiasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		3 Rehabilitasi sosial tuna sosial a. Gelandangan, pengemis dan pemulung	Eiasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		b. Tuna susila dan korban <i>trafficking</i> perempuan	Tertbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
		c. Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan 1) Penyiapan 2) Reintegrasi	Eksa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		d. Pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS	Eksa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		4 Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA a. Pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan pengembangan peran masyarakat b. Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dalam institusi dan luar institusi	Eksa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		5 Pelayanan sosial lanjut usia a. Pelayanan sosial dalam dan luar panti b. Pengembangan kelembagaan 1) Pembinaan Lembaga 2) Kerjasama Lembaga c. Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan	Etika/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		<u>PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</u>				
		1 Pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial a. Bimbingan dan standarisasi b. Perizinan dan pengumpulan	Etika/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		2 Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan pekerja migran a. Perlindungan sosial korban tindak kekerasan 1) Pemulihan sosial 2) Pemulangan dan Reintegrasi b. Perlindungan sosial pekerja migran 1) Pemulihan sosial 2) Pemulangan dan Reintegrasi c. Evaluasi dan pelaporan 1) Kerjasama 2) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	Etika/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3 Perlindungan sosial korban bencana sosial a. Ketahanan sosial masyarakat 1) Keresasian sosial 2) Penguatan Sumber Daya b. Tanggap Darurat 1) Bantuan Darurat 2) Advokasi sosial c. Pemulihan sosial 1) Penguatan sosial 2) Reintegrasi sosial d. Kerja sama 1) Kerja sama pemerintah 2) Kerja sama non pemerintah	Elasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		4 Perlindungan sosial korban bencana alam a. Kesiapsiagaan dan mitigasi b. Tanggap darurat 1) Bantuan darurat 2) Advokasi Sosial c. Pemulihan sosial dan penguatan sosial d. Kerja sama 1) Kerja sama pemerintah 2) Kerja sama Non Pemerintah	Elasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		5 Jaminan sosial a. Seleksi dan verifikasi b. Asuransi kesejahteraan sosial 1) Kelembagaan 2) Pengelolaan premi c. Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan 1) Pendampingan	Elasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) Pengembangan lingkungan sosial d. Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas 1) Advokasi sosial 2) Pengembangan aksesibilitas				
		3 Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial a. Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan 1) Pengangkatan 2) Penghargaan 3) Kesejahteraan b. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan transmittation 1) Identifikasi 2) Pendayagunaan c. Pengembangan kesetiakawanan sosial 1) penggalan nilai 2) Pelestarian nilai d. Pengelolaan taman makam pahlawan 1) Pengelolaan taman makam pahlawan 2) Standardisasi taman makam pahlawan	Eiasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23	470	KEPENDUDUKAN				
		KEBIJAKAN				
		Kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kependudukan, dan pencatatan sipil	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan 2. Penyiapan Kebijakan 3. Perumusan Kebijakan 4. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) 5. MOU				
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
		1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		a. Ketahanan Ideologi Negara 1) penguatan ideologi negara 2) implementasi ideologi negara				
		b. Wawasan Kebangsaan 1) penguatan wawasan kebangsaan 2) pembinaan dan sosialisasi 3) implementasi				
		c. Bela Negara 1) pendidikan bela negara 2) pemberdayaan bela negara				
		d. Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan 1) penguatan nilai-nilai sejarah 2) implementasi nilai-nilai sejarah 3) penerbitan rekomendasi penelitian				
		e. Pembauran dan Kewarganegaraan 1) pembinaan pembauran kebangsaan 2) pembinaan kewarganegaraan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2. Kewaspadaan Nasional a. Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dimai dan Kerjasama Intelijen Keamanan c. Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan d. Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial e. Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing 1) pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing 2) surat pemberitahuan penelitian orang asing	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		3. Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan a. Ketahanan Seni 1) fasilitasi pelaksanaan pelestarian kesenian 2) pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kesenian b. Ketahanan Budaya 1) fasilitasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan 2) pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kebudayaan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		c. Agama dan Kepercayaan 1) fasilitasi 2) data Forum Komunikasi Umat Beragama 3) pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan 4) pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan d. Organisasi Kemasyarakatan 1) pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat (a) pendaftaran Ormas (b) <i>database</i> Ormas 2) laporan hasil kerjasama kegiatan dengan ORMAS/LNL 3) evaluasi aktifitas Ormas 4) fasilitasi sengketa Ormas 5) fasilitasi Ormas e. Masalah sosial Kemasyarakatan 1) fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika 2) masalah sosial kemasyarakatan				
		4. Politik Dalam Negeri a. Implementasi Kebijakan Politik 1) implementasi kebijakan politik (a) sosialisasi dan publikasi <i>best practise</i> dan inovasi	Easa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) pelaksanaan monitoring dan evaluasi b. Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan 1) evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di daerah 2) evaluasi kelembagaan politik pemerintahan daerah (a) orientasi anggota DPRD c. Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik 1) verifikasi dan evaluasi partai politik yang memperoleh kursi 2) partai politik yang tidak memperoleh kursi 3) pemerintah daerah 4) <i>database</i> parpol d Pendidikan Budaya Politik 1) fasilitasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik 2) penyelenggaraan pendidikan budaya politik 3) modul sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan e. Pemilihan Umum 1) fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu 2) evaluasi pelaksanaan pemilihan umum wakil rakyat				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3) evaluasi pemilihan umum Presiden dan wakil presiden 4) laporan hasil perkembangan politik di daerah 5) laporan hasil kerjasama kegiatan dengan Ormas/LSM/LNL				
		5. Ketahanan Ekonomi a. Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian 1) penanganan kesenjangan perekonomian b. Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal, dan Moneter 1) fasilitasi identifikasi ketahanan di bidang perdagangan, investasi fiskal, dan 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan, dan fasilitasi monitoring dan evaluasi c. Perilaku Perekonomian Masyarakat 1) pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian 2) evaluasi cinta produk dalam negeri dan perlindungan konsumen d. Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi 1) evaluasi pelaksanaan hubungan kerjasama penanganan kejahatan	Efisa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan lembaga perekonomian				
		PEMERINTAHAN UMUM				
		1. Dekonsentrasi dan Kerjasama				
		a. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan				
		b. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah				
		c. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama				
		d. Fasilitasi Kecamatan				
		1) fasilitasi				
		(a) database pembentukan kecamatan				
		2) koordinasi				
		3) pembinaan dan pengawasan				
		4) monitoring dan evaluasi				
		(a) evaluasi kinerja kecamatan				
		e. Fasilitasi Pelayanan Umum				
		1) fasilitasi pelayanan administrasi Kecamatan				
		2) koordinasi pelayanan administrasi Kecamatan				
			Etisa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3) pembinaan dan pengawasan pelayanan 4) monitoring dan evaluasi				
		2. Wilayah Administrasi dan Perbatasan a. Toponimi dan Data Wilayah 1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan toponimi 2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembakuan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan 3) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi perubahan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan 4) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemindahan ibukota daerah dan pemindahan pusat pemerintahan daerah 5) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		6) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penghitungan luas wilayah c. Batas antar-Daerah Wilayah 1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penetapan batas antar-daerah 2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelesaian sengketa batas antar-daerah				
		3. Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat a. Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja 1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi Pelaksanaan tata operasional polisi pamong praja 2) standarisasi sarana prasarana polisi pamong praja (a) fasilitasi (b) koordinasi (c) pembinaan dan pengawasan (d) monitoring dan evaluasi b. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja	Eiasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyusunan program peningkatan kapasitas aparaturn polisi pamong praja 2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan evaluasi peningkatan kapasitas aparaturn polisi pamong praja c. Perlindungan Masyarakat 1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan masyarakat 2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan aparaturn dan kelembagaan perlindungan masyarakat d. penyidik pegawai negeri sipil 1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan operasional penyidik pegawai negeri sipil				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan, serta monitoring, dan evaluasi pembinaan dan evaluasi administrasi aparatur penidik pegawai negeri sipil e. Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia 1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan supervisi hak asasi manusia				
		4. Kawasan dan Pertanian a. Kawasan Sumber Daya Alam 1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan, serta monitoring pertanian, dan lingkungan b. Pertanian dan Kawasan Khusus 1) penyelenggaraan urusan pertanian 2) penyelesaian sengketa pertanian 3) evaluasi penataan kawasan khusus	Etiisa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a. Identifikasi Potensi Bencana 1) evaluasi pelaksanaan pencegahan bencana dan mitigasi bencana b. Organisasi Sistem dan Prosedur 1) pengembangan kerjasama kelembagaan	Etiisa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		(a) fasilitas (b) koordinasi (c) fasilitas serta koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana c. Sarana dan Prasarana 1) evaluasi standarisasi aplikasi peralatan 2) evaluasi pengembangan informasi dan teknologi penyelenggaraan d. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 1) evaluasi pengembangan pemberdayaan masyarakat di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran 2) evaluasi peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran				
		OTONOMI DAERAH 1. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah a. Fasilitas, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi 1) pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 2) penyusunan standar pelayanan minimal 2. Fasilitas, Monitoring, dan Evaluasi Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

b

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3. Fasilitas, Monitoring, dan Evaluasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar-Lembaga a. penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah b. administrasi kepala daerah dan DPRD c. penyiapan perumusan kebijakan d. hubungan antar-lembaga daerah (pemerintah daerah dan DPRD) e. asosiasi daerah 4. Fasilitas, Monitoring, dan Evaluasi Peningkatan a. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah b. kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah c. pengembangan kapasitas daerah BINA PEMBANGUNAN DAERAH 1. Perencanaan Pembangunan Daerah/Per Wilayah 2. Pengembangan Wilayah a. penyusunan pedoman penyerasian pengembangan wilayah b. penyusunan dan pemutahiran basis data dan informasi pengembangan wilayah c. penyusunan dan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan d. Kawasan Strategis dan Andalan				
			Eiasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1) evaluasi pengembangan data 2) pengembangan kawasan strategis dan andalan 3. Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup a. Penataan Ruang Wilayah 1) evaluasi perencanaan, pemanfaatan tata ruang wilayah 2) evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian tata ruang wilayah 3) implementasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang b. Penataan Ruang Kawasan 1) evaluasi tata ruang kawasan 2) pembinaan tata ruang kawasan 3) implementasi c. Konservasi dan Rehabilitasi 1) evaluasi pelaksanaan konservasi 2) evaluasi pelaksanaan rehabilitasi 3) implementasi d. Perencanaan dan Pemanfaatan Sumberdaya 1) evaluasi pengembangan potensi sumber 2) evaluasi pemanfaatan sumber daya air 3) implementasi e. Pengendalian Lingkungan Hidup 1) pengembangan instrumen kelembagaan 2) analisis dan audit pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		4. Pengembangan Ekonomi Daerah a. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah 1) identifikasi produk unggulan dan analisis potensi ekonomi daerah 2) pengembangan produk unggulan dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah b. Promosi dan Investasi Daerah 1) pelaksanaan promosi ekonomi daerah 2) pelaksanaan investasi daerah c. Sarana dan Prasarana Perekonomian daerah 1) pelaksanaan pengembangan perdagangan daerah 2) pelaksanaan perindustrian daerah d. Kemitraan Usaha 1) perencanaan dan pengembangan kemitraan usaha ekonomi daerah 2) pengelolaan kemitraan usaha ekonomi daerah e. Kelembagaan Ekonomi daerah 1) pelaksanaan pengembangan kelembagaan ekonomi daerah 2) penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi daerah				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		5. Penataan Perkotaan a. Perencanaan Pengendalian Perkotaan 1) evaluasi perencanaan perkotaan 2) fasilitasi 3) pengendalian penataan perkotaan b. Penataan Kota Kecil 1) pengendalian pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan 2) pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan 3) fasilitasi c. Sarana dan Prasarana Perekonomian daerah 1) pelaksanaan pengembangan perdagangan daerah 2) pelaksanaan perindustrian daerah d. Kemitraan Usaha 1) perencanaan dan pengembangan kemitraan usaha ekonomi daerah 2) pengelolaan kemitraan usaha ekonomi daerah				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		e. Kerjasama Perkotaan 1) pengendalian kerjasama perkotaan antar daerah 2) pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan 3) fasilitasi				
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Pemerintahan Kelurahan a. Fasilitasi Pengembangan Kelurahan 1) pelaksanaan pengembangan kelurahan b. Administrasi Pemerintahan Kelurahan 1) pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan c. Fasilitasi Permusyawaratan Kelurahan (LPMK) 1) pelaksanaan penataan kelembagaan badan permusyawaratan Kelurahan (LPMK) 2) pelaksanaan penataan kewenangan badan permusyawaratan Kelurahan (LPMK) 2. Kelembagaan dan Relativitas Masyarakat a. Lembaga Masyarakat 1) pembinaan penataan lembaga masyarakat di desa	Etiara/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) pelaksanaan kerjasama lembaga masyarakat				
		b. Pembangunan Partisipatif				
		1) pelaksanaan pengembangan metode pembangunan partisipatif				
		2) pelaporan kinerja pembangunan Kelurahan				
		c. Pendataan Potensi Masyarakat				
		1) inventarisasi potensi masyarakat				
		(a) profil Kelurahan				
		2) evaluasi perkembangan masyarakat				
		e. Pelatihan Masyarakat				
		1) pelaksanaan penyusunan dan				
		(a) <i>grand design</i> pelatihan masyarakat				
		(b) pedoman pelatihan masyarakat				
		(c) fasilitasi				
		(d) monitoring dan evaluasi				
		2) evaluasi pelatihan masyarakat				
		(a) penyelenggaraan pelatihan				
		(b) monitoring dan evaluasi				
		3. Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat				
		a. Budaya Nusantara				
		1) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) pelaksanaan kerjasama adat istiadat b. Pemberdayaan Perempuan 1) pelaksanaan peningkatan perberdayaan perempuan 2) pembinaan, perlindungan hak-hak c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 1) pelaksanaan pemberdayaan keluarga 2) pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga d. Kesejahteraan Sosial 1) pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial 2) pelaksanaan penanganan masalah sosial e. Tenaga Kerja kelurahan 1) fasilitasi dan evaluasi pembinaan dan pembinaan tenaga kerja 2) fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja 4. Usaha Ekonomi Masyarakat a. Usaha Pertanian dan Pangan 1) pembinaan dan pengembangan usaha pertanian, agribisnis, dan Lumbung Pangan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		(a) identifikasi data pertanian (b) fasilitas (c) monitoring dan evaluasi b. Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam 1) pelaksanaan peningkatan kerja sama dan permodalan usaha perkreditan, dan simpan pinjam (a) inventarisasi lembaga keuangan mikro yang belum berbadan hukum (b) inventarisasi dan pemetaan potensi Kelurahan (c) fasilitas pembinaan, pendampingan, dan pengawasan (d) monitoring dan evaluasi 2) pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha perkreditan dan simpan pinjam (a) fasilitas pembinaan, pendampingan, dan pengawasan (b) monitoring dan evaluasi c. Produksi dan Remasan 1) pelaksanaan pengembangan informasi pasar (a) identifikasi produk unggulan Kelurahan (b) fasilitas (c) monitoring dan evaluasi				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) pelaksanaan diversifikasi pasar (a) fasilitasi pengelolaan pasar (b) fasilitasi sarana dan prasarana Kelurahan (c) sistem penilaian kinerja pasar (d) monitoring dan evaluasi (e) data pasar desa d. Usaha Ekonomi dan Keluarga 1) pelaksanaan peningkatan kewirausahaan dan perkoperasian (a) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi keluarga (b) monitoring dan evaluasi 2) pelaksanaan pengembangan usaha jasa dan industri kecil (a) penyusunan Modul (b) fasilitasi (c) monitoring dan evaluasi e. Ekonomi Kelurahan 1) ekonomi Kelurahan (a) identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi Kelurahan (b) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan (c) monitoring dan evaluasi				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
		1. Pendaftaran Penduduk				
		a. Identitas Penduduk				
		1) Berkas pelaksanaan pelayanan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dan				
		2) penyiapan pemberian nomor kendali kartu keluarga dan kartu tanda				
		3) Berkas pencetakan dan distribusi blangko dokumen kependudukan Kartu				
		b. Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah NKRI				
		1) Berkas pelaksanaan pindah datang penduduk WNI				
		2) Berkas pelaksanaan pindah datang penduduk orang asing				
		3) Berkas pelaksanaan perubahan alamat				
		c. Pindah Datang Penduduk antar-negara				
		1) Berkas perpindahan penduduk Indonesia keluar Negeri dan WNI dari luar negeri				
		2) berkas pelaksanaan pendaftaran orang asing tinggal terbatas				
		d. Pendataan Penduduk Rentan				
		1) Berkas pelaksanaan pendataan penduduk korban bencana				
			Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) Berkas pelaksanaan pendataan orang terlarang 3) Pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi 1) monitoring pelaksanaan program pendaftaran penduduk 2) evaluasi pelaksanaan program pendaftaran penduduk 3) pelaksanaan dokumentasi kebijakan pendaftaran penduduk	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		2. Pencatatan Sipil a. Kelahiran dan Kematian 1) fasilitas pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran 2) fasilitas pelaksanaan pelayanan pencatatan kematian 3) fasilitas pelaksanaan pencatatan kelahiran dan kematian 4) pelaksanaan hubungan antar-lembaga dalam rangka pencatatan kelahiran dan kematian b. Perkawinan dan Perceraian	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1) fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama non-Islam 2) pencatatan perkawinan dan perceraian 3) pelaksanaan hubungan antar-lembaga dalam rangka pencatatan perkawinan dan perceraian non-Islam c. Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta 1) pelayanan perubahan dan pembatalan akta 2) pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta 3) pelaksanaan hubungan antar-lembaga dalam rangka pengangkatan pengakuan, pengesahan anak , perubahan , pembatalan akta d. Pencatatan Kewarganegaraan 1) pelaksanaan pelayanan pencatatan kewarganegaraan akibat kelahiran 2) pelaksanaan pelayanan pencatatan kewarganegaraan akibat				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3) pelaksanaan pencatatan pewarganegaraan kelahiran dan non-kelahiran 4) pelaksanaan hubungan antar-lembaga dalam rangka peningkatan pelayanan pencatatan pewarganegaraan e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi 1) penyusunan program dan kegiatan 2) monitoring pelaksanaan program pencatatan 3) evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil 4) pelaksanaan dokumentasi kebijakan pencatatan sipil	Eiasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan a. Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan 1) pengelolaan data administrasi kependudukan 2) pemeliharaan database administrasi kependudukan 3) pengembangan database administrasi kependudukan 4) pelayanan pengelolaan data administrasi kependudukan	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		b. Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan 1) penyajian informasi administrasi kependudukan 2) pelaksanaan pelayanan informasi melalui media elektronik 3) pelaksanaan layanan informasi melalui media cetak	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		c. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi 1) pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah dan melalui jalur luar sekolah 2) kebijakan kependudukan dan pengembangan wawasan kependudukan 3) pelaksanaan hubungan antar-lembaga dalam rangka pengembangan wawasan kependudukan 4) pelaksanaan dokumentasi pelayanan informasi kependudukan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		4. Pengembangan Kebijakan Kependudukan a. Kuantitas Penduduk 1) pelaksanaan penyusunan analisis jumlah, struktur, dan komposisi penduduk 2) pelaksanaan analisis pertumbuhan penduduk	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3) kebijakan kuantitas penduduk b. Kualitas Penduduk 1) pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia anak, remaja, dan pemuda 2) pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia produktif dan lanjut usia 3) pelaksanaan hubungan antar-lembaga dalam rangka kebijakan kualitas penduduk c. Mobilitas Penduduk 1) kebijakan mobilitas penduduk d. Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk 1) pelaksanaan pengembangan sistem perlindungan penduduk 2) pelaksanaan pengembangan sistem pemberdayaan penduduk 3) perlindungan dan pemberdayaan penduduk e. Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring, dan Evaluasi				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1) pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah dan melalui jalur lain 2) pengembangan wawasan kependudukan 3) pelaksanaan hubungan antar-lembaga dalam rangka pengembangan wawasan kependudukan				
24	489	HUBUNGAN MASYARAKAT Keprotokolan: a. Penyelenggaraan Acara Kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar) b. Buku Tamu c. Agenda Kegiatan Pimpinan Lembaga/Instansi d. Kunjungan dinas dalam dan luar negeri 1) Kunjungan Dinas Pimpinan Lembaga/Instansi 2) Kunjungan Dinas Pejabat Lain/Pegawai e. Daftar Nama/Alamat Kantor/Pejabat Dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan, dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media: kertas/foto/video/rekaman suara/multi media			Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3) kebijakan kuantitas penduduk b. Kualitas Penduduk 1) pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia anak, remaja, dan pemuda 2) pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia produktif dan lanjut usia 3) pelaksanaan hubungan antar-lembaga dalam rangka kebijakan kualitas penduduk c. Mobilitas Penduduk 1) kebijakan mobilitas penduduk d. Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk 1) pelaksanaan pengembangan sistem perlindungan penduduk 2) pelaksanaan pengembangan sistem pemberdayaan penduduk 3) perlindungan dan pemberdayaan penduduk e. Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring, dan Evaluasi				

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi kelembagaan: - Kliping koran - Brosur / leaflet / poster / plakat - Pengumuman / pemberitaan Hubungan Antar-Lembaga dan Pemerintah daerah - Hubungan antar-lembaga pemerintah - Hubungan dengan organisasi sosial/LSM - Hubungan dengan perusahaan - Hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapangan (PKL) - Forum kehumasan (Bakohumas/Perhumas) - Hubungan dengan media massa: - Siaran pers/konferensi pers/press release - Kunjungan wartawan/ peliputan - Wawancara Dengar pendapat/hearing DPRD Bahan/materi pidato/sidang MPR, DPR, DPD, Kabinet, DPRD, dan Forkopimda Penerbitan majalah, buletin, koran, dan jurnal Publikasi melalui media cetak maupun elektronik Pameran/sayembara/lomba, festival, pembuatan spanduk, dan iklan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi kelembagaan: a. Kliping koran b. Brosur / leaflet / poster / plakat c. Pengumuman / pemberitaan Hubungan Antar-Lembaga dan Pemerintah daerah a. Hubungan antar-lembaga pemerintahan b. Hubungan dengan organisasi sosial / LSM c. Hubungan dengan perusahaan d. Hubungan dengan perguruan tinggi / sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG) / Praktek Kerja Lapangan (PKL) e. Forum kehumasan (Bakohumas / Perhumas) f. Hubungan dengan media massa: 1) Siaran pers / konferensi pers / press release 2) Kunjungan wartawan / peliputan 3) Wawancara Dengar pendapat / hearing DPRD Bahan / materi pidato / sidang MPR, DPR, DPD, Kabinet, DPRD, dan Forkopimda Penerbitan majalah, buletin, koran, dan jurnal Publikasi melalui media cetak maupun elektronik Pameran / sayembara / lomba, festival, pembuatan spanduk, dan iklan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1) pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah dan melalui jalur lain 2) pengembangan wawasan kependudukan 3) pelaksanaan hubungan antar-lembaga dalam rangka pengembangan wawasan kependudukan				
24	489	HUBUNGAN MASYARAKAT Keprotokolan: a. Penyelenggaraan Acara Kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar) b. Buku Tamu c. Agenda Kegiatan Pimpinan Lembaga/Instansi d. Kunjungan dinas dalam dan luar negeri 1) Kunjungan Dinas Pimpinan Lembaga/Instansi 2) Kunjungan Dinas Pejabat Lain/Pegawai e. Daftar Nama/Alamat Kantor/Pejabat Dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan, dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media: kertas/foto/video/rekaman suara/multi media	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan Administrasi pemberian penghargaan/tanda kenangan kepada masyarakat yang memiliki jasa prestasi besar Ucapan terima kasih, ucapan selamat, bela sungkawa, permohonan maaf				
25	510	PERDAGANGAN KEBIJAKAN Kebijakan tentang Perdagangan Dalam Negeri, Standarisasi dan perlindungan konsumen, Pengembangan Ekspor 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan bahan 3 Perumus kebijakan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK 6 Perumusan dan penerapan standar PERDAGANGAN DALAM NEGERI A. Bina Usaha 1) Kelembagaan dan penguatan usaha a) Kelembagaan b) Penguatan usaha 2) Jasa Perdagangan a) Perdagangan berbasis elektronik	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		b) Perdagangan berbasis jasa distribusi dan bisnis 3) Usaha dagang asing dan keagenan a) Usaha dagang asing b) Keagenan 4) Informasi perusahaan a) Pendaftaran perusahaan b) Seksi analisa LKTP				
			Rahasia/ Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit pengolah terkait
		5) Pelaku pasar a) Pengecer b) Pemasok 6) Rekomendasi izin usaha perdagangan a) Rekomendasi sarana perdagangan b) Rekomendasi sarana penunjang perdagangan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		c) Rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu d) Rekomendasi izin SIUP, TDP, API-U e) Rekomendasi Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum f) Rekomendasi lokasi pendirian tempat penyimpanan migas g) Rekomendasi pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub h) Rekomendasi izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU); i) Rekomendasi pemberian perijinan pendaftaran perusahaan j) Rekomendasi izin SIPTU PKL k) Rekomendasi izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kota 7) Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang				
		B. Dagang Kecil Menengah, PKL dan Produk Dalam Negeri 1) Iklim usaha dan bimbingan teknis a) Iklim usaha b) Bimbingan teknis	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) Fasilitas usaha dan pemasaran a) Fasilitas usaha produktif b) Pemasaran 3) Pengembangan produk lokal a) Penelaahan potensi produk b) Fasilitas penguatan produk 4) Pencitraan produk dalam negeri a) kerja sama peningkatan penggunaan produk dalam negeri b) peningkatan promosi				
		C. Logistik dan Sarana Distribusi 1) Pengembangan sarana distribusi a) Perencanaan b) Bimbingan teknis pengembangan 2) Pengelolaan sarana distribusi a) Bimbingan teknis pengelolaan b) Evaluasi pengelolaan 3) kerja sama pengembangan sistem logistik a) Pemerintah b) Lembaga non pemerintah 4) Informasi dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik a) Informasi logistik b) Bimbingan teknis penyedia jasa logistik	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		D. Bahan Pokok dan Barang Strategis 1) Informasi Pasar a) Informasi harga : pengumpulan, pengolahan data, penyiapan, penyajian informasi dan analisis b) Informasi non harga: pengumpulan, pengolahan data, penyiapan, penyajian informasi dan analisis 2) Hasil industri a) Gula dan tepung b) Minyak goreng dan garam 3) Barang strategis a) Hasil agro b) Hasil industri 4) Bahan pokok agro a) Serelia b) Hewan dan non serelia	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		PERLINDUNGAN KONSUMEN A. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen a) Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen b) Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kota c) Pembinaan ,pemberdayaan Motivator ,Mediator Perlindungan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		d) Pembinaan perlindungan konsumen terhadap barang-barang yang beredar di pasar				
		B. Pemberdayaan Konsumen 1) Kerjasama, informasi, dan publikasi a) Kerja sama b) Informasi dan publikasi 2) Analisa penyelenggara perlindungan konsumen a) Konsultasi hukum b) Analisis 3) Bimbingan konsumen dan pelaku usaha a) Bimbingan konsumen b) Bimbingan pelaku usaha 4) Fasilitas kelembagaan a) Pemberdayaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat b) Pemberdayaan badan penyelesaian sengketa konsumen	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		C. Pengawasan Barang Beredar dan Jasa 1) Produk pertambangan dan aneka industri a) Produk pertambangan dan olahan b) Produk aneka industri 2) Produk pertanian, kimia, dan kehutanan a) Produk pertanian dan kehutanan b) Produk kimia dan olahan 3) Jasa a) Jasa distribusi b) Jasa bisnis	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		4) Kerjasama lembaga pemerintah dan non pemerintah		(5)	(6)	(7)
		D. Metrologi 1) Sarana dan Kerjasama a) Sarana metrologi legal b) Kerja sama metrologi legal 2) Kelembagaan dan Penilaian a) Kelembagaan metrologi legal b) Penilaian kelembagaan metrologi legal 3) UTTP dan Standar Ukuran a) Besaran massa, listrik, tekanan dan suhu b) Besaran arus, panjang dan volume 4) Pengawasan a) Pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya b) Pengawasan barang terbangkus dan satuan internasional	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PENGEMBANGAN EKSPOR Fasilitas pengembangan ekspor untuk pelaku usaha tingkat kota	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapa pun.	Unit pengolahan terkait
		PENGLOLAAN PASAR A. Pemberdayaan dan pembinaan pedagang pasar a) Organisasi pedagang pasar b) Penanganan dan penyelesaian permasalahan pedagang c) Pengendalian ketertiban, keamanan, kebersihan d) Penyusunan buku induk penyewa atau pelanggan kios, los B. Pemeliharaan sarana prasarana di lingkungan pasar a) Inventarisasi kebutuhan fasilitas dan bangunan pasar b) Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana c) Pemanfaatan fasilitas	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapa pun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		BIMBINGAN TEKNIS EVALUASI				
26	518	KOPERASI KEBIJAKAN Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro, Produksi, Pembiayaan, Pemasaran dan Jaringan Usaha, Pengkajian Sumber Daya Koperasi dan Usaha Mikro, Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Pengembangan SDM, Perjanjian Kerja Sama, Gerakan Kewirausahaan Nasional, Penetapan Bantuan 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan kebijakan 4 Pemberian masukan dan dukungan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK MONITORING DAN EVALUASI	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		KELEMBAGAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		1 Organisasi dan Badan Hukum Koperasi dan Usaha Mikro a Organisasi Koperasi dan Usaha Mikro b Badan Hukum Koperasi dan Usaha Mikro 1) Penatausahaan Badan Hukum Koperasi dan Usaha Mikro 2) Evaluasi Badan Hukum Koperasi dan Usaha Mikro c Penelaahan Kasus Hukum Koperasi dan Usaha Mikro	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		2 Peraturan Perundang-Undangan a Penyusunan dan Evaluasi Perundang-Undangan Koperasi dan Usaha Mikro 1) Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Koperasi dan Usaha Mikro 2) Evaluasi Perundang-Undangan Koperasi dan Usaha Mikro b Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan 1) Produk Peraturan Perundang-Undangan Pusat 2) Peraturan Daerah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3 Tata laksana Koperasi dan Usaha Mikro a Tata laksana Koperasi 1) Tata laksana Koperasi Primer 2) Tata laksana Koperasi Sekunder b Tata laksana Usaha Mikro c Klasifikasi Koperasi dan Usaha Mikro	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		4 Keanggotaan Koperasi a Partisipasi Usaha dan Permodalan 1) Partisipasi Usaha 2) Partisipasi Permodalan b Partisipasi Pengawasan 1) Rapat Anggota 2) Pengawasan c Pengembangan Anggota 1) Kaderisasi 2) Penyuluhan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		5 Pengendalian dan Akuntabilitas a Pengendalian 1) Pengendalian Intern 2) Tindak Lanjut Hasil Pengendalian b Bidang Akuntabilitas, Akuntansi dan Audit c Monitoring dan Evaluasi 1) Monitoring 2) Evaluasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		PRODUKSI USAHA MIKRO				
		1 Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura a Tanaman Pangan 1) Padi 2) Palawija b Hortikultura 1) Buah-Buahan dan Tanaman Obat 2) Tanaman Hias dan Sayur c Sarana 1) Sarana Produksi 2) Sarana Pengolahan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		2 Perikanan dan Peternakan a Perikanan 1) Perikanan Tangkap 2) Perikanan Budidaya b Peternakan 1) Ternak Besar 2) Ternak Kecil c Sarana 1) Sarana Produksi 2) Sarana Pengolahan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		3 Industri Kerajinan dan Pertambangan a Industri 1) Sandang dan Logam 2) Pangan, Kimia dan Aneka b Kerajinan 1) Logam 2) Non Logam	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		c Pertambangan dan Migas 1) Pertambangan Umum 2) Pertambangan Migas				
		4 Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha a Ketenagalistrikan dan Konstruksi 1) Listrik 2) Konstruksi b Aneka Usaha 1) Jasa Umum 2) Angkutan c Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi 1) Pariwisata 2) Pos dan Telekomunikasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		PEMBIAYAAN				
		1 Program Pendanaan Koperasi dan Usaha Mikro a Program Pendanaan Jangka Pendek b Program Pendanaan Usaha Mikro dan Dana Bergulir	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		2 Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam a Pengembangan dan Pengendalian KSP 1) Pengembangan Kelembagaan KSP 2) Pengendalian Kelembagaan KSP b Pengembangan dan Pengendalian USP Koperasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1) Pengembangan USP Koperasi 2) Pengendalian USP Koperasi c Pengembangan dan Pengendalian USP-LKM 1) Pengembangan USP-LKM 2) Pengendalian USP-LKM 3 Urusan Permodalan a Pengembangan Permodalan Sendiri Koperasi dan Usaha Mikro b Pengembangan Permodalan Luar 1) Permodalan Bank 2) Permodalan Non Bank c Pengembangan Kredit Program 1) Kredit Program Bank 2) Kredit Program Non Bank 4 Pembiayaan dan Penjaminan Kredit a Lembaga Pembiayaan 1) Sewa Guna Usaha dan Anak Piutang b Penjaminan Kredit i) Penjaminan 5 Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro (LPDB)				
			Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
			Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
			Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA				
		1 Perdagangan Dalam Negeri a Pengadaan Sektor Formal dan Informal b Distribusi Sektor Formal dan Informal c Pengembangan Sektor Formal dan Informal	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		2 Sarana dan Prasarana Pemasaran a Pengembangan Potensi Pemasaran 1) Pengembangan Potensi Pemasaran Koperasi 2) Pengembangan Potensi Pemasaran UKM	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		3 Kemitraan dan Jaringan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro a Kemitraan b Jaringan Usaha c Pengembangan Kerja sama Kelembagaan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		4 Informasi dan Publikasi Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro a Pengumpulan Informasi b Pengolahan Informasi c Publikasi dan Promosi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
		1 Pengembangan Kewirausahaan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		a Lembaga Kewirausahaan				
		1) Pengembangan Jaringan Kewirausahaan				
		2) Peningkatan Sumber Daya				
		b Penumbuhan Kewirausahaan				
		1) Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan				
		2) Evaluasi Kewirausahaan				
		c Sosialisasi Kewirausahaan				
		1) Perangkat Lunak				
		2) Promosi Kewirausahaan				
		2 Kebijakan Pendidikan Koperasi dan Usaha Mikro	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		a Diklat Formal dan Informal				
		1) Diklat Formal				
		2) Diklat Informal				
		b Diklat Non Formal				
		1) Perangkat Lunak				
		2) Sarana dan Prasarana Diklat				
		c Kerjasama Lembaga Diklat				
		1) Hubungan Lembaga Diklat Pemerintah				
		2) Hubungan Lembaga Diklat Non				
		3 Peran Serta Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		a Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi dan Usaha Mikro				
		b Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi dan Usaha Mikro				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		c Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi Koperasi dan Usaha Mikro				
		4 Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan Usaha Mikro	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		a Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan Usaha Mikro				
		b Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal dan Informal				
		c Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Pemerintah dan Non Pemerintah				
		5 Advokasi	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		a Advokasi Organisasi dan Manajemen				
		b Advokasi Peraturan Perundang-Undangan				
		1) Kajian Penerapan				
		2) Sosialisasi Perundang-Undangan				
		PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA				
		1 Produktifitas dan Mutu	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		a Produktifitas				
		1) Inkubator Teknologi				
		2) Pengembangan Klaster				
		b Peningkatan Mutu				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1) Disain 2) Standarisasi c Sertifikasi Produk 1) sertifikasi 2) Label dan Merk Produk				
		2 Restrukturisasi Usaha a Restrukturisasi Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro b Restrukturisasi Pendanaan Koperasi dan Usaha Mikro c Restrukturisasi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		3 Fasilitas Investasi UM a Investasi Klaster Usaha Mikro 1) Fasilitas Investasi Usaha MikroAgro Bisnis 2) Fasilitas Investasi Usaha Mikro Non Agro Bisnis b Pengembangan Kerja Sama Investasi Usaha 1) Pengembangan Pangan 2) Pengembangan Non Pangan c Fasilitas Investasi Aneka Usaha Mikro 1) Fasilitas Investasi Usaha Koperasi 2) Fasilitas Investasi Usaha Mikro	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		4 Pengembangan Sistem Bisnis a Fasilitasi Transaksi 1) Dalam Negeri 2) Luar Negeri b Kerja Sama Usaha 1) Pertukaran Koperasi 2) Pertukaran Usaha Mikro c Jari 1) Pengembangan Sarana Komunikasi 2) Komunikasi Bisnis	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		PENGKAJIAN SUMBER DAYA KOPERASI DAN USAHA MIKRO				
		1 Penelitian Koperasi a Perencanaan dan Pengendalian 1) Perencanaan 2) Evaluasi dan Pelaporan b Penyelenggaraan 1) Kelembagaan Koperasi 2) Bisnis Koperasi c Tata Laksana Penelitian 1) Temu Ilmiah dan Pengembangan 2) Sarana dan Prasarana	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		2 Penelitian Usaha Mikro a Perencanaan dan Pengendalian 1) Perencanaan 2) Evaluasi dan Pelaporan b Penyelenggaraan 1) Kelembagaan Usaha Mikro 2) Bisnis Usaha Mikro	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		c Tata Laksana Penelitian 1) Temu Ilmiah dan Pengembangan 2) Sarana dan Prasarana				
		3 Penelitian Sumber Daya a Perencanaan dan Pengendalian 1) Perencanaan 2) Evaluasi dan Pelaporan b Penyelenggaraan 1) Sumber Daya Manusia 2) Pembiayaan c Tata Laksana Penelitian 1) Temu Ilmiah dan Pengembangan 2) Sarana dan Prasarana	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		4 Pengembangan Perkaderan Usaha Mikro a Penyuluhan 1) Penyelenggaraan 2) Materi Penyuluhan b Perkaderan 1) Penilaian 2) Pengembangan c Kerja Sama dan Jaringan 1) Lembaga Pemerintah 2) Lembaga Non Pemerintah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
27	520	PERTANIAN KEBLAJAKAN Kebijakan di bidang Hortikultura, Sarana Prasarana Pertanian, Tanaman Pangan. 1 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan 2 Penyediaan Bahan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3 Perumusan Kebijakan 4 Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan 5 Penetapan Berbentuk NSPK				
		HORTIKULTURA				
		1 Perlindungan hortikultura a Perlindungan Tanaman Buah 1) Teknologi Perlindungan Tanaman Buah 2) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan b Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat 1) Teknologi Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat 2) Pengendalian Organisme Tumbuhan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat c Perlindungan Tanaman Florikultura 1) Teknologi Perlindungan Tanaman Florikultura 2) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Florikultura	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN				
		1 Perluasan dan Pengelolaan Lahan a Basis Data Lahan 1) Identifikasi Lahan 2) Analisis dan Penyajian Data Lahan b Pengendalian Lahan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1) Identifikasi dan Analisis Lahan 2) Rekomendasi Teknis pengendalian lahan c Optimasi lahan 1) Identifikasi dan Analisis optimasi lahan 2) Bimbingan Teknis optimasi lahan d Perluasan Kawasan Tanaman Pangan 1) Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan tanaman pangan 2) Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan tanaman pangan e Perluasan Kawasan Hortikultura 1) Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan hortikultura 2) Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan hortikultura				
		2 Pengelolaan Air Irigasi a Pengembangan Sumber Air 1) Air Permukaan 2) Air Tanah b Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air 1) Pengembangan Jaringan 2) Optimasi Air c Kelembagaan Himpunan Tani Pemakai Air 1) Identifikasi Kelembagaan 2) Pengembangan Kelembagaan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3 Pembiayaan Pertanian a Pendamping Pembiayaan Agribisnis 1) Materi dan Verifikasi pembiayaan agribisnis 2) Fasilitas dan Pemantauan pembiayaan agribisnis b Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis 1) Kelembagaan Agribisnis 2) Pemberdayaan Agribisnis	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		4 Pupuk Pestisida a Pupuk Organik dan Pembenah Tanah 1) Tanaman Pangan 2) Hortikultura dan Perkebunan b Pupuk Anorganik 1) Tanaman Pangan 2) Hortikultura dan Perkebunan c Pestisida 1) Pestisida Kimia 2) Pestisida Hayati d Pengawasan Pupuk dan Pestisida 1) Pengawasan Pupuk 2) Pengawasan Pestisida	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		5 Alat dan Mesin Pertanian a Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian 1) Tanaman Pangan dan Hortikultura 2) Perkebunan dan Peternakan b Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		1) Tanaman Pangan dan Hortikultura 2) Perkebunan dan Peternakan - c Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian 1) Kelembagaan 2) Pelayanan				
		TANAMAN PANGAN				
		1 Budidaya Serealial - a Padi Irigasi 1) Padi Irigasi - b Jagung 1) Intensifikasi Jagung 2) Pengembangan Jagung 2 Budidaya Aneka Kacang dan Umbi - a Ubi Kayu 1) Intensifikasi Ubi Kayu 2) Pengembangan Ubi Kayu - b Aneka Kacang 1) Intensifikasi Aneka Kacang 2) Pengembangan Aneka Kacang - c Aneka Umbi 1) Intensifikasi Aneka Umbi 2) Pengembangan Aneka Umbi 3 Perlindungan Tanaman Pangan - a Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan 1) Monitoring dan Analisis Data organisme pengganggu tumbuhan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
			Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
			Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		2) Evaluasi dan Pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan. b Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan 1) Identifikasi teknologi pengendalian. 2) Verifikasi teknologi pengendalian. c Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu 1) Pemasyarakatan pengelolaan 2) Kelembagaan pengelolaan pengendalian	(4)	(5)	(6)	(7)
		4 Pascapanen Tanaman Pangan a Padi 1) Teknologi pascapanen padi. 2) Sarana pascapanen padi. b Jagung dan Sereal Lain 1) Teknologi pascapanen jagung dan sereal lain. 2) Sarana pascapanen jagung dan sereal lain. c Aneka Kacang 1) Teknologi pascapanen aneka kacang. 2) Sarana pascapanen aneka kacang. d Aneka Umbi 1) Teknologi pascapanen aneka umbi. 2) Sarana pascapanen aneka umbi.	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN				
		1 Pengolahan Hasil Pertanian a Tanaman Pangan 1) Sereal 2) Aneka Kacang dan Aneka Umbi b Hortikultura 1) Tanaman Buah dan Sayuran 2) Tanaman Florakultura dan Tanaman Obat c Peternakan 1) Ruminansia 2) Non Ruminansia	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		2 Pengembangan Usaha dan Investasi a Kemitraan dan Kewirausahaan 1) Kemitraan 2) Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif b Promosi Dalam Negeri 1) Daya Saing 2) Eksibisi dan Ekspo	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		3 Pemasaran Domestik a Informasi Pasar 1) Analisis Pasar 2) Deseminasi Informasi Pasar b Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga 1) Pemantauan Pasar c Jaringan Pemasaran 1) Akses Pasar 2) Sarana Pemasaran	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN				
		1 Administrasi meliputi : Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat				
		2 Hasil Pengkajian dan Pengembangan a Hasil Pengembangan b Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		3 Diseminasi				
		4 Publikasi Hasil Pengkajian a Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, , Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop b Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya				
		KETAHANAN PANGAN				
		1 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan a Ketersediaan Pangan 1) Analisis Ketersediaan Pangan 2) Sumberdaya Pangan b Akses Pangan 1) Analisis Akses Pangan 2) Pengembangan Akses Pangan c Kerawanan Pangan 1) Analisis Kerawanan Pangan 2) Penanggulangan Kerawanan Pangan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		2 Distribusi dan Cadangan Pangan a Distribusi Pangan 1) Analisis Distribusi Pangan 2) Kelembagaan Distribusi Pangan b Harga Pangan 1) Analisis Harga Pangan Produsen 2) Analisis Harga Pangan Konsumen c Cadangan Pangan 1) Cadangan Pangan Pemerintah 2) Cadangan Pangan Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
28	523	PERIKANAN KEBIJAKAN Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan bahan 3 Perumusan kebijakan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan kebijakan PERIKANAN BUDIDAYA 1 Prasarana dan Sarana Budidaya a Lahan dan Air 1) identifikasi potensi 2) penataan b Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar 1) standarisasi 2) pemantauan dan evaluasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		2 Perbenihan a Induk 1) pengelolaan induk ikan air tawar 2) pengelolaan induk ikan air payau dan laut b Perbenihan Skala Kecil 1) perbenihan skala kecil ikan air tawar c Standarisasi dan Sertifikasi Perbenihan 1) standarisasi perbenihan 2) sertifikasi perbenihan d Informasi dan Distribusi Perbenihan 1) informasi perbenihan 2) distribusi perbenihan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		3 Produksi a budidaya air tawar 1) standarisasi 2) penerapan teknologi budidaya air tawar b budidaya ikan hias 1) standarisasi 2) penerapan teknologi budidaya ikan hias c sertifikasi 1) penerapan sertifikasi 2) monitoring dan evaluasi sertifikasi d data dan statistik perikanan budidaya 1) pengumpulan dan pengolahan data 2) analisis dan penyajian data statistik	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		4 Kesehatan Ikan dan Lingkungan a hama dan penyakit ikan 1) metode dan sistem pengendalian hama dan penyakit 2) monitoring dan evaluasi hama dan penyakit ikan b perlindungan lingkungan budidaya 1) pengendalian lingkungan budidaya 2) rehabilitasi lingkungan budidaya d obat ikan, kimia, dan bahan biologi 2) monitoring dan evaluasi obat ikan, kimia, dan bahan biologi e pengendalian residu 1) perencanaan pengendalian residu 2) tindak lanjut pengendalian residu	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		5 Usaha Budidaya a investasi dan permodalan 1) investasi 2) permodalan b kewirausahaan 1) bimbingan usaha 2) kemitraan c pelayanan usaha 1) perizinan 2) pemantauan dan evaluasi d kelembagaan dan ketenagakerjaan 1) kelembagaan 2) ketenagakerjaan e infomasi usaha dan promosi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1) informasi usaha 2) promosi				
		PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
		1 Pengolahan Hasil a standarisasi 1) analisis standar 2) penerapan standar b pengembangan produk 1) pengembangan produk skala c pengembangan usaha mikro 1) bimbingan teknis usaha mikro 2) kerja sama usaha mikro e sarana dan prasarana 1) sarana 2) prasarana	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		2 Pengembangan Produk Non Konsumsi a standarisasi 1) analisis standar 2) penerapan standar b promosi dan jaringan pasar ikan hias 1) promosi ikan hias 2) jaringan pasar ikan hias c pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah 1) bimbingan teknis usaha mikro, kecil, dan menengah d sarana dan prasarana 1) sarana 2) prasarana	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3 Pemasaran Dalam Negeri a kelembagaan 1) kelembagaan pelaku pasar hasil perikanan 2) kelembagaan pasar hasil perikanan b analisis dan informasi pasar dalam negeri 1) analisis pasar dalam negeri 2) informasi pasar dalam negeri c jaringan distribusi dan kemitraan 1) jaringan distribusi 2) kemitraan d promosi dan kerja sama 1) promosi 2) kerja sama e sarana dan prasarana 1) sarana 2) prasarana	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		4 Pemasaran Luar Negeri a pengembangan ekspor 1) peningkatan akses pasar 2) pengamanan dan perlindungan akses pasar	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		5 Usaha dan investasi a pelayanan usaha 1) pelayanan usaha mikro b kemitraan usaha 1) kemitraan usaha mikro	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		c ketenagakerjaan pengolahan dan pemasaran 1) tenaga kerja pengolahan 2) tenaga kerja pemasaran d investasi dan permodalan 1) investasi 2) permodalan e informasi dan promosi 1) informasi 2) promosi				
29	524	PETERNAKAN KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 1 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan 2 Penyiapan Bahan 3 Perumusan Kebijakan 4 Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan 5 Penetapan Berbentuk NSPK 1 Perbibitan Ternak a Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran 2 Pakan Ternak a Bahan Pakan 1) Bahan Pakan Asal Hewan 2) Bahan Pakan Asal Tumbuhan b Pakan Hijauan 1) Budidaya Pakan Hijauan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		c Pakan Olahan 1) Produksi Pakan Olahan 2) Pengolahan Pangan d Mutu Pakan 1) Pengawasan Pakan e Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran				
		3 Budidaya Ternak a Ternak Potong 1) Ternak Sapi dan Kerbau Potong 2) Ternak Kambing dan Domba Potong b Ternak Perah 1) Ternak Sapi 2) Ternak Kambing Perah c Ternak Unggas dan Aneka Ternak 1) Ternak Unggas 2) Aneka Ternak dan Monogastrik d Usaha dan Kelembagaan 1) Pemberdayaan masyarakat/lembaga (LM3)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		4 Kesehatan Hewan a Pengamatan Penyakit Hewan 1) Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner 2) Penyidikan Penyakit Hewan b Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan 1) Pencegahan Penyakit Hewan 2) Pemberantasan Penyakit Hewan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		c Perlindungan Hewan 1) Analisis Risiko Penyakit Eksotik 2) Kesiagaan Darurat Penyakit Hewan d Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan 1) Kelembagaan Kesehatan Hewan 2) Sumber Daya Kesehatan Hewan 3) Proposal Poskeswan e Pengawasan Obat Hewan 1) Peredaran dan Mutu Obat Hewan 2) Pendaftaran Obat Hewan 3) Rekomendasi Obat Hewan				
		5 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen a Pascapanen 1) Teknologi Pascapanen 2) Sarana Pascapanen b Higien Sanitasi 1) Penerapan Higiene Sanitasi 2) Inspeksi Higiene Sanitasi c Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan 1) Pengawasan Sanitary 2) Pengawasan Keamanan Produk Hewan d Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan 1) Zoonosis 2) Kesejahteraan Hewan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

f

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		e Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan 1) Pengujian Produk Hewan; f Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran				
30	530	PERINDUSTRIAN KEBIJAKAN Kebijakan mengenai industri agro, industri kecil menengah, pengkajian kebijakan iklim dan mutu industri meliputi: industri makanan dan minuman, sandang dan kulit, kimia dan bangunan, logam dan elektronik serta kerajinan 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK IKLIM USAHA DAN KERJASAMA A. Industri Agro 1) Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan a) Hasil Tanaman Pangan b) Hasil Perkebunan c) Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan 2) Industri Minuman dan Tembaku a) Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan b) Hasil Tembaku c) Hasil Susu dan Minuman Lainnya	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
			Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		B. Industri Kecil Dan Menengah 1) Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan a) Pangan b) Industri Kimia dan Bahan Bangunan 2) Industri Kerajinan dan Sandang a) Kerajinan b) Sandang	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		PROMOSI INDUSTRI				
		A. Industri Agro 1 Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan a) Hasil Tanaman Pangan b) Hasil Perkebunan c) Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan 2) Industri Minuman dan Tembakau a) Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan b) Hasil Tembakau c) Hasil Susu dan Minuman Lainnya	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		B. Industri Kecil Dan Menengah 1) Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan a) Pangan b) Industri Kimia dan Bahan Bangunan 2) Industri Kerajinan dan Sandang a) Kerajinan b) Sandang	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		C. Rekomendasi penerbitan/perpanjangan Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri;	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		HAK DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL				
		A. Industri Agro				
		1) Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait
		a) Hasil Tanaman Pangan				
		b) Hasil Perkebunan				
		c) Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan				
		2) Industri Minuman dan Tembaku				
		a) Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan				
		b) Hasil Tembaku				
		c) Hasil Susu dan Minuman Lainnya				
		B. Industri Kecil Dan Menengah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		1) Industri Kimia, Pangan, dan Bahan Bangunan				
		a) Pangan				
		b) Industri Kimia dan Bahan Bangunan				
		2) Industri Kerajinan dan Sandang				
		a) Kerajinan				
		b) Sandang				

b

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		INDUSTRI HIJAU				
		A. Industri Agro	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		1) Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan				
		a) Hasil Tanaman Pangan				
		b) Hasil Perkebunan				
		c) Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan				
		2) Industri Minuman dan Tembakau				
		a) Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan				
		b) Hasil Tembakau				
		c) Hasil Susu dan Minuman Lainnya				
		B. Industri Kecil Dan Menengah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		1) Industri Kimia, Pangan, dan Bahan Bangunan				
		a) Pangan				
		b) Industri Kimia dan Bahan Bangunan				
		2) Industri Kerajinan dan Sandang				
		a) Kerajinan				
		b) Sandang				
		ANALISIS INDUSTRI UNGGULAN	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		MONITORING DAN EVALUASI KOMPETENSI INTI INDUSTRI				
		PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG				
		FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI				
		STANDARISASI				
		A. Standar				
		1) Standar Industri Manufaktur				
		2) Standar Industri Agro dan Teknologi Tinggi				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		B. Penyiapan Penerapan 1) Penyiapan Penerapan Standar 2) Kerja sama Standarisasi C. Infrastruktur Standar 1) Pengembangan Infrastruktur Standar 2) Pengawasan Lembaga Penilaian Kesuaian PENGKAJIAN KEBIJAKAN DAN IKLIM USAHA INDUSTRI				
		A. Kebijakan Industri 1) Kebijakan Sektoral 2) Kebijakan Kewilayahan B. Perpajakan dan Tarif 1) Perpajakan dan Tarif 2) Tarif dan Non Tarif C. Pengembangan Model Industrial 1) Pemrograman Model 2) Aplikasi Model PENGKAJIAN INDUSTRI HIJAU DAN LINGKUNGAN HIDUP	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		A. Industri Hijau 1) Pengembangan Industri Hijau 2) Kerja Sama Industri Hijau B. Lingkungan Hidup 1) Lingkungan Global 2) Pengendalian Lingkungan Hidup C. Energi 1) Konservasi Energi 2) Diversifikasi Energi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		TEKNOLOGI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				
		A. Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri 1) Pengkajian Kebijakan Teknologi Industri 2) Penerapan Kebijakan Teknologi Industri	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
		B. Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri 1) Pengkajian Inovasi Teknologi Industri 2) Penerapan Inovasi Teknologi Industri				
		C. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual 1) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 2) Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual				
31	550	PERHUBUNGAN Kebijakan mengenai Perhubungan Darat 1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2. Penyiapan kebijakan 3. Perumusan dan penyusunan bahan 4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5. Penetapan dalam bentuk NSPK	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PERHUBUNGAN DARAT				
		A. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				
		1) Jaringan Transportasi Jalan : a) Jaringan Prasarana dan Pelayanan : Penentuan lokasi pelataran parkir - Penentuan lokasi terminal penumpang tipe C - Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal tipe C - Jaringan lintas pada jaringan jalan kota - Penetapan kelas jalan kota - Jaringan transportasi jalan kota b) Pengembangan Transportasi Jalan : - Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan - Pengembangan transportasi jalan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		2) Sarana Angkutan Jalan a) Pengujian Kendaraan Bermotor - Kartu Induk kendaraan bermotor - Hasil uji kendaraan bermotor - Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor - Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor - Harmonisasi dan standarisasi regulasi kendaraan bermotor	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3) Lalu lintas jalan a) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas : - Analisa dampak lalu lintas jalan kota - Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota b) Perlengkapan Jalan : - Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kota	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		4) Angkutan jalan a) Angkutan Penumpang : - Tarif angkutan perkotaan - Izin trayek angkutan penumpang kota - Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum - Pemberian subsidi angkutan umum - Penghargaan perusahaan angkutan umum b) Angkutan Barang : - Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		5) Pengendalian Operasional a) Monitoring Operasional : - Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan b) Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai - Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) - Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		B. Bina Sistem Transportasi Perkotaan				
		1) Jaringan Transportasi Perkotaan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		a) Transportasi perkotaan yang berbasis jalan kota b) Sistem Informasi Manajemen (SIM) jaringan transportasi perkotaan				
		2) Lalu Lintas Perkotaan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		a) Manajemen dan rekayasa lalu lintas b) Manajemen dan rekayasa lalu lintas c) Penanganan lalu lintas perkotaan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3) Angkutan Perkotaan a) Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek b) Jaring c) Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek kota	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		4) Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan a) Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang b) Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan c) Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan d) Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan kota dalam kawasan kota e) Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan kota dalam kawasan perkotaan f) Masterplan transportasi perkotaan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		C. Keselamatan Transportasi Darat		(5)	(6)	(7)
		1) Manajemen Keselamatan a) Monitoring dan Evaluasi : - Monitoring dan evaluasi data kecelakaan - Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan b) Pengembangan Keselamatan : - Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan - Harmonisasi kebijakan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		2) Promosi dan Kemitraan Keselamatan a) Promosi : - Promosi keselamatan - Penyuluhan, publikasi dan deseminasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan b) Kemitraan : - Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3) Bina Keselamatan Angkutan Umum a) Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum : b) Keselamatan awak kendaraan angkutan umum	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		4) Audit dan Inspeksi Keselamatan a) Audit Keselamatan : - Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan - Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta laik fungsi jalan b) Inspeksi Keselamatan : - Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan - Investigasi kecelakaan serta laik fungsi jalan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
32	555	TELEKOMUNIKASI KEBIJAKAN - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyediaan bahan - Perumus Kebijakan - Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan - Penetapan dalam bentuk NSPK	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		APLIKASI INFORMATIKA				
		1 E-Government a) Tata Kelola <i>E-Government</i> - Program <i>E-Government</i> - Evaluasi <i>E-Government</i> b) Teknologi dan Infrastruktur <i>E-Government</i> - Teknologi <i>E-Government</i> - Infrastruktur <i>E-Government</i> - <i>Blue print</i> Jaringan Pemerintah Kota - <i>Blue Print Intra Government</i> tingkat kota c) Interoperabilitas dan Interkonektivitas <i>E-Government</i> - Interoperabilitas <i>E-Government</i> - Interkonektivitas <i>E-Government</i> - Meta Data Kependudukan (Ontologi Data Instalasi Pemerintah) d) Aplikasi Layanan Pemerintahan - Aplikasi Layanan Pemerintahan Pusat - Aplikasi Layanan Pemerintahan Daerah - Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendaftaran dan Perubahan Data Domain go.id - Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Layanan Pemerintahan	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		e) Aplikasi Layanan Publik - Inisiasi Aplikasi Layanan Publik - Fasilitasi Aplikasi Layanan Publik - Pelaksanaan Pengelolaan Portal layanan Publik Daerah - Pelaksanaan Kegiatan dan Rekomendasi FGD Portal Layanan Publik Daerah - Pelaksanaan Kegiatan dan Rekomendasi FGD Inisiasi dan Fasilitasi Pengembangan - Pelaksanaan Koordinasi Pembahasan Inisiasi dan Fasilitasi Aplikasi layanan - Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi <i>Back office</i> - Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi Portal - Pengembangan Aplikasi - Pengembangan Portal Layanan Publik	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		2. <i>E-Business</i> a) Tata Kelola <i>E-Business</i> - Program <i>E-Business</i> - Evaluasi <i>E-Business</i> - Sosialisasi <i>E-Business</i> - Evaluasi dan Monitoring <i>E-Business</i> - Peningkatan Tata Kelola <i>E-Business</i> b) Teknologi dan Infrastruktur <i>E-Business</i> - Teknologi <i>E-Business</i> - Infrastruktur <i>E-Business</i>	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) - Peningkatan <i>E-Business</i> - Sistem Aplikasi Implementasi Fasilitas Teknologi <i>E-Business</i> c) Interoperabilitas dan Interkoneksi <i>E-Business</i> - Interoperabilitas <i>E-Business</i> - Interkoneksi <i>E-Business</i> - Fasilitas dan Pendampingan Infrastruktur <i>E-Business</i> - Forum Komunikasi Nama Domain d) Aplikasi Layanan <i>E-Business</i> - Bidang Usaha Kecil dan Mikro - Bidang Usaha Menengah dan Besar - Advokasi transformasi Usaha Mikro - Pengelolaan dan Peningkatan <i>High</i>				
	3	Pemberdayaan Informatika a) Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan - Perancangan Model - Penerapan Model - Pengukuhan Relawan TIK	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Promosi ICT melalui Media TV, Radio, Cetak - Pembuatan Modul Relawan/Panduan TIK - Pembuatan <i>Leaflet</i>, Booklet Relawan TIK - Perencanaan <i>IT Volunteer</i> (ITU/NIA)- <i>Korea IT Volunteer</i> (KIV) - <i>Masterplan Green ICT</i> - Strategi Kebijakan Pemberdayaan Informatika b) Pemberdayaan Informatika Masyarakat Khusus - Perancangan Model - Penerapan Model - Penyediaan CAP untuk Masyarakat khusus (Perempuan, Pramuka, <i>Difabel People</i>) - Penyediaan E-Dokumen - Pengarasutamaan Gender - Pemuda sadar TIK				
	4	Pemberdayaan Industri Informatika a) Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika - Pemberdayaan - Promosi - Buku/DVD Panduan Inkubator	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		b) Industri Konten Multimedia - Pemberdayaan - Pengembangan produk - <i>Free Open Source Software (FOSS)</i> - Master CD Sistem Operasi <i>Free open Source Software (FOSS)</i> - Master CD Kompilasi <i>Free Open Source Software (FOSS)</i>				
		5 Keamanan Informasi a) Tata Kelola Keamanan Informasi - Kelembagaan - Manajemen Resiko - Program Komunikasi Publik - Monitoring dan Evaluasi b) Teknologi Keamanan Informasi - Infrastruktur - Aplikasi c) Monitoring, Evaluasi, dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi - Infrastruktur - Aplikasi d) Penyidikan dan Penindakan - Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi - Tanggap Darurat Peristiwa Keamanan Informasi e) Budaya Keamanan Informasi	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
		1 Tata Kelola Komunikasi Publik a) Program Komunikasi Publik b) Monitoring dan Evaluasi c) Sosialisasi dan Diseminasi Kebijakan Pemerintah d) <i>Public Service Obligation</i> (PSO) Bidang Pers e) Penyusunan Instrumen Evaluasi Media Center	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		2 Pengelolaan Opini Publik a) Pengumpulan Opini Publik b) Pengolahan Opini Publik c) Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		3 Layanan Komunikasi Publik a) Pengumpulan Data b) Pengolahan Data c) Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		4 Pengolahan dan Penyediaan Informasi a) Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan - Informasi Kesejahteraan Rakyat - Hukum dan Hak Asasi Manusia b) Informasi Perekonomian - Keuangan, Perbankan, dan Jasa	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Industri dan Perdagangan c) Informasi Kesejahteraan Rakyat - Agama, Sosial, dan Budaya - Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup d) Dialog Interaktif di Televisi dan Radio e) Iklan Layanan Masyarakat/<i>Public Service Advertisement</i> (PSA) f) Pagelaran Pertunjukan Rakyat (Pertunjukan rakyat)/Seni Tradisional g) Pengumpulan dan Pengolahan Database Informasi Publik h) Analisis Konten Media/Serita (<i>Media Content Analysis</i>/MCA (Media Televisi, Media Cetak, Pembuatan Film Dokumenter i) Diskusi Publik di Media Televisi k) Paket Informasi Publik berupa buku panduan, pedoman, dll. l) Layanan Telepon Sahabat Anak 129 m) <i>Event</i> Kota n) Ikrar/Petisi o) Media Tercetak - Buku Panduan - Desain, Naskah, <i>Lay Out</i> Jurnal, Tabloid, - Desain Stiker <i>Event</i> Nasional				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		p) Media Audio Video dan Luar Ruang - Penyusunan <i>Media Content</i> - Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Media Pertunjukan Rakyat q) Bukti Terbit Media - Laporan Bukti Penerbitan Serita - Hasil Dokumentasi Media Partner dalam kegiatan				
		5 Pengelolaan Media Publik - Media Cetak - Media Online - Media Luar Ruang dan Audio Visual - Sosialisasi - Harkitnas - Pengumpulan data Audio Visual - Ketersediaan poster - Pengelolaan Media Center - Penanganan arus mudik Lebaran - <i>Workshop</i> - PPID - Expo - Pameran - Bakohumas - Idhul Fitri/ Idhul Adha - Hari Nusantara - Upacara - Indonesia ICT Award (INAICTA): ajang - Media Cetak - Media Online	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Media Luar Ruang dan Audio Visual				
	6	Kemitraan Komunikasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		a) Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara				
		- Program Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara				
		- Monitoring dan Evaluasi				
	b)	Kemitraan Media dan Dunia Usaha				
		- Program Kemitraan Media dan Dunia Usaha				
		- Monitoring dan Evaluasi				
	c)	Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi				
		- Program Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi				
		- Monitoring dan Evaluasi				
		PUSAT DATA DAN SARANA INFORMATIKA				
	1	Infrastruktur Informatika	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
		a) Jaringan				
		b) Piranti Teknologi Informatika				
		c) Keamanan Informatika				
	2	Sistem dan Data				
		a) Portal dan Konten				
		b) Pengumpulan dan Pengolahan Data				
		c) Pengembangan Aplikasi				
	3	Pusat Kerjasama				
		a) Kerja Sama Regional				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, dan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Penyelenggaraan Publik Regional Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika dan Informasi, dan Komunikasi - Investasi dan Pasar Teknologi Informasi dan Komunikasi Regional				
		4 Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat a) Pelayanan Informasi - Media Baru - Media Konvensional - Dokumentasi dan Perpustakaan b) Hubungan Masyarakat - Publikasi - Analisis Berita dan Pengelolaan Opini Publik - Hubungan Internal dan Eksternal c) Bimbingan Teknis - Bimbingan Sumber Daya dan Perangkat d) Evaluasi - Evaluasi Sumber Daya dan Perangkat Informatika, Penyelenggaraan Informatika, Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Data dan Sarana informatika, Informasi dan Humas	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33	556	PARIWISATA DAN REKREASI				
		KEBIJAKAN Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi kebijakan dibidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi:	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK				
		PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 1 Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata a Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata b Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata c Pengembangan Zona Kreatif 1) Zona Kreatif Berbasis Seni dan Budaya 2) Zona Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		d Invetasi Pariwisata 1) Pengembangan Potensi Investasi 2) Promosi Investasi				
		2 Pengembangan Daya Tarik Wisata a Bimtek Daya Tarik Wisata b Fasilitas Pengembangan Daya Tarik Wisata c Pengembangan daya tarik wisata kota pusaka d Penilaian Kelayakan Tugas Pembantuan e Penghargaan Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Cipta Award)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		3 Industri Pariwisata a Sarana Pariwisata 1) usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata 2) penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman dan spa. b Jasa Pariwisata: 1) jasa transportasi wisata 2) jasa informasi pariwisata 3) penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi 4) jasa perjalanan wisata 5) jasa konsultan pariwisata 6) jasa pramuwisata dan penyelenggaraan 7) insentif 8) konvensi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		9) pameran c Pengembangan Produk dan Pelayanan				
		4 Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata a Perancangan dan Pemantauan Pemberdayaan Pariwisata b Kemitraan dan Kelembagaan Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		5 Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event a Pengembangan Wisata Kulier dan Belanja b Pengembangan Rekreasi dan Hiburan 1) Pengembangan Wisata Spa dan Kesehatan 2) Pengembangan Wisata Olah Raga c Pengembangan Budaya d Pengembangan Wisata Konvensi, Insentif dan Event	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		PEMASARAN PARIWISATA 1. Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata a Informasi Pasar Dalam Negeri 1) Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri 2) Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		b Hubungan Lembaga Pariwisata dan Widya Wisata 1) Hubungan Lembaga Pariwisata 2) Widya Wisata c Perancangan Pemasaran Pariwisata 1) Perancangan Pemasaran Dalam Negeri				
		2 Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		3 Promosi Konvensi, Insentif, Event, dan Minat Khusus a Promosi KIE Pemerintah dan Non Pemerintah 1) Pemerintah 2) Non Pemerintah b Promosi Minat Khusus 1) Wisata Non Bahari	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI DAN BUDAYA				
		1 Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik a Pengembangan Seni Pertunjukan 1) Kreasi dan Produksi Seni Pertunjukan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) Fasilitas Pengembangan Seni Pertunjukan b Pengembangan Industri Musik 1) Kreasi dan Produksi Musik 2) Fasilitas Pengembangan Industri Musik c Pemasaran Seni Pertunjukan dan Industri Musik d Infrastruktur dan Dokumentasi Seni Pertunjukan dan Industri Musik 1) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertunjukan 2) Dokumentasi dan Publikasi				
		2 Pengembangan Seni Rupa a Pengembangan Seni Rupa Murni, Seni Rupa Terapan, Fotografi 1) Kreasi dan Produksi Karya Seni 2) Fasilitas Pengembangan Seni Pemasaran dan Pengembangan Apresiasi b Distribusi dan Komersialisasi Karya Seni 2) Apresiasi Karya Seni Rupa	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		EKONOMI KREATIF BERBASIS MEDIA, DESAIN, DAN IPTEK				
		1 Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media a Pengembangan Film Animasi dan Komik b Pengembangan Tulisan Fiksi dan Non Fiksi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		c Pengembangan Karya Kreatif Audio dan Video				
		d Pengembangan Karya Kreatif Periklanan				
		1) Iklan Cetak 2) Iklan Elektronik				
		2 Desain dan Arsitektur	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolahan terkait
		a Arsitektur dan Desain Interior				
		b Komunikasi Visual				
		1) Desain Grafis				
		2) Komunikasi Visual				
		c Desain Produk dan Kemasan				
		d Mode				
		1) Desain Busana				
		2) Desain Non Busana				
		3 Kerjasama dan Fasilitasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		a Lisensi Teknologi				
		1) Pengembangan Teknologi				
		2) Pemanfaatan Teknologi				
		b Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis				
		1) Pengembangan Sentra Inovasi				
		2) Pengembangan Inkubator Bisnis				
		c Sentra Kreatif				
		1) Pengembangan Sentra Kreatif				
		2) Pengelolaan Sentra Kreatif				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
		1 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan dan ekonomi kreatif - a Program dan Evaluasi - b Data dan Publikasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		2 Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif - a Program dan Evaluasi - b Penyelenggaraan dan Kerjasama				
		3 Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif - a Program dan Evaluasi - b Evaluasi dan Kerjasama				
34	560	TENAGA KERJA				
		PERUMUSAN KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Perencanaan Tenaga Kerja, Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan bahan 3 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 4 Pengumpulan dan pengolahan data	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		5 Penetapan dalam bentuk pengaturan berupa norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK)				
		PERENCANAAN TENAGA KERJA				
		1 Perencanaan Tenaga Kerja Makro				
		a Perencanaan Tenaga Kerja Daerah				
		1) Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah				
		2) Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah				
		3) Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah				
		2 Perencanaan Tenaga Kerja Mikro	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		a Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah				
		1) Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah				
		2) Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah				
		3) Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah				
		b Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		1) Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Swasta				

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		2) Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta 3) Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta c Bursa Kerja 1) Bursa Kerja Dalam Negeri 2) Bursa Kerja Luar Negeri				
		PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA 1 Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri a Antar Kerja 1) Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) / Antar Kerja Lokal (AKL) b Pemberdayaan Pengantar Kerja 1) Pengembangan Kompetensi Pengantar Kerja 2) Kerjasama antar Lembaga 2 Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri a Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 1) Rekomendasi Penyiapan dan Dokumen Penempatan TKI b Fasilitas Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 1) Advokasi dan Kepulangan 2) Sarana dan Perlindungan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3 Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal a Tenaga Kerja Mandiri dan Sektor Informal 1) Tenaga Kerja Mandiri 2) Tenaga Kerja Sektor Informal b Pengembangan Padat Karya 1) Padat Karya Perdesaan 2) Padat Karya Perkotaan c Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga 1) Pemberdayaan Pendampingan 2) Kerjasama Antar Lembaga	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		4 Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing a Analisis dan Perizinan Sektor Industri 1) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri b Analisis 1) Rencana Pembangunan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA				
		1 Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi a Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama 1) Peraturan Perusahaan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) Perjanjian Kerja Bersama b Perjanjian Kerja c Kesejahteraan Pekerja 1) Program Kesejahteraan 2) Fasilitas Kesejahteraan d Analisis 1) Penanggulangan Diskriminasi Syarat Kerja 2) Evaluasi Diskriminasi Syarat Kerja				
		2 Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial a Organisasi Pekerja dan Pengusaha 1) Organisasi Pekerja 2) Organisasi Pengusaha b Kelembagaan Hubungan Industrial 1) Lembaga Kerjasama BIPARTIT 2) Lembaga Kerjasama TRIPARTIT c Pemasarakatan Hubungan Industrial 1) Penyiapan Masyarakat Materi Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial 2) Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		3 Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial a Pengupahan 1) Penerapan Standar Pengupahan 2) Pengurusan Pengupahan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		b Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja 1) Pengurusan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja 2) Kepesertaan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja				
		4 Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial a Pencegal 1) Pencegahan Dini 2) Penanganan Mogok dan Penutupan Perusahaan b Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 1) Pengurusan Perselisihan Hubungan Industrial 2) Evaluasi dan Pelaporan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 1 Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) a Pengkajian K3 1) Analisis dan Standardisasi bidang K3 2) Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3 b Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2 Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 a SDM K3 1) Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 2) Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 b Kompetensi K3 1) Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 2) Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 3) Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 4) Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
35	570	PERMODALAN				
		KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Perencanaan Penanaman Modal, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal meliputi: 1 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan 2 Penyiapan Kebijakan 3 Perumusan Kebijakan 4 Masukan dan Dukungan Kebijakan 5 Penetapan NSPK	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		PERENCANAAN PENANAMAN MODAL 1 Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya a Agribisnis 1) Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan 2) Kelautan, Perikanan dan Peternakan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		2 Perencanaan Jasa dan Kawasan a Jasa Perdagangan dan Pariwisata 1) Jasa Perdagangan 2) Jasa Pariwisata b Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Jasa Lainnya	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1) Jasa Kesehatan, Pendidikan, dan Ketenagakerjaan 2) Jasa Lainnya				
		3 Perencanaan Infrastruktur a Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan, dan Jembatan 1) Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkeretaapian 2) Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
		1 Deregulasi Penanaman Modal a Sektor Primer 1) Pertanian dan Perikanan b Sektor Sekunder 1) Industri Transportasi dan Telematika 2) Industri Agro c Sektor Tersier 1) Pariwisata, Perdagangan dan Telekomunikasi 2) Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Jasa Lainnya	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		2 Pengembangan Potensi Daerah a Sektor Primer dan Tersier 1) Sektor Primer 2) Sektor Tersier b Sektor Sekunder 1) Sektor Agro	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		3 Pemberdayaan Usaha a Pembinaan dan Penyuluhan 1) Pembinaan 2) Penyuluhan 3) Sektor Sekunder b Pelayanan Usaha 1) Sektor Primer dan Tersier 2) Sektor Sekunder	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		PROMOSI PENANAMAN MODAL				
		1 Pengembangan Promosi a Analisis Strategi Promosi 1) Analisis Target Promosi 2) Analisis Daya Saing Promosi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		2 Promosi Sektoral a Promosi Industri Sumber Daya Alam, Jasa dan Kawasan 1) Industri Sumber Daya Alam 2) Jasa dan Kawasan b Promosi Industri Manufaktur 1) Industri Barang Logam dan Elektronik 2) Industri Manufaktur Lainnya c Promosi Infrastruktur 1) Infrastruktur Transportasi, Jalan, dan Jembatan 2) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Infrastruktur Lainnya	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

f

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		3 Fasilitasi Promosi Daerah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		4 Pameran dan Sarana Promosi a Pameran 1) Penyusunan Program dan Monitoring 2) Penyelenggaraan dan Evaluasi b Media Cetak 1) Materi Promosi 2) Publikasi dan Distribusi c Media Elektronik 1) Materi Promosi 2) Pelayanan Informasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
		1 Pelayanan Aplikasi Sistem Informasi Cerdas layanan Perijinan Terpadu Untuk publik	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		2 Pelayanan Perizinan a Perizinan Sektor Primer dan Tersier 1) Pertanian, Peternakan, Pariwisata dan Prasarana 2) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi 3) Aneka Jasa	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		b Perizinan Sektor Sekunder 1) Industri Mesin, Logam dan Barang Logam 2) Industri Kimia dan Barang Kimia 3) Industri Aneka				
		3 Pelayanan Fasilitas a Perizinan Sektor Primer dan Tersier 1) Pertanian, Peternakan, Pariwisata dan Prasarana 2) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi 3) Aneka Jasa b Perizinan Sektor Sekunder 1) Industri Mesin, Logam dan Barang Logam 2) Industri Kimia dan Barang Kimia 3) Industri Aneka	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
		1 Pemantauan Penanaman Modal 2 Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal 3 Fasilitas Penyelesaian Masalah 4 Pengawasan Penanaman Modal 5 Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		6 Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal				
36	600	PEKERJAAN UMUM Perumusan Kebijakan Teknis dan Strategi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi: Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Marga, Bina Konstruksi, Penyediaan Perumahan, Pembiayaan Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyusunan kebijakan 3 Perumusan kebijakan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		SUMBER DAYA AIR 1 Bina Penatagunaan Sumber Daya Air a Perencanaan Wilayah Sungai 1) Pengelolaan sumber daya air wilayah sungai 2) Bimbingan teknis dan supervisi 3) Pelaporan b Pengaturan dan Pemantauan 1) Pemantauan dan evaluasi penggunaan sumber daya air	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		c Pemanfaatan Sumber Daya Air 1) Perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air		(5)	(6)	(7)
		2 Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air a Perencanaan Sumber Daya Air 1) Evaluasi Kelayakan pengembangan sumber daya air b Keterpaduan Pemrograman c Informasi dan Data Sumber Daya Air 1) Pengembangan sistem informasi 2) Pengelolaan data dan informasi 3 Sungai a Pembinaan pengendalian konstruksi dan pengelolaan drainase utama perkotaan b Pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana c Perencanaan sungai d Pengelolaan drainase utama perkotaan e Pemantauan, evaluasi dan pelaporan	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		f Hasil audit konstruksi g Dokumen detail desain konstruksi sungai h Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
		4 Irigasi a Pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana b Pembinaan pengelolaan irigasi c Dokumen detail desain konstruksi irigasi d Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan e Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1) Pembinaan pengelolaan operasi dan pemeliharaan dan pemberdayaan 2) Bimbingan teknis dan supervisi 3) pemeliharaan sarana dan prasarana 4) Operasi dan pemeliharaan sumber daya air	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
		5 Bina operasi dan sistem pemeliharaan a Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai 1) Pembinaan pengelolaan operasi dan pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat 2) Bimbingan teknis dan supervisi 3) Pemeliharaan sarana dan prasarana				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		4) Operasi dan pemeliharaan sumber daya air 5) Audit teknis				
		BINA MARGA				
		1 Pengembangan Jaringan Jalan a Perencanaan dan Sistem Jaringan 1) Perencanaan Strategis 2) Sistem Jaringan b Program dan anggaran penyelenggaraan jalan c Pengembangan Aplikasi Manajemen Jalan 1) Analisa Data Jalan dan Jembatan Daerah 2) Pengembangan Sistem Jalan dan Jembatan Daerah 3) Pengelolaan data dan Informasi d Lingkungan dan Keselamatan Jalan 1) Teknik lingkungan bidang jalan 2) Keselamatan Jalan e Pemantauan dan evaluasi 1) Pemantauan 2) Evaluasi dan pelaporan	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
			Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		2 Pembangunan Jalan a Geometrik, Perkerasan dan Drainase 1) Pembinaan perencanaan teknik geometrik jalan 2) Pengembangan identifikasi kondisi dan kerusakan jalan 3) Pembinaan pelaksanaan teknologi bahan 4) Pembinaan perencanaan dan pelaksanaan teknis konstruksi 5) Pembinaan penerapan teknik jalan kategori khusus, teknologi baru dan pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Jalan b Pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan analisis Keselamatan Kerja 1) Rekomendasi dan penetapan laik fungsi jalan 2) Evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan jalan 3) Preservasi Jalan a Perencanaan dan Pemrograman 1) Pengolahan, analisis dan validasi data alan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
			Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) Pembinaan teknis survey jalan 3) Bimbingan teknis perencanaan program preservasi jalan 4) Fasilitasi pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan 5) Pengaturan penyediaan, pemantauan pengendalian dan evaluasi pemanfaatan 6) Pemenuhan serta pembinaan manajemen pemeliharaan dan pemanfaatan bahan 7) Koordinasi dan penilaian usulan program dan anggaran 8) Pembinaan penyiapan bahan usulan penyusunan program 9) Fasilitasi Unit Pengelola Dana 10) Pembinaan manajemen pelaksanaan konstruksi 11) Pengembangan teknologi bahan dan peralatan 12) Pembinaan teknis pengelolaan pengendalian Mitigasi Bencana Alam 13) Pengelolaan pengendalian Mitigasi Bencana Alam 14) Pemantauan penanganan rawan kecelakaan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		b Teknik Rekonstruksi dan Berkala Jalan 1) Pembinaan program, penyediaan konsultasi perencanaan 2) Pengendalian program dan penyediaan konsultasi teknis rekonstruksi dan 3) Pembinaan penyusunan program pelaksanaan teknis 4) Pembinaan teknis penerapan teknologi bahan perkerasan 5) Penerapan teknologi bahan perkerasan 6) Pembinaan pelaksanaan program dan pengendalian 7) Pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan jalan c Teknik Pemeliharaan Rutin Jalan 1) Penyusunan, pembinaan dan pengembangan teknis perencanaan 2) Pengendalian program dan penyediaan konsultasi perencanaan teknis 3) Pembinaan penyusunan program pelaksanaan teknis 4) Pembinaan teknis penerapan teknologi bahan perkerasan 5) Penerapan teknologi bahan perkerasan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		6) Pembinaan pelaksanaan program dan pengendalian d Pemantauan dan Evaluasi 1) Pemantauan 2) Evaluasi				
		4 Jembatan a Perencanaan dan Pemrograman 1) Pengolahan, analisis dan validasi data jembatan daerah 2) Pengumpulan dan evaluasi biaya penanganan jembatan 3) Penyusunan usulan program dan anggaran tahunan dan jangka menengah penyelenggaraan jembatan 4) Koordinasi dan penilaian usulan program dan anggaran penyelenggaraan jembatan 5) Penyiapan kebutuhan dan anggaran serta pengeluaran bahan dan peralatan jembatan 6) Pembinaan dan bantuan teknik Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pembangunan dan 7) Pelaksanaan pengujian mutu konstruksi b Pemantauan dan Evaluasi 1) Pemantauan 2) Evaluasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		5 Jalan Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah a Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah 1) Penilaian, koordinasi dan fasilitasi usulan program penanganan jalan daerah yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana pusat lainnya 2) Rencana pengendalian program jalan daerah dan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan 3) Pengolahan, analisis dan validasi data manajemen jalan daerah 4) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jalan daerah serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana masyarakat untuk penyelenggaraan jalan daerah b Bimbingan Teknik Jalan Daerah 1) Perencanaan daerah beserta konektivitas jaringan jalan 2) Pemrograman jalan beserta konektivitas jaringan jalan 3) Pelaksanaan jalan daerah beserta konektivitas jaringan jalan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		c Pengendalian pelaksanaan jalan daerah beserta konektivitas jaringan jalan d Pengadaan Tanah 1) Perencanaan dan pemrograman 2) Inventarisasi dan pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah 3) Prosedur kerja dan fasilitasi sosialisasi pengadaan tanah 4) Sertifikasi hasil pengadaan tanah 5) Pembinaan pelaksanaan studi pembebasan tanah 6) Pengamanan aset hasil pembebasan lahan 7) Koordinasi dan fasilitasi pengadaan tanah				
		CIPTA KARYA 1 Keterpaduan Infrastruktur Permukiman a Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan 1) Keterpaduan perencanaan pembangunan 2) Fasilitasi kemitraan b Keterpaduan Pembiayaan 1) Penyusunan keterpaduan program dan pembiayaan tahunan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) Fasilitasi penyiapan program keterpaduan pembiayaan anggaran tahunan 3) Fasilitasi pengembangan pembiayaan lainnya c Keterpaduan Pelaksanaan 1) Fasilitasi keterpaduan pelaksanaan pembangunan dan anggaran tahun berialan 2) Pemantauan dan pelaporan d Pengelolaan Data dan Sistem Informasi 1) Pengelolaan data 2) Pengembangan sistem informasi e Pemantauan dan Evaluasi 1) Pengembangan kawasan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan 2) Pengembangan sistem penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman				
	2	Pengembangan Kawasan Permukiman a Perencanaan Teknis 1) Pemantauan dan evaluasi 2) Pengelolaan data dan informasi 3) Penyebarluasan informasi b Kawasan Permukiman Perkotaan 1) Pelaksanaan pembangunan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan 3) Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset dan pengembangan jaringan kemitraan c Kawasan Permukiman Khusus 1) Pembangunan kawasan tertentu 2) Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan tertentu 3) Fasilitasi penyediaan tanah, implementasi inovasi dan pengembangan jaringan kemitraan d Standarisasi dan Kelembagaan 1) Standarisasi Pengembangan Kawasan Permukiman 2) Kelembagaan, sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat Pemantauan dan evaluasi 3) Pemantauan dan evaluasi 3 Bina Penataan Bangunan a Perencanaan Teknis 1) Penyusunan rencana 2) Pemantauan dan evaluasi 3) Pengelolaan data dan informasi 4) Penyebarluasan informasi 5) Analisa Teknis				
			Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		b Penataan Bangunan Gedung Umum dan Gedung Negara 1) Bimbingan dan bantuan teknis 2) Supervisi 3) Pengembangan jejaring kemitraan 4) Pengelolaan sistem informasi 5) Fasilitasi pembangunan gedung istana kepresidenan c Pengelolaan Rumah Negara 1) Bimbingan Teknis dan supervisi penyelenggaraan rumah negara 2) Layanan Data dan Informasi 3) Pendaftaran pengalihan status Rumah Negara d Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus 1) Pembangunan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, ruang terbuka hijau, serta kawasan tematik perkotaan dan kawasan khusus lainnya				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, ruang terbuka hijau, serta kawasan tematik perkotaan dan kawasan khusus lainnya 3) Inventarisasi data dan pengembangan jaringan kemitraan e Standarisasi dan Kelembagaan 1) Fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan 2) Pelembagaan pengaturan 3) Pengembangan jejaring kemitraan 4) Pembinaan sumber daya manusia				
		4 a Perencanaan Teknis 1) Analisa Teknis 2) Pengelolaan data dan informasi 3) Bimbingan Teknis Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum 4) Evaluasi dan Pelaporan b Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan 1) Pelaksanaan pembangunan 2) Bimbingan teknis dan supervisi 3) Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset dan pengembangan jaringan kemitraan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		c Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan 1) Pelaksanaan pembangunan 2) Bimbingan teknis dan supervisi 3) Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset dan pengembangan jaringan kemitraan d Sistem Penyediaan Air Minum Khusus 1) Pembangunan pengembangan kawasan rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu 2) Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan , rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu 3) Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset dan pengembangan jaringan kemitraan e Standarisasi dan Kelembagaan 1) Standarisasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum 2) Kelembagaan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum 3) Bimbingan Teknis Pemberdayaan 4) Pemantauan dan evaluasi f Fasilitasi dan penyebarluasan penerapan teknologi rancang bangun pengolahan sistem penyediaan air minum	(4)	(5)	(6)	(7)

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		g Pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja bidang air minum				
		5 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman - a Perencanaan Teknis 1) Analisa Teknis 2) Pengelolaan data dan informasi 3) Bimbingan Teknis Perencanaan Sistem 4) Evaluasi dan Pelaporan - b Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus 1) Pembangunan pengembangan kawasan rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu 2) Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu 3) Fasilitas penyediaan tanah, serah terima aset, implementasi inovasi dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah, drainase, dan persampahan - c Standarisasi dan Kelembagaan 1) Standarisasi penyelenggaraan sistem air limbah, drainase 2) Kelembagaan penyelenggaraan sistem air limbah, drainase	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3) Bimbingan Teknis Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman 4) Pemantauan dan evaluasi d Fasilitasi dan penyebarluasan penerapan teknologi rancang bangun pengolahan sistem penyehatan lingkungan permukiman				
		6 Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum a Penilaian kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Daerah b Fasilitasi peningkatan kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Daerah c Pemberian rekomendasi 1) Peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum 2) Keseimbangan kepentingan antara penyelenggaraan dengan pelanggan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

1

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PENYEDIAAN PERUMAHAN				
		1 Perencanaan Penyediaan Perumahan a Keterpaduan Perencanaan 1) Koordinasi dan Keterpaduan Perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan rencana kerja pemerintah tahunan 2) Bimbingan Perencanaan b Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian 1) Skala kota 2) Bukan skala besar c Kemitraan dan kelembagaan 1) Kemitraan dengan lembaga pemerintah 2) Pembinaan kelembagaan d Pengelolaan Data dan Informasi e Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		2 Penyediaan Rumah Susun a Perencanaan Teknik 1) Analisa teknik 2) Penyusunan rencana b Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi c Penghunian dan pengelolaan rumah susun	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1) Fasilitasi penghunian, pengalihan dan pemanfaatan 2) Fasilitasi pengelolaan				
		3 Penyediaan Rumah Khusus a Perencanaan teknis rumah tapak khusus 1) Analisa teknik 2) Penyusunan rencana b Penyediaan Rumah Tapak Khusus dan Rumah Tapak Negara c Pengelolaan Rumah Tapak Khusus 1) Pengelolaan aset 2) Fasilitasi pengelolaan d Bimbingan teknis dan supervisi e Pemantauan dan Evaluasi 1) Penyusunan pedoman evaluasi kinerja 2) Pemantauan dan evaluasi kinerja 3) Pembinaan dan pelaksanaan evaluasi 4) Pengolahan informasi dan isu-isu strategis 5) Fasilitasi evaluasi kinerja 6) Penyusunan laporan kinerja	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		4 Penyediaan Rumah Swadaya - a Rencana Teknik dan Standardisasi - b Fasilitasi <i>backlog</i> swadaya dan rumah tidak layak huni 1) Pendataan dan verifikasi data 2) Pemberdayaan masyarakat 3) Akses kemitraan - c Pelaksanaan dan pendampingan pemberian bantuan stimulan - d Pemantauan, evaluasi dan pelaporan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		5 Penyediaan Rumah Umum dan Komersial - a Perencanaan teknik dan evaluasi - b Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi - c Pemberian bantuan Teknis dan Supervisi - d Fasilitasi dibidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial 1) Fasilitasi pelaksanaan hunian berimbang pada rumah tinggal dan deret serta 2) Fasilitasi penyediaan lahan pembangunan perumahan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		BINA KONTRUKSI				
		1 Bina Investasi Insfrastuktur a Pembinaan Kebijakan Investasi Infrastruktur 1) Bimbingan teknis dan supervisi 2) Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi b Sinkronisasi dan Evaluasi Investasi Infrastruktur 1) Sinkronisasi dan koordinasi 2) Bimbingan teknis dan supervisi 3) Pemantauan dan evaluasi c Fasilitas dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur 1) Penyelesaian permasalahan dan pengembangan 2) Koordinasi, advokasi, dan fasilitasi di bidang penyelesaian permasalahan dan 3) Bimbingan teknis dan supervisi d Pasar Infrastruktur 1) Bimbingan teknis pembinaan pasar infrastruktur 2) Pemantauan dan evaluasi pasar infrastruktur	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		2 Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi a Sistem Penyelenggaraan 1) Bimbingan teknis dan supervisi 2) Pemantauan dan evaluasi b Kontrak Konstruksi 1) Bimbingan teknis dan supervisi 2) Pemantauan dan evaluasi c Konstruksi Berkelanjutan 1) Bimbingan teknis dan supervisi 2) Pemantauan dan evaluasi d Manajemen Mutu 1) Bimbingan teknis dan supervisi 2) Pemantauan dan evaluasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		3 Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi a Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat 1) Bimbingan teknis dan supervisi 2) Pemantauan dan evaluasi b Material dan Peralatan Konstruksi 1) Bimbingan teknis dan supervisi 2) Pemantauan dan evaluasi c Teknologi Konstruksi dan Produk Dalam Negeri 1) Bimbingan teknis dan supervisi 2) Pemantauan dan evaluasi d Usaha Jasa Konstruksi 1) Bimbingan teknis dan supervisi 2) Pemantauan dan evaluasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		4 Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi a Fasilitasi Standar dan Materi Kompetensi 1) Bimbingan teknis dan supervisi 2) Pemantauan dan evaluasi b Fasilitasi Penerapan Kompetensi 1) Bimbingan teknis dan supervisi 2) Pemantauan dan evaluasi c Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi 1) Fasilitasi penyetaraan kompetensi d Produktivitas 1) Bimbingan teknis dan supervisi 2) Pemantauan dan evaluasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		5 Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi a Kerjasama 1) Bimbingan teknis dan supervisi 2) Pemantauan dan evaluasi b Pemberdayaan Wilayah 1) Penjaminan Mutu 2) bimbingan teknis dan supervisi 3) Pemantauan dan evaluasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		6 Jasa Konstruksi oleh masyarakat dan pemerintah di wilayahnya a Rencana Kerja Pengendalian Mutu b Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja c Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya d Pelaksanaan Pengendalian Mutu 1) Peningkatan kapasitas jasa konstruksi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) Penyelenggaraan jasa konstruksi e Pelaporan dan Pengawasan				
		7 Penerapan Teknologi Konstruksi a Rencana Kerja b Koordinasi, Sinkronisasi dan Kerjasama 1) Kordinasi peningkatan penerapan teknologi konstruksi 2) Sinkronisasi peningkatan penerapan teknologi konstruksi c Fasilitas Pengembangan dan Penyebarluasan Materi d Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		8 Material dan Peralatan Konstruksi a Rencana Kerja b Koordinasi, Sinkronisasi dan Kerjasama 1) Kordinasi bidang pendayagunaan material dan peralatan konstruksi 2) Sinkronisasi bidang pendayagunaan material dan peralatan konstruksi 3) Kerjasama c Pengelolaan Data dan Aset d Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

f

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PEMBIAYAAN PERUMAHAN				
		1 Perencanaan Pembiayaan Perumahan				
		a Koordinasi dan Keterpaduan Perencanaan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		b Pembiayaan Perumahan dan Analisis Pasar				
		1) Analisis pasar perumahan dan indikator makro ekonomi				
		c Kemitraan dan kerja sama				
		1) Dalam Negeri				
		d Data dan Dokumentasi				
		1) Pengelolaan data dan dokumentasi				
		2) Pengelolaan sistem informasi				
		e Pemantauan evaluasi dan pelaporan				
		2 Pola Pembiayaan Perumahan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		a Perencanaan, Program dan Pelaporan				
		b Pengembangan pola pembiayaan rumah umum dan rumah tapak				
		1) Fasilitas kemudahan dan bantuan pembiayaan bagi masyarakat				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- c Pengembangan pola pembiayaan rumah swadaya, dan mikro perumahan - d Pengembangan pola investasi rumah - e Fasilitasi kemudahan dan bantuan				
		3 Pendayagunaan Sumber Pembiayaan - a Rencana, program, dan laporan - b Pendayagunaan sumber pembiayaan primer dan sekunder - c Pendayagunaan sumber tabungan perumahan dan pembiayaan lainnya	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		4 Bina Sistem Pembiayaan Perumahan - a Rencana, Program dan Laporan - b Bimbingan Teknis dan Supervisi 5 Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan - a Rencana - b Pemantauan, analisis, evaluasi, dan laporan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		6 Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - a Layanan Pembiayaan Perumahan 1) Sosialisasi dan promosi 2) Kerjasama - b Operasi Kegiatan 1) Pendayagunaan dan pengembangan teknologi dan informasi 2) Pendayagunaan dan pemeliharaan database 3) Pemantauan dan evaluasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH				
		1 Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - a Rencana strategis dan analisa manfaat 1) Rencana strategis 2) Analisa manfaat dan skema pembiayaan 3) Pengelolaan data dan informasi pengembangan infrastruktur terpadu - b Perencanaan infrastruktur 1) Rencana keterpaduan antarsektor 2) Rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur terpadu 3) Rencana aksi keterpaduan antarsektor 4) Bimbingan keterpaduan antarsektor dan antar wilayah	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait
		2 Pemrograman dan evaluasi keterpaduan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat - a Program 1) Analisis kelayakan dan kriteria program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		2) Fasilitas penyusunan dan sinkronisasi program jangka pendek keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan dalam lingkup maupun WPS b Sinkronisasi program dan pembiayaan 1) Sinkronisasi program dan dana pembangunan jangka tahunan dalam keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat 2) Sinkronisasi dan fasilitasi pengalokasian dana dalam keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat - Dana alokasi khusus - Dana kejadian khusus pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat - Skema pendanaan lainnya c Pemantauan dan evaluasi program 1) Pemantauan dan evaluasi 2) Pelaporan				

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		3 Pengembangan kawasan strategis a Program keterpaduan infrastruktur kawasan dan antarkawasan strategis 1) Rencana dan program 2) Pengembangan area inkubasi di kawasan dan antar kawasan strategis b Fasilitas pengadaaan tanah 1) Inventarisasi ketersediaan tanah 2) Rencana dan program 3) Fasilitas pengadaaan tanah dan pencadangan tanah 4) Pengadaaan tanah area inkubasi c Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
		4 Pengembangan kawasan perkotaan a Pengembangan infrastruktur kota kecil 1) Rencana dan program 2) Pengembangan area inkubasi di kota kecil	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
37	660	<u>TATA LINGKUNGAN</u> <u>KEBIJAKAN</u> Kebijakan di bidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, pengelolaan B3,limbah B3,dan sampah, penataan hukum lingkungan, komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan sarana teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		1 Pengkajian dan pengusunan kebijakan: a Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Wilayah b Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Sektor c Kajian Dampak Lingkungan d Pengembangan Perangkat Kebijakan 2 Penyiapan bahan 3 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 4 Pengumpulan dan pengolahan data 5 penetapan dalam bentuk NSPK TATA LINGKUNGAN				
		1 Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup a Inventarisasi, penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 1) Dokumentasi Inventarisasi 2) Pedoman Inventarisasi 3) Penetapan Ekoregion 4) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota 5) Pedoman Penyusunan RPPLH Kota	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		b Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam 1) Evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam 2) Kebijakan pemanfaatan sumber daya alam				
		2 Penerapan Kebijakan a Evaluasi Penerapan b Perencanaan Lingkungan Hidup 3 Ekonomi Lingkungan a Perencanaan 1) Valuasi Ekonomi 2) Internalisasi Lingkungan b Insentif dan Pendanaan Lingkungan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		4 Dampak Lingkungan a Bimtek Dampak Lingkungan b Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan 1) Penilaian dokumen lingkungan 2) Pemeriksaan dokumen lingkungan c Evaluasi dan Tindak Lanjut 1) Evaluasi 2) Tindak Lanjut	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN 1 Pemantauan dan Pengawasan a Manufaktur, Prasarana dan Jasa 1) Industri Kimia 2) Industri Logam, Elektronika dan Mesin 3) Aneka Industri	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		4) Prasarana dan Jasa b Agro Industri dan Usaha Skala Kecil 1) Peternakan dan Perikanan 2) Holtikultura 3) Usaha Skala Kecil c Udara Sumber Bergerak 1) Transportasi Darat 2) Evaluasi dan Pengembangan a Agro Industri dan Usaha Skala kecil 1) Peternakan dan Perikanan 2) Usaha Skala Kecil 2 PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN IKLIM 1 Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan a Pengembangan 1) Sumber Daya Genetik 2) Keamanan Hayati b Pemanfaatan Sumber Daya Genetik c Pengelolaan Sumber Daya Genetik 1) Pengembangan dan Pemanfaatan 2) Pemantauan dan Pengawasan d Keamanan Hayati 1) Pengembangan dan Pengelolaan 2) Pemantauan dan Pengawasan e Pengendalian Kerusakan Lahan 1) Lahan Budidaya 2) Lahan Non Budidaya				
			Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		2 Kerusakan Ekosistem Perairan Darat a Kerusakan Ekosistem 1) Sungai 2) Kerusakan Ekosistem 3) Pengelolaan Kualitas Air 3 Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer a Perangkat Mitigasi b Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca 1) Laporan inventarisasi GRK nasional 2) Data bidang inventarisasi GRK c Pengendalian Bahan Perusak Ozon 1) Hibah bantuan luar negeri terkait program perlindungan lapisan ozon				
		4 Adaptasi Perubahan Iklim a Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim 1) Pengembangan perangkat adaptasi perubahan iklim 2) Pemantauan dan evaluasi adaptasi perubahan iklim	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		b Kerentanan Perubahan Iklim 1) Identifikasi dan analisis kerentanan perubahan iklim 2) Media kliring kerentanan perubahan iklim				
		PENGLOLAAN B3, LIMBAH, DAN SAMPAH				
		1 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun a Registrasi dan notifikasi 1) Registrasi 2) Notifikasi b Pemantauan 1) Sektor industri 2) Sektor non industri c Evaluasi dan Tindak Lanjut 1) Sektor industri 2) Sektor non industri	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		2 Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya a Pengumpulan dan Pemanfaatan				
		3 Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan a Pemantauan 1) Agroindustri 2) Prasarana, Jasa, dan Non Institusi				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		b Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi 1) Agroindustri 2) Prasarana, Jasa, dan Non Institusi	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolahan terkait
		4 Pengelolaan Sampah a Pembatasan Sampah b Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah c Program Blitar hidup asri sehat lestari (berseri) d Adipura	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		HUKUM LINGKUNGAN				
		1 Hukum Administrasi Lingkungan a Pengelolaan dan Pengembangan Pengaduan 1) Pengelolaan Pengaduan 2) Pengembangan Pengaduan b Penaatan Hukum Administrasi Lingkungan 1) Penerapan hukum administrasi lingkungan 2) Pengembangan hukum administrasi lingkungan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2 Penyelesaian Sengketa Lingkungan a Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan 1) Administrasi Gugatan 2) Gugatan b Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan 1) Kerugian Negara dan Masyarakat 2) Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
		3 Penegakan Hukum Pidana Lingkungan a Penyidikan 1) Administrasi Penyidikan 2) Pelaksanaan Penyidikan b Koordinasi Penuntutan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut 1) Koordinasi penuntutan 2) Evaluasi dan tindak lanjut c Koordinasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		KOMUNIKASI LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1 Komunikasi Lingkungan a Pengembangan Komunikasi 1) Program Komunikasi 2) Evaluasi Komunikasi b Publikasi dan Kampanye 1) Publikasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) Kampanye 2 Penguatan Inisiatif Masyarakat a Komunitas Pendidikan Lingkungan 1) Pengembangan dan Bimbingan 2) Evaluasi b Kearifan Lingkungan 1) Inventarisasi 2) Revitalisasi 3 Peningkatan Peran Masyarakat a Masyarakat Perkotaan 1) Masyarakat Kawasan Permukiman 2) Masyarakat Kawasan Rentan 4 Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan a Organisasi Sosial Dan Masyarakat b Organisasi Profesi dan Dunia Usaha				
		PEMBINAAN SARANA TEKNIK LINGKUNGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS 1 Data dan Informasi Lingkungan a Pengelolaan Data 1) Pengumpulan dan Pengolahan Data 2) Manajemen Basis Data b Pengelolaan Informasi 1) Analisis Data dan Penyajian Informasi c Pengembangan Perangkat Lunak 1) Pengembangan Instrumen Layanan Informasi 2) Pengembangan Instrumen Analisis Data	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		d Pengembangan Sistem dan Pemeliharaan Jaringan 1) Pengembangan Sistem Jaringan 2) Pemeliharaan Jaringan 2 Kelembagaan Lingkungan a Fasilitas Standar Pelayanan Minimal 1) Fasilitas Standar Pelayanan Minimal Daerah 2) Fasilitas Standar Pelayanan Minimal Daerah Kota 3 Standarisasi dan Teknologi a Teknologi Ramah Lingkungan 1) Pengembangan Kriteria Teknologi Ramah Lingkungan 2) Verifikasi Teknologi Ramah Lingkungan 4 Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan a Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan 1) Pemantauan Kualitas Lingkungan 2) Kajian Kualitas Lingkungan b Laboratorium Rujukan dan Pengujian 1) Laboratorium Rujukan 2) Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
38	790	PENGAWASAN BIDANG KEUANGAN					
		PEMERIKSAAN/PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH					
		A	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		B	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal				
		C	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional:				
		1) LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)					
		2) MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan)					
		3) Tindak Lanjut/Tanggapan LHP					
		D	Dokumen Penyelesaian Keuangan Daerah:	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
		1) Tuntutan Perbendaharaan					
2) Tuntutan Ganti Rugi							
PEMERIKSAAN KEUANGAN							
A	Kebijakan	Kebijakan bidang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1) Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2) Penyiapan kebijakan 3) Perumusan kebijakan 4) Masukan dan dukungan kebijakan 5) Penetapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)				
		B Rencana Pemeriksaan (Laporan Keuangan, Kinerja, Tujuan Tertentu/PDPT) 1) Rencana Strategis pemeriksaan 2) Rencana Kerja pemeriksaan Tahunan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		C Pelaksanaan pemeriksaan 1) Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) a) Indeks A (Persiapan Pelaksanaan) b) Indeks B (Data pendukung pemeriksaan) c) Indeks C (Laporan Hasil) 2) Risalah Pembahasan Konsep Hasil 3) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemerintah	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas	Unit pengolah terkait
		D Pemantauan Pemeriksaan 1) <i>Action Plan</i> (dibuat oleh Entitas Pemeriksaan) 2) Daftar Rincian Hasil Pemeriksaan (DRHP) 3) Tindak Lanjut/Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan 4) Hasil pembahasan atas Tindak Lanjut 5) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	E	Kerugian Negara/Daerah 1) Himpunan dan Tabulasi Masalah Kerugian Negara beserta data pendukungnya 2) Hasil Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) beserta data pendukungnya	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	F	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester/Tahunan (IHPS/IHPT)/Hasil Pemeriksaan Semester/Tahunan (Hapsem/Haptah)	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	PENGAWASAN KEUANGAN					
	A	Kebijakan Kebijakan bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bidang perekonomian , politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan, penyelenggaraan keuangan daerah, akuntan negara, dan investigasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1) Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2) Penyiapan kebijakan 3) Perumusan kebijakan 4) Masukan dan dukungan kebijakan 5) Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)				
		B Rencana Pengawasan 1) Rencana Strategis Pengawasan 2) Rencana kerja Pengawasan Tahunan 3) Rencana Kinerja Tahunan Pengawasan 4) Penetapan Kinerja Tahunan Pengawasan 5) Rakor Pengawasan Tingkat Daerah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		C Hasil Pelaksanaan Pengawasan 1) Audit a) Hasil audit pengawasan tidak berskala - Hasil Audit terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea, dan cukai - Hasil Audit terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar - Hasil Audit terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah - Hasil Audit terhadap pemanfaatan Aset negara/daerah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Hasil Audit terhadap program/kegiatan strategis di bidang ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan - Hasil Audit terhadap pembiayaan pembangunan nasional/daerah - Hasil Audit Investigasi terhadap penyimpanan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif - Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara dan/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai peraturan perundang-undangan - Hasil Audit Lainnya b) Hasil Pengawasan dan Pembinaan Tahunan kepada Walikota c) Hasil Reviu - Hasil pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Hasil pelaksanaan reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah - Hasil pelaksanaan reviu atas Penyusunan Anggaran Pemda d) Hasil Evaluasi - Hasil Evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum Lain, dan Wajib Bayar - Hasil Evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah - Hasil Evaluasi terhadap pemanfaatan Aset negara/daerah - Hasil Evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan - Hasil Evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan daerah				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Hasil Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi - Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan - Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Pemerintah Daerah - Hasil Evaluasi penyelenggaraan tata kelola kepada badan usaha dan badan lainnya (<i>Good Corporate Governance</i> / GCG) e) Hasil Pemantauan/Monitoring - Hasil Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) - Hasil Monitoring Penyerapan Anggaran - Hasil Pemantauan/Monitoring Lainnya f) Hasil Bimbingan Teknis/Konsultasi/Asistensi/Sosialisasi - Hasil Pembinaan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah - Hasil Asistensi atas revidu laporan keuangan dan kinerja				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Hasil Pelaksanaan sosialisasi, konsultasi dan bimbingan teknis akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola kepada badan usaha dan badan lainnva D Analisis, Evaluasi, dan Pengolahan Hasil Pengawasan 1) Analisis, Evaluasi, dan Pengolahan Hasil Pengawasan				
39	800	KEPEGAWAIAN Kebijakan di bidang manajemen kepegawaian 1. Pengkajian, Pengusunan Kebijakan, dan Naskah Akademik 2. Penyusunan kebijakan 3. Perumusan kebijakan 4. Pemberian masukan dan dukungan 5. Penetapan kebijakan 6. <i>Memorandum of Understanding</i> Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara 1. Perencanaan Kebutuhan ASN a. Bahan penyusunan rencana kebutuhan b. Analisis Kebutuhan 1) Aparatur Sipil Negara 2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) c. Pengolahan data kebutuhan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
			Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

f

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2. Perencanaan Pertimbangan Formasi a. Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN b. Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN 3. Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara 4. Standarisasi Jabatan a. Informasi Jabatan b. Kompetensi Jabatan c. Klasifikasi Jabatan				
		Formasi dan Pengadaan Pegawai 1. Formasi ASN a. Usulan formasi disertai dengan: 1) Analisa Jabatan 2) Beban Kerja b. Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN c. Persetujuan Formasi d. Penetapan Formasi e. Penetapan Formasi Khusus	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2. Pengadaan ASN a. Proses Rekrutmen ASN b. Penetapan Pengumuman Kelulusan c. Berkas Lamaran yang tidak diterima d. Nota Usul Pengangkatan ASN e. <i>Open Bidding</i> (Seleksi Terbuka Jabatan)	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait
		3. Sistem Rekrutmen ASN a. Fasilitas Penyelenggaraan Seleksi 1) Pelayanan teknis dan administrasi seleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian 2) Penyelenggaraan dan pengolahan seleksi 3) Sertifikasi dan pelaporan a) penyiapan dan pengelolaan sertifikat kelulusan b) pengelolaan laporan dan evaluasi seleksi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Mutasi Pegawai 1. Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN 2. Usulan Kenaikan pangkat/golongan/jabatan 3. Usulan Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural/ fungsional 4. Usulan Peninjauan Masa Kerja 5. Berkas Tim Penilai Kinerja	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait
		Pengembangan Karir 1. Usulan Tugas Belajar/Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/Magang/Ujian Dinas/Praktek Kerja di Instansi lain/Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta 1) Perencanaan dan penyusunan analisis kebutuhan 2) Pelaksanaan 3) Pelaporan 4) Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat 2. Usulan Penyesuaian ijazah 3. Penyusunan sistem karier 4. Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		5. Angka Kredit a. Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP/L)/Sertifikat b. Penilaian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit				
		Kinerja 1. Hasil penilaian kinerja dan standar kerja a. Sistem penilaian kinerja ASN b. Standar kinerja jabatan pegawai ASN c. Penilaian kinerja pegawai ASN 2. Pengelolaan database dan analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN a. Pengelolaan database penilaian kinerja pegawai ASN b. Analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN c. Teknis penilaian kinerja ASN 3. Hasil Evaluasi dan pemantauan penilaian kinerja dan standar kinerja jabatan pegawai ASN	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN 1. Kode Etik Pegawai 2. Disiplin a. Penegakan Disiplin b. Peningkatan Disiplin 3. Pemberhentian a. Pemberhentian dengan hormat b. Pemberhentian tidak dengan hormat c. Pemberhentian sementara 4. Pensiun a. Administrasi Pensiun ASN dan Pejabat Negara 1) Administrasi pensiun ASN 2) Perekaman dan pemeliharaan data pensiun b. Penetapan Pensiun ASN c. Penetapan Pertimbangan teknis pensiun ASN d. Pensiun pejabat negara dan janda/dudanya 1) Administrasi pensiun Pejabat Negara (Sekretariat Negara) 2) Penyiapan pensiun pejabat negara (Setneg/Setkab) 3) Penetapan pensiun janda/duda pejabat negara (BKN)	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Bantuan Hukum	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
		1. Pemberian Bantuan Hukum				
		2. Bantuan Hukum Pegawai				
		Status dan Kedudukan Pegawai	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
		1. Pertimbangan status kepegawaian				
		a. Analisis status kepegawaian				
		b. Penyusunan pertimbangan status kepegawaian				
		2. Pertimbangan kedudukan kepegawaian				
		a. Analisis kedudukan kepegawaian				
		b. Analisis kedudukan kepegawaian				
		3. Penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai				
		4. Perselisihan/ sengketa kepegawaian				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Sistem Informasi Kepegawaian 1. Pengolahan data dan informasi kepegawaian a. Pengolahan Data 1) Pengelolaan database kepegawaian ASN 2) Penyelesaian permasalahan data kepegawaian ASN b. Informasi kepegawaian 1) Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian ASN 2) Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian non ASN 3) Pengembangan dan pemanfaatan kartu pegawai elektronik 2. Pengembangan sistem informasi kepegawaian 3. Pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian a. Arsip kepegawaian elektronik 1) Verifikasi dan distribusi arsip kepegawaian 2) Perekaman dan arsip kepegawaian 3) Pengelolaan arsip kepegawaian elektronik b. Arsip Kepegawaian Fisik	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pengawasan dan pengendalian 1. Formasi, pengadaan, dan pasca diklat a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan b. Monitoring dan Evaluasi c. Rekomendasi, evaluasi, dan pelaporan 2. Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan b. Monitoring dan Evaluasi c. Rekomendasi, evaluasi, dan pelaporan Gaji dan tunjangan, kesejahteraan dan kinerja 3. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan a. Monitoring dan Evaluasi b. Monitoring dan Evaluasi c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan 4. Kode Etik, disiplin, pemberhentian, dan pensiun ASN a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan b. Monitoring dan Evaluasi c. Rekomendasi, evaluasi, dan pelaporan Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian 5. Berkas sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		10. Berkas tentang <i>Medical Record</i>	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta pemegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
		Administrasi Perseorangan 1. Berkas perseorangan Pegawai Negeri Sipil a. Berkas Lamaran yang diterima b. Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya c. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN d. SK Pengangkatan CASN e. Hasil Pengujian Kesehatan f. Surat Tanda Lulus Pelatihan Prajabatan g. SK Pengangkatan ASN h. SK Peninjauan Masa Kerja i. SK Kenaikan Pangkat j. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan dan Jabatan, dan Surat Pernyataan Pelantikan k. SK Pengangkatan dalam Jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta pemegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		l. SK Perpindahan Wilayah Kerja m. SK Perpindahan Antar Instansi n. SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN) o. Berita Acara Pemeriksaan p. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin ASN q. SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk r. SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan s. SK Pemberian Uang Tunjucu t. SK Pembebasan dari Jabatan Organik diangkat sebagai Pejabat Daerah u. SK Pengalihan ASN v. SK Pemberhentian Sebagai ASN w. Surat Keterangan Pernyataan Hilang x. Surat Keterangan Kembali ASN yang y. SK Penggantian Nama z. Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran aa. Akta Nikah/Cerai bb. Akta Kelahiran cc. Isian Formulir PUASN dd. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ASN dan Jabatan ee. Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol/Ormas/LSM ff. Surat Keterangan Mutasi Keluarga gg. Surat Keterangan Meninggal Dunia/hilang				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		hh. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan ii. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional jj. Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus kk. Surat Pemberitahuan Kenaikkan Gaji Berkala ll. Surat Tugas/Izin Belajar Dalam/Luar Negeri mm. Surat Izin Berpergian Ke Luar Negeri nn. Kartu Daftar Ulang (Kardaf) ASN oo. Ijazah/Sertifikat pp. SK Penempatan/Penarikan Pegawai qq. SK Pengangkatan pada Jabatan di luar instansi induk rr. Surat Pertimbangan Status ASN ss. SK Pengaktifan Kembali Sebagai ASN tt. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah uu. SK Pensiun 2. Berkas perseorangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 3. Berkas Perseorangan Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan a. Walikota dan Wakil Walikota b. Pejabat negara lainnya yang ditentukan Undang-Undang 4. Berkas perseorangan Sekretaris Daerah Kota 5. Berkas Perseorangan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
40	843.4	6. Berkas perseorangan ASN yang berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional/daerah				
		Penilaian Kompetensi Berkas Penilaian Kompetensi Hasil Penilaian Kompetensi	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
		KELUARGA BERENCANA				
		KEBIJAKAN Kebijakan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan kebijakan 4 Masukan dan dukungan kebijakan 5 Penetapan NSPK	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		PENGENDALIAN PENDUDUK A. Pemaduan kebijakan pengendalian penduduk 1 Analisis pemaduan kebijakan pengendalian penduduk a. Pengumpulan dan Pengolahan Data b. Evaluasi dan Pelaporan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2 Fasilitas pemaðuan kebijakan pengendalian penduduk a. Penyiapan fasilitas b. Evaluasi dan pelaporan B. Perencanaan pengendalian penduduk 1 Profil dan Proyeksi Penduduk a. Data profil dan proyeksi Penduduk b. Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk 2 Penetapan parameter pengendalian penduduk a. Penetapan sasaran parameter b. Evaluasi sasaran parameter 3 Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk a. Pemanfaatan profil dan proyeksi b. Pemanfaatan Parameter C. Kerja sama pendidikan kependudukan 1 Pengembangan sistem a. Pengembangan sistem jalur pendidikan formal b. Pengembangan jalur pendidikan nonformal dan informal 2 Pengembangan Materi a. Pengembangan materi jalur pendidikan formal				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		b. Pengembangan materi jalur pendidikan nonformal dan informal 3 Monitoring dan evaluasi a. Monitoring dan evaluasi jalur pendidikan formal b. Monitoring dan evaluasi jalur pendidikan nonformal dan informal D. Analisis dampak kependudukan 1 Analisis Sosial 2 Analisis Ekonomi 3 Analisis dampak politik, pertahanan, dan keamanan 4 Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan				
		KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI A. Bina kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah 1 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah 2 Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana 3 Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah a. Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		b. Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah B. Bina kesertaan keluarga berencana jalur swasta 1 Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta 2 Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta 3 Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta a. Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta b. Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta C. Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran khusus 1 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan a. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan b. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan 2 Kesertaan keluarga berencana pria a. Peningkatan akses keluarga berencana pria				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		b. Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria D. Kesehatan Reproduksi 1 Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak 2 Pencegahan PMS dan HIV/AIDS 3 Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA A. Bina keluarga Balita dan Anak 1 Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak a. Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak b. Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak 2 Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak a. Monitoring bina keluarga Balita dan anak b. Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak B. Bina ketahanan remaja 1 Pelembagaan bina ketahanan remaja a. Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		b. Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat 2 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja a. Monitoring bina ketahanan remaja b. Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja C. Bina ketahanan keluarga Lansia 1 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia 2 Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia a. Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia b. Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia 3 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia a. Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia b. Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia D. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 1 Pengembangan program usaha ekonomi keluarga				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2 Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga 3 Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga a. Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga b. Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga 4 Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga E. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 1 Pengembangan Program Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 2 Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera a. Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera b. Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 3 Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera a. Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera b. Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		ADVOKASI DAN INFORMASI A. Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi 1 Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi a. Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi b. Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi 2 Advokasi dan pencitraan 3 Komunikasi, Informasi dan Edukasi a. Promosi b. Sarana produksi media komunikasi c. Produk media komunikasi B. Bina hubungan antar lembaga 1 Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi 2 Hubungan dengan lembaga pemerintahkabupaten dan kota a. Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota b. Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota 3 Hubungan dengan lembaga nonpemerintah a. Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		b. Penguatan hubungan dengan lembaga non pemerintah C. Bina lini lapangan 1 Tenaga lini lapangan a. Pengembangan tenaga lini lapangan b. Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan 2 Institusi Masyarakat Perkotaan a. Pengembangan institusi masyarakat Perkotaan b. Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat Perkotaan 3 Mekanisme Operasional lini lapangan a. Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan b. Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan D. Pelaporan dan statistik 1 Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan a. Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan b. Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan 2 Pengumpulan dan pengolahan data				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3 Analisis dan evaluasi a. Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk b. Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera E. Teknologi Informasi dan Dokumentasi 1 Sistem aplikasi dan bank data a. Pengembangan sistem aplikasi b. Pengelolaan bank data 2 Infrastruktur teknologi informasi a. Pengembangan Infrastruktur teknologi informasi b. Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi 3 Dokumentasi dan penyebarluasan informasi a. Dokumentasi dan perpustakaan b. Pengelolaan situs BKKBN Kota Blitar				
41	890	PENDIDIKAN PEGAWAI KEBIJAKAN Kebijakan Bidang Diklat 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan kebijakan 4 Masukan dan dukungan kebijakan 5 Penetapan NSPK	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

1

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Penyelenggaraan Diklat 1. Perencanaan peserta, pengajar, penjadwalan 2. Penyelenggaraan diklat 3. Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat 4. Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran 5. Sistem informasi diklat 6. Monitoring dan Evaluasi 7. Alumni	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
42	900	RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P)				
		A Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) 1) Kebijakan Umum, Renstra, Strategi, dan Prioritas a) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) b) Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja) 2) Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas bersama	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO (1)	KODE KLASIFIKASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		3) KUA beserta Nota Kesepakatannya 4) Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 5) Nota Kesepakatan PPAS 6) Prioritas Plafon Anggaran Sementara				
		B Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) 1) Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah 2) Dokumen RKA-SKPD	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		C Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan 1) Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD a) Nota Keuangan Pemerintah b) Materi RAPBD 2) Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah 3) Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Raperda APBD	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

f

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		4) Dokumen Rancangan Penjabaran APBD beserta lampirannya 5) Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAPBD beserta penjabarannya 6) Hasil Evaluasi Gubernur tentang RAPBD 7) Penetapan Perda APBD oleh Walikota beserta Penjabarannya 8) Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD				
		D Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 1) Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan a) Kebijakan Umum, Renstra, Strategi, dan Prioritas Perubahan - Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) - Dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD b) Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan yang telah c) KUA Perubahan beserta Nota Kesepakatannya d) Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		e) Nota Kesepakatan PPA Perubahan f) Prioritas Plafon Anggaran Perubahan 2) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan a) Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan yang telah disetujui Sekretaris Daerah b) Dokumen RKA-SKPD Perubahan 3) Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) a) Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD Perubahan: - Nota Keuangan Pemerintah - Materi RAPBD b) Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		c) Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Raperda APBD Perubahan e) Dokumen Rancangan Penjabaran APBD Perubahan beserta lampirannya f) Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAPBD Perubahan beserta penjabarannya g) Hasil Evaluasi Gubernur tentang RAPBD Perubahan h) Penetapan Perda APBD Perubahan oleh Walikota beserta Penjabarannya i) Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD Perubahan				
		PENYUSUNAN ANGGARAN A Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan B Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan C Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota D Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		E Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)				
		PELAKSANAAN ANGGARAN				
		A Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS				
		B Pendapatan				
		1) Pendapatan Asli Daerah				
		a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SPPT)				
		b) Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah antara lain:				
		- Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Bukan Logam Bantuan Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet PBB Sektor Perkelurahan dan Perkotaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Rangsangan (RPHTR)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		- Pajak Restoran				
		- Pajak Hiburan				
		- Pajak Reklame				
		- Pajak Penerangan Jalan				
		- Pajak Mineral Bukan Logam Batuan				
		- Pajak Parkir				
		- Pajak Air Tanah				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Pajak Sarang Burung Walet - PBB Sektor Perkelurahan dan Perkotaan - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) c) Laporan Surat Ketetapan Retribusi d) Bukti Penarikan Retribusi, antara lain: - Retribusi Jasa Umum: - Retribusi Jasa Usaha: - Retribusi Perizinan Tertentu: - Retribusi Pengendalian Lalu Lintas e) Bukti Penerimaan Jasa Layanan Kesehatan Masyarakat f) Dokumen Rasionalitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah g) Bukti Penerimaan SKPD dari Badan Layanan Umum h) Bukti Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir i) Bukti Penerimaan Bunga dan atau Jasa Giro pada Bank 2) Dokumen Penerimaan Dana Perimbangan: a) Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Pajak dan Bukan Pajak b) Dana Bagi Hasil untuk Kota c) Dana Alokasi Umum (DAU)				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		d) Dana Perimbangan untuk Daerah Yang Tidak Menerima DAU e) Dana Alokasi Khusus (DAK) 3) Dokumen Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah a) Alokasi Dana Penyesuaian b) Dana Bantuan Operasional Sekolah c) Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi d) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi e) Penerimaan Hibah Yang Bersumber dari APBN, Pemerintah Daerah lainnya atau Sumbangan Pihak Ketiga 4) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) 5) Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 6) Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 7) Dokumen Piutang Daerah 8) Dokumen Pengelolaan Investasi C Belanja 1) Dokumen Belanja Langsung a) Belanja Pegawai b) Belanja Barang Jasa c) Belanja Modal				
			Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) Dokumen Belanja Tidak Langsung a) Pegawai b) Hibah c) Belanja Bagi Hasil d) Subsidi e) Bunga f) Bantuan Sosial g) Bantuan Keuangan h) Belanja Tidak Terduga				
		D Pembiayaan Daerah 1) Bukti Penerimaan Pembiayaan a) SILPA b) Dana Cadangan c) Dana Bergulir d) Pinjaman Daerah e) Pengalihan Piutang PBBP2 menjadi PAD 2) Bukti Pengeluaran Pembiayaan a) Investasi Jangka Panjang Dalam Bentuk Dana Bergulir b) Penyertaan Modal pada BUMD c) Penambahan Penyertaan Modal pada BUMD d) Pengeluaran dari Dana Cadangan e) Pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		f) Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik				
		E Dokumen Penatausahaan Keuangan 1) Surat Penyediaan Dana (SPD) 2) Surat Permohonan Pembayaran (SPP) 3) Surat Perintah Membayar (SPM) 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		F Pertanggungjawaban Penggunaan Dana 1) Buku Kas Umum (BKU) 4) Rekening Koran Bank 5) Laporan Pertanggungjawaban Fungsional dan Administrasi 6) Bukti penyetoran Pajak 7) Register Penutupan Kas 8) Berita Acara Pemeriksaan 9) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan Termasuk Arsip Data Komputer (ADK) 10) Laporan Pendapatan Negara 11) Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) Bulanan/Tiwlulan/Semesteran (surplus/defisit Anggaran)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		G Daftar Gaji	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		I Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		J Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari: 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2) Neraca 3) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		PENGLOLAAN APBD/DANA PINJAMAN				
		A Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan: 1) Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran 2) Pejabat Pembuat Komitmen 3) Kuasa Pengguna Barang/Jasa 4) Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah 5) Pejabat Penandatangan SPM 6) Bendahara Penerimaan/Pengeluaran 7) Pengelola Barang, termasuk berita acara serah terima jabatan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) A Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) B Dokumen Kebijakan Akuntansi C Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi D Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Terbatas/ Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait
		PENYALURAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN A Surat Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara atas Pengguna Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Spesimen Tanda Tangan B Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya: 1) SPP-LS, SPP-GU, SPP TU, Daftar Perincian Penggunaan Dana, SPM-LS, SPM-GU, SPM-TU, Bilyet Giro, SPM Nihil 2) Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta bukti Pendukungnya a.l.: Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank 3) Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan	Biasa/ Terbuka (tidak termasuk Spesimen Tanda Tangan)	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		C Buku Rekening Bank E Pembukuan anggaran terdiri dari: Buku Kas Umum (BKU), Register SPM, Register SP2D, Register SPP, Register STS, Register Kantor Pos, dan Rekening Koran				
		PENERIMAAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN A Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya B Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPhn, Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan, dll.	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		PENGELOLAAN ANGGARAN PILKADA DAN BIAYA BANTUAN PEMILU DARI APBD				
		A Dokumen Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan PEMILU dari APBD 1) Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu 2) Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional, Kontingensi untuk Biaya Pilkada, dan Bantuan Pemilu 3) Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD, PPK, PPS, KPPS dan Panwasda, Permohonan Pengajuan RKA KPUD, dan Panwas	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		4) Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu 5) Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota 6) Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD 7) Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada 8) Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD 9) Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD				
		PELAKSANAAN ANGGARAN PILKADA DAN BIAYA BANTUAN PEMILU A Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu B Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada / Pemilu C Berkas Setor Sisa Dana Pilkada / Pemilu termasuk Setor Komisi Pengadaan Barang/ Jasa, Rabat, Bunga, Jasa Giro	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		D Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank				
		E Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya				
		PELAKSANAAN ANGGARAN OPERASIONAL PEMILU				
		A Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu dan PPKO kota termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		B Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank				
		C Berkas Penyaluran Biaya Pemilu ke PPK, PPS dan KPPS termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank dan lain-lain				
		PEMERINTAHAN KELURAHAN				
		A Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		B Program Kerja Pemerintah Kelurahan: 1) Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan 2) Rencana Kerja Perangkat Kelurahan				
		C Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan				
		D Bukti Pungutan Kelurahan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		E Dokumen Pembebasan Eks Tanah Kas Kelurahan: 1) Peraturan Kelurahan tentang Pembebasan Tanah Kas Kelurahan 2) Pemohonan tentang Pembebasan Tanah Kas Kelurahan 3) Hasil persetujuan/rapat 4) Rekomendasi Walikota tentang persetujuan pembebasan tanah 5) Persetujuan Walikota tentang hasil musyawarah harga tanah kas Kelurahan 6) Proses Pelepasan Hak Tanah Kas Kelurahan 7) Pembelian Tanah Pengganti 8) Musyawarah tanah Hak Milik untuk dibeli menjadi pengganti 9) Rekomendasi Walikota tentang Persetujuan Pembebasan Tanah 10) Pelepasan Tanah Hak Milik menjadi Kas Kelurahan F Dokumen Perjanjian Sewa Tanah Kas Kelurahan 1) Sewa Tanah Kas Kelurahan tidak berubah fungsi				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) Sewa Tanah Kas Kelurahan berubah fungsi				
		a) Peraturan [Kelurahan tentang sewa tanah kas Kelurahan				
		b) Penawaran dari Penyewa				
		c) Rekomendasi Walikota tentang izin penyewaan tanah kas Kelurahan				
		d) Permohonan Izin Gubernur				
		e) Izin Gubernur				
		G Dokumen Perubahan Peruntukan Tanah Kas Kelurahan				
		1) Peraturan Kelurahan tentang perubahan peruntukan Tanah Kas Kelurahan				
		2) Rekomendasi Walikota tentang persetujuan pembebasan tanah				
		3) Izin tertulis Gubernur				
		H Surat Kedudukan Keuangan Kepala Kelurahan dan Pamong				
		I Lain-lain Pendapatan Asli Kelurahan				
		J Pembukuan Kas Kelurahan				
		1) Buku Kas Umum				
		2) Buku Bantu Pengeluaran				
		K Bukti Pengeluaran Keuangan Kas Kelurahan				
		L Laporan Keuangan Kas Kelurahan				
		M Pertanggungjawaban Kepala Kelurahan (Laporan Keuangan Tahunan Kelurahan)				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
43	910	ANGGARAN KEBIJAKAN Kebijakan dan standarisasi teknis di bidang keuangan daerah 1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan 2. Penyusunan Kebijakan 3. Perumusan Kebijakan 4. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) 5. MOU	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan a. Ketahanan Ideologi Negara 1) penguatan ideologi negara 2) implementasi ideologi negara b. Wawasan Kebangsaan 1) penguatan wawasan kebangsaan 2) pembinaan dan sosialisasi 3) implementasi c. Bela Negara 1) pendidikan bela negara 2) pemberdayaan bela negara d. Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan 1) penguatan nilai-nilai sejarah 2) implementasi nilai-nilai sejarah 3) penerbitan rekomendasi penelitian e. Pembauran dan Kewarganegaraan 1) pembinaan pembauran kebangsaan 2) pembinaan kewarganegaraan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2. Kewaspadaan Nasional a. Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan c. Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan d. Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial e. Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing 1) pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing 2) surat pemberitahuan penelitian orang asing 3. Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Masyarakat a. Ketahanan Seni 1) fasilitasi pelaksanaan pelestarian kesenian 2) pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kesenian b. Ketahanan Budaya 1) fasilitasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan 2) pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kebudayaan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		c. Agama dan Kepercayaan 1) fasilitasi 2) data Forum Komunikasi Umat Beragama 3) pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan 4) pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan d. Organisasi Masyarakat 1) pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat 2) laporan hasil kerjasama kegiatan dengan ORMAS/LNL 3) evaluasi aktifitas Ormas 4) fasilitasi sengketa Ormas 5) fasilitasi Ormas e. Masalah sosial Masyarakat 1) fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika 2) masalah sosial masyarakat 4. Politik Dalam Negeri a. Implementasi Kebijakan Politik 1) implementasi kebijakan politik 2) pelaksanaan monitoring dan evaluasi b. Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1) evaluasi kelembagaan politik 2) evaluasi kelembagaan politik c. Fasilitas Kelembagaan Partai Politik 1) verifikasi dan evaluasi partai politik yang memperoleh kursi 2) partai politik yang tidak memperoleh kursi 3) pemerintah daerah 4) <i>database</i> parpol d Pendidikan Budaya Politik 1) fasilitasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik 2) penyelenggaraan pendidikan budaya politik 3) modul sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan e. Pemilihan Umum 1) fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu 2) evaluasi pelaksanaan pemilihan umum wakil rakyat 3) evaluasi pemilihan umum Presiden dan wakil presiden 4) laporan hasil perkembangan politik di daerah 5) laporan hasil kerjasama kegiatan dengan Ormas/LSM/LNL				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		5. Ketahanan Ekonomi a. Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian 1) penanganan kesenjangan perekonomian b. Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal, dan Moneter 1) fasilitasi identifikasi ketahanan di bidang perdagangan, investasi fiskal, dan moneter 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan, dan fasilitasi monitoring dan evaluasi c. Perilaku Perekonomian Masyarakat 1) pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian 2) evaluasi cinta produk dalam negeri dan perlindungan konsumen d. Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi 1) evaluasi pelaksanaan hubungan kerjasama penanganan kejahatan lembaga perekonomian 2) evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan lembaga perekonomian				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		PEMERINTAHAN UMUM 1. Dekonsentrasi dan Kerjasama a. Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan b. Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah c. Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama d. Fasilitas Kecamatan 1) fasilitas 2) koordinasi 3) pembinaan dan pengawasan 4) monitoring dan evaluasi e. Fasilitas Pelayanan Umum 1) fasilitas pelayanan administrasi Kecamatan 2) koordinasi pelayanan administrasi Kecamatan 3) pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi Kecamatan 4) monitoring dan evaluasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2. Wilayah Administrasi dan Perbatasan				
		a. Toponimi dan Data Wilayah				
		1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan toponimi				
		2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembakuan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan				
		3) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi perubahan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan				
		4) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemindahan ibukota daerah dan pemindahan pusat pemerintahan daerah				
		5) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan				
		6) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penghitungan luas wilayah				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		c. Batas antar-Daerah Wilayah 1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penetapan batas antar-daerah 2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelesaian sengketa batas antar-daerah 3. Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat a. Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja 1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi Pelaksanaan tata operasional polisi pamong praja 2) standarisasi sarana prasarana polisi pamong praja b. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja 1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan evaluasi peningkatan kapasitas aparaturn polisi pamong praja c. Perlindungan Masyarakat 1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan masyarakat 2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan aparaturn dan kelembagaan perlindungan masyarakat d. penyidik pegawai negeri sipil 1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan operasional penyidik pegawai negeri sipil 2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan, serta monitoring, dan evaluasi pembinaan dan evaluasi administrasi aparaturn penyidik pegawai negeri sipil				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		e. Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Ma 1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan supervisi hak asasi manusia 4. Kawasan dan Pertanian a. Kawasan Sumber Daya Alam 1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan, serta monitoring pertanian, dan lingkungan b. Pertanian dan Kawasan Khusus 1) penyelenggaraan urusan pertanian 2) penyelesaian sengketa pertanian 3) evaluasi penataan kawasan khusus 5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a. Identifikasi Potensi Bencana 1) evaluasi pelaksanaan pencegahan bencana dan mitigasi bencana b. Organisasi Sistem dan Prosedur 1) pengembangan kerjasama kelembagaan serta penanggulangan bencana c. Sarana dan Prasarana 1) evaluasi standarisasi aplikasi peralatan penyelenggaraan penanggulangan bencana				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) evaluasi pengembangan informasi dan teknologi penyelenggaraan penanggulangan bencana d. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 1) evaluasi pengembangan pemberdayaan masyarakat di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran 2) evaluasi peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran				
		OTONOMI DAERAH 1. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah a. Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi 1) pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 2) penyusunan standar pelayanan minimal 2. Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran 3. Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar-Lembaga a. penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah b. administrasi kepala daerah dan DPRD	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) pengembangan kawasan strategis dan andalan				
		3. Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup				
		a. Penataan Ruang Wilayah				
		1) evaluasi perencanaan, pemanfaatan tata ruang wilayah				
		2) evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian tata ruang wilayah				
		3) implementasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang				
		b. Penataan Ruang Kawasan				
		1) evaluasi tata ruang kawasan				
		2) pembinaan tata ruang kawasan				
		3) implementasi				
		c. Konservasi dan Rehabilitasi				
		1) evaluasi pelaksanaan konservasi				
		2) evaluasi pelaksanaan rehabilitasi				
		3) implementasi				
		d. Perencanaan dan Pemanfaatan Sumberdaya				
		1) evaluasi pengembangan potensi sumber daya air				
		2) evaluasi pemanfaatan sumber daya air				
		3) implementasi				
		e. Pengendalian Lingkungan Hidup				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1) pengembangan instrumen kelembagaan lingkungan hidup 2) analisis dan audit pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 4. Pengembangan Ekonomi Daerah a. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah 1) identifikasi produk unggulan dan analisis potensi ekonomi daerah 2) pengembangan produk unggulan dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah b. Promosi dan Investasi Daerah 1) pelaksanaan promosi ekonomi daerah 2) pelaksanaan investasi daerah c. Sarana dan Prasarana Perekonomian daerah 1) pelaksanaan pengembangan perdagangan daerah 2) pelaksanaan perindustrian daerah d. Kemitraan Usaha 1) perencanaan dan pengembangan kemitraan usaha ekonomi daerah 2) pengelolaan kemitraan usaha ekonomi daerah e. Kelembagaan Ekonomi daerah 1) pelaksanaan pengembangan kelembagaan ekonomi daerah				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi daerah				
		5. Penataan Perkotaan				
		a. Perencanaan Pengendalian Perkotaan				
		1) evaluasi perencanaan perkotaan				
		2) fasilitasi				
		3) pengendalian penataan perkotaan				
		b. Penataan Kota Kecil				
		1) pengendalian pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan				
		2) pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan				
		3) fasilitasi				
		c. Sarana dan Prasarana Perekonomian daerah				
		1) pelaksanaan pengembangan perdagangan daerah				
		2) pelaksanaan perindustrian daerah				
		d. Kemitraan Usaha				
		1) perencanaan dan pengembangan kemitraan usaha ekonomi daerah				
		2) pengelolaan kemitraan usaha ekonomi daerah				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		e. Kerjasama Perkotaan				
		1) pengendalian kerjasama perkotaan antar daerah				
		2) pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan				
		3) fasilitasi				
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
		1. Pemerintahan Kelurahan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		a. Fasilitasi Pengembangan Kelurahan				
		1) pelaksanaan pengembangan kelurahan				
		b. Administrasi Pemerintahan Kelurahan				
		1) pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan				
		c. Fasilitasi Permusyawaratan Kelurahan (LPMK)				
		1) pelaksanaan penataan kelembagaan badan permusyawaratan Kelurahan (LPMK)				
		2) pelaksanaan penataan kewenangan badan permusyawaratan Kelurahan (LPMK)				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2. Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat				
		a. Lembaga Masyarakat				
		1) pembinaan penataan lembaga masyarakat di desa				
		2) pelaksanaan kerjasama lembaga masyarakat				
		b. Pembangunan Partisipatif				
		1) pelaksanaan pengembangan metode pembangunan partisipatif				
		2) pelaporan kinerja pembangunan Kelurahan				
		c. Pendataan Potensi Masyarakat				
		1) inventarisasi potensi masyarakat				
		2) evaluasi perkembangan masyarakat				
		e. Pelatihan Masyarakat				
		1) pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum pelatihan				
		2) evaluasi pelatihan masyarakat				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3. Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a. Budaya Nusantara 1) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat 2) pelaksanaan kerjasama adat istiadat b. Pemberdayaan Perempuan 1) pelaksanaan peningkatan pemberdayaan perempuan 2) pembinaan, perlindungan hak-hak perempuan, dan ketidaksetaraan gender c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 1) pelaksanaan pemberdayaan keluarga 2) pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga d. Kesejahteraan Sosial 1) pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial 2) pelaksanaan penanganan masalah sosial				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		e. Tenaga Kerja kelurahan 1) fasilitasi dan evaluasi pembinaan dan pembinaan tenaga kerja 2) fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja 4. Usaha Ekonomi Masyarakat a. Usaha Pertanian dan Pangan 1) pembinaan dan pengembangan usaha b. Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam 1) pelaksanaan peningkatan kerja sama dan 2) pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha perkreditan dan simpan pinjam c. Produksi dan Pemasaran 1) pelaksanaan pengembangan informasi pasar 2) pelaksanaan diversifikasi pasar d. Usaha Ekonomi dan Keluarga 1) pelaksanaan peningkatan kewirausahaan dan perkoperasian 2) pelaksanaan pengembangan usaha jasa dan industri kecil e. Ekonomi Kelurahan 1) ekonomi Kelurahan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1. Pendaftaran Penduduk a. Identitas Penduduk 1) Berkas pelaksanaan pelayanan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dan Kartu Identitas Anak 2) penyajian pemberian nomor kendali kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dan Kartu Identitas Anak 3) Berkas pencetakan dan distribusi blangko dokumen kependudukan Kartu Identitas Anak b. Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah 1) Berkas pelaksanaan pindah datang penduduk WNI 2) Berkas pelaksanaan pindah datang penduduk orang asing 3) Berkas pelaksanaan perubahan alamat c. Pindah Datang Penduduk antar-negara 1) Berkas perpindahan penduduk Indonesia keluar Negeri dan WNI dari luar negeri 2) berkas pelaksanaan pendaftaran orang asing tinggal terbatas	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		d. Pendataan Penduduk Rentan 1) Berkas pelaksanaan pendataan penduduk korban bencana 2) Berkas pelaksanaan pendataan orang terlarang 3) Pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi 1) monitoring pelaksanaan program pendaftaran penduduk 2) evaluasi pelaksanaan program pendaftaran penduduk 3) pelaksanaan dokumentasi kebijakan pendaftaran penduduk				
		2. Pencatatan Sipil a. Kelahiran dan Kematian 1) fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran 2) fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kematian 3) fasilitasi pelaksanaan pencatatan kelahiran dan kematian 4) pelaksanaan hubungan antar-lembaga dalam rangka pencatatan kelahiran dan kematian	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		b. Perkawinan dan Perceraian 1) fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama non-Islam 2) pencatatan perkawinan dan perceraian 3) pelaksanaan hubungan antar-lembaga dalam rangka pencatatan perkawinan dan perceraian non-Islam c. Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta 1) pelayanan perubahan dan pembatalan akta 2) pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta 3) pelaksanaan hubungan antar-lembaga dalam rangka pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta d. Pencatatan Kewarganegaraan 1) pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan akibat kelahiran 2) pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan akibat non-kelahiran				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3) pelaksanaan pencatatan pewarganegaraan kelahiran dan non- kelahiran 4) pelaksanaan hubungan antar-lembaga dalam rangka pengangkatan pelayanan pencatatan pewarganegaraan e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi 1) penyusunan program dan kegiatan 2) monitoring pelaksanaan program pencatatan 3) evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil sipil 4) pelaksanaan dokumentasi kebijakan pencatatan sipil 3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan a. Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan 1) pengelolaan data administrasi kependudukan 2) pemeliharaan database administrasi kependudukan 3) pengembangan database administrasi kependudukan				
			Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		4) pelayanan pengelolaan data administrasi kependudukan b. Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan 1) penyajian informasi administrasi kependudukan 2) pelaksanaan pelayanan informasi melalui media elektronik 3) pelaksanaan layanan informasi melalui media cetak c. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi 1) pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah dan 2) kebijakan kependudukan dan pengembangan wawasan kependudukan 3) pelaksanaan hubungan antar-lembaga dalam rangka pengembangan wawasan 4) pelaksanaan dokumentasi pelayanan informasi kependudukan 4. Pengembangan Kebijakan Kependudukan a. Kuantitas Penduduk 1) pelaksanaan penyusunan analisis jumlah, struktur, dan komposisi penduduk				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) pelaksanaan analisis pertumbuhan penduduk 3) kebijakan kuantitas penduduk b. Kualitas Penduduk 1) pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia anak, remaja, dan pemuda 2) pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia produktif dan lanjut usia 3) pelaksanaan hubungan antar-lembaga dalam rangka kebijakan kualitas penduduk c. Mobilitas Penduduk 1) kebijakan mobilitas penduduk d. Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk 1) pelaksanaan pengembangan sistem perlindungan penduduk 2) pelaksanaan pengembangan sistem pemberdayaan penduduk 3) perlindungan dan pemberdayaan penduduk e. Pengembangan Wawasan Kependudukan, 1) pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah dan melalui jalur lain				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) pengembangan wawasan kependudukan 3) pelaksanaan hubungan antar-lembaga dalam rangka pengembangan wawasan kependudukan				
		KEUANGAN DAERAH 1. Anggaran Daerah a. Dukungan Teknis Anggaran Daerah 1) penyiapan bahan perumusan sinkronisasi kebijakan anggaran daerah 2) penyusunan tatalaksana anggaran daerah 3) penyusunan tatalaksana anggaran daerah 4) penyiapan data, informasi, dan penyusunan laporan keuangan daerah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		2. Pendapatan dan Investasi Daerah a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1) fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah ,retribusi daerah 2) penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak , retribusi daerah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3) penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah , redistribusi daerah 4) penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah , redistribusi daerah b. Badan Usaha Milik Daerah 1) fasilitasi serta bimbingan teknis di BUMD lembaga keuangan 2) penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi BUMD c. Badan Layanan Umum Daerah 1) analisis, standarisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan BLUD 2) pembinaan pelaksanaan kebijakan, standarisasi teknis, prosedur, kriteria, fasilitasi, bimtek penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD 3) penyiapan pelaksanaan money pola pengelolaan keuangan BLUD d. Pengelolaan Kekayaan Daerah 1) fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan 2) fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3) penyiapan pelaksanaan monev pengelolaan kekayaan dan investasi e. Pinjam dan Obligasi Daerah 1) fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah 2) fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah 3) fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN 4) bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah 5) penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah				
		3. Dana Perimbangan a. Dana Alokasi Umum 1) koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi, dana b. Dana Alokasi Khusus	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		5) Berkas Pelaksanaan Surat Paksa 6) Berkas Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus 7) Berkas Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga Penagihan 8) Berkas Kegiatan Penyitaan 9) Berkas Kegiatan Pemblokiran Rekening dalam Rangka Penagihan 10) Berkas Kegiatan Penjualan Kekayaan Wajib Pajak (Barang Sitaan) dalam Rangka Penagihan 11) Berkas Pelaksanaan Lelang Hasil Sitaan 12) Berkas Kegiatan Pencegahan dan Penyanderaan (PP) 13) Berkas Kegiatan Pencetakan Ulang SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan), STP (Surat Tagihan Pajak), Surat Teguran dan/atau Surat Paksa 14) Berkas Pembetulan atau Penggantian Surat Teguran, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, atau Pengumuman Lelang 15) Berkas Pendukung Kegiatan Penagihan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		I Keberatan/banding/gugatan/peninjauan kembali 1) Berkas Keberatan 2) Berkas Banding 3) Berkas Gugatan 4) Berkas Peninjauan Kembali 5) Berkas Pendukung 6) Berkas Pelaksanaan Putusan 7) Berkas <i>Mutual Agreement Procedure</i> (Prosedur Pembetulan/pengurangan/penghapusan/pembatalan ketetapan pajak/pembatalan hasil pemeriksaan 1) Berkas Pembetulan Ketetapan Pajak 2) Berkas Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi Ketetapan Pajak 3) Berkas Pengurangan/Pembatalan Surat Ketetapan Pajak (SKP)/Surat Tagihan Pajak (STP) 4) Berkas Pembatalan Hasil Pemeriksaan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		J	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		K Permintaan/pemberian data dan informasi perpajakan 1) Berkas Permintaan Data dan Informasi Perpajakan 2) Berkas Pemberian Data dan Informasi Perpajakan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		L Pemberian izin/fasilitas 1) Berkas SKB (Surat Keterangan Bebas) dan Pendukungnya				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) Berkas Izin Perubahan Tahun Buku/Metode Pembukuan dan Pendukungnya				
		3) Berkas Izin Penyusutan Sejak Harta Digunakan dan Pendukungnya				
		M Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		1) Berkas Pendaftaran Objek Pajak dan Penyampaian SPOP				
		2) Berkas Penyampaian SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak)				
		3) Berkas Pendataan PBB				
		4) Berkas Penilaian PBB				
		5) Berkas Perumusan, Pemantauan, dan Pengendalian Kebijakan Teknis di Bidang Penilaian				
		6) Berkas Bimbingan Teknis Pendataan dan Penilaian				
		7) Berkas Penetapan PBB				
		8) Berkas Penerimaan PBB				
		9) Berkas Penagihan PBB				
		10) Berkas Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB				
		11) Berkas Keberatan, Pengurangan, Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan PBB				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1) koordinasi penyiapan data dasar 2) sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus 3) penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus c. Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan 1) penyiapan dukungan teknis dana perimbangan 2) penyiapan data informasi untuk penyusunan lap dana perimbangan				
		4. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah a. Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 1) fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban 2) penyiapan evaluasi raperda pertanggungjawaban keuangan daerah b. Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1) fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah 2) penyiapan evaluasi raperda pertanggungjawaban keuangan daerah c. Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli 1) penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah 2) penyiapan evaluasi raperda pertanggungjawaban keuangan daerah d. Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah 1) penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah 2) penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah 3) pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
44	973	PERPAJAKAN				
		A Kebijakan: Perpajakan dan penagihan pajak dengan surat paksa, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB-BPHTB). 1) Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2) Penyiapan Kebijakan 3) Perumusan kebijakan 4) Penetapan kebijakan 5) Harmonisasi kebijakan 6) Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) 7) MOU	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		B Pendaftaran/pengukuhan/penghapusan/pencabutan/perubahan wajib pajak 1) Berkas Pendaftaran/Pengukuhan/NPWP Daerah 2) Berkas Penghapusan NPWP 3) Penetapan Wajib Pajak Non Efektif (Insidental)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		C Pengelolaan surat pemberitahuan (SPT)/pembetulan SPT 1) SPT dan Dokumen Pendukungnya 2) Faktur Pajak, Nota Retur/Nota Pembatalan 3) Berkas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Wajib Pajak (WP)/Pengungkapan dalam Laporan Tersendiri tentang Ketidakbenaran Pengisian SPT 4) Berkas Kegiatan Penyimpanan dan Peminjaman Dokumen dan Data Perpajakan 5) Berkas Kegiatan Pemilahan dan Pemindaian Dokumen dan Data Perpajakan 6) Berkas Kegiatan Perekaman dan Transfer Data Perpajakan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		D Pengelolaan pembayaran dan penyetoran pajak 1) Berkas Bukti Pembayaran Pajak/Non Pajak 2) Berkas Penundaan/Pengangsuran Pembayaran Pajak 3) Berkas Pemindah bukuan (Pbk)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		E Verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan/penyidikan 1) Berkas Kegiatan Verifikasi 2) Berkas Pemeriksaan Pajak 3) Berkas Pemeriksaan Bukti Permulaan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		4) Berkas Penyidikan 5) Berkas IDLP (Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan) 6) Berkas Kegiatan Pengamatan/ Intelijen 7) Berkas Pendukung Kegiatan 8) Berkas Penelitian SPT				
	F	Penetapan dan ketentuan pajak 1) Berkas Penetapan Surat Ketetapan Pajak (SKP)/Surat Tagihan Pajak (STP) 2) Berkas Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	G	Restitusi pajak dan imbalan bunga 1) Berkas Restitusi Pajak 2) Berkas Imbalan Bunga 3) Berkas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 4) Berkas Perhitungan Lebih Bayar Akibat Permohonan Keberatan/Banding/Peninjauan Kembali/ Pembetulan/Pengurangan/Pembatalan/Penghapusan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	H	Penagihan pajak 1) Berkas Dasar Penagihan Pajak 2) Berkas Keputusan Mengangsor/Menunda Pembayaran Tagihan Pajak 3) Berkas Penghapusan Piutang Pajak 4) Berkas Penerbitan Surat Teguran	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		12) Berkas Pengurangan, Pembetulan, dan Pembatalan Ketetapan PBB 13) Berkas Pemeriksaan PBB 14) Berkas Kompensasi PBB 15) Berkas Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB 16) Berkas Pengalihan PBB-P2 (Pedesaan Perkotaan) Kepada Pemda				
		N Administrasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 1) Berkas Penetapan BPHTB 2) Berkas pengembalian kelebihan pembayaran, keberatan, dan pengurangan BPHTB 3) Berkas Keberatan BPHTB 4) Berkas Pengurangan BPHTB 5) Berkas Pemeriksaan BPHTB	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

WALIKOTA BLITAR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.



SANTOSO

AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008